

DIALOG GLOBAL

9.1

3 edisi per tahun dalam 17 bahasa

Arah Baru untuk Sosiologi Global

Sari Hanafi

Projekt Klassenanalyse
Pablo Pérez
Rodolfo Elbert
Svetlana Yaroshenko
Ngai-Ling Sum
Tania Murray Li
Ruth Patrick
Richard York
Brett Clark

Meneliti Kelas dan Ketidaksetaraan

James K. Galbraith
Klaus Dörre
Éric Pineault
Federico Demaria
Anna Saave-Harnack
Corinna Dengler
Barbara Muraca
Gabriel Sakellaridis
Jorge Rojas Hernández

Setelah Paradigma Pertumbuhan?

Perspektif Teoretis

Ariel Salleh

Populisme Sayap Kanan

Lena Lavinas
Guilherme Leite Gonçalves
Ayşe Bugra
Ramiro C.H. Caggiano Blanco
Natalia Teresa Berti
Justyna Kajta

Seksi Terbuka

- › Menuai Inspirasi dari Marie Jahoda
- › Hubungan Perburuhan di Portugal
- › Memperkenalkan Tim *Dialog Global* Bengali

MAJALAH



International
Sociological
Association
isa



VOLUME 9 / EDISI 1 / APRIL 2019
<http://globaldialogue.isa-sociology.org/>

DG

› Editorial

Di Kongres Sosiologi Dunia ISA ke XIX di Toronto, Kanada, bulan Juli yang lalu, Sari Hanafi terpilih sebagai Presiden baru Asosiasi Sosiologi Internasional. Nomor pertama *Dialog Global* di tahun 2019 ini diawali dengan visi teoritis Hanafi mengenai ISA selama masa jabatannya. Di sini ia mengusulkan untuk mengkombinasikan pendekatan-pendekatan pascakolonial dan pascaotoriter dalam penyelenggaraan wacana di seputar paradigma baru mengenai pluralisme dalam era modernitas majemuk ini.

Sejalan dengan kebangkitan partai-partai populis sayap kanan di seluruh dunia, perdebatan sosiologi mengenai kelas telah mengemuka kembali. Simposium pertama dalam edisi ini mencerminkan tumbuhnya kembali perhatian pada masalah-masalah pembentukan kelas dan hubungan kelas di seluruh dunia dengan sumbangan-sumbangan yang membahas penelitian masa kini di Amerika Latin, Amerika Serikat, Jerman, dan Asia Tenggara. Dalam kaitan dengan penelitian ini, simposium tersebut menjajaki implikasinya bagi bangkitnya kemiskinan dan ketidaksetaraan.

Selama puluhan tahun, upaya membangkitkan pertumbuhan ekonomi merupakan pusat perhatian dari sebagian besar kegiatan ekonomi maupun inisiatif kebijakan dan diskusi ilmiah. Sejak beberapa dasawarsa terakhir, aktivis termasuk juga sosiolog dan ekonom yang jumlahnya kian bertambah, telah memulai perdebatan yang mengesankan mengenai batas-batas dari pertumbuhan. Mereka membahas masa depan, termasuk di beberapa wilayah, kemungkinan diakhirinya angka pertumbuhan tinggi secara permanen maupun dampak kerusakan ekologi dan sosial dari pertumbuhan PDB yang fokusnya sepihak ini. Baik perdebatan para ilmuwan maupun aktivis juga mengkaji alternatif-alternatif yang dimungkinkan dan, secara paling mencolok, ide mengenai “*degrowth*,” suatu konsep yang

bukan tanpa tantangan. Teks simposium kedua mencerminkan diskusi-diskusi di seputar masa depan pertumbuhan dan kemungkinan *degrowth* sebagai suatu kemungkinan alternatif.

Dengan mempertimbangkan keadaan genting global masa kini, dalam kontribusi teoretisnya, Ariel Salleh mengusulkan suatu analisis sosiologis yang baru mengenai kelas yang mempersatukan para ibu, petani, dan para pengumpul dalam kaitan dengan keterampilan material mereka yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan di Bumi. Melalui suatu refleksi sejarah terhadap perdebatan di seputar ekofeminisme, ia menyerukan agar membangun suatu sosiologi kritis dan pemikiran mengenai materialisme yang terwujud.

Berakhirnya banyak pemerintahan kiri di Amerika Latin bertepatan dengan bangkitnya pemerintahan sayap kanan yang kadang-kadang otoriter di banyak kawasan dunia lainnya. Di sini para ilmuwan dari Brasil, Kolumbia, Turki dan Polandia mengkaji perkembangan sejarah dan politik dari populisme sayap kanan tersebut.

Tiga artikel dimuat dalam Seksi Terbuka edisi ini. Johann Bacher, Julia Hofmann, dan Georg Hubmann menyajikan tesis doktor Marie Jahoda yang baru terbit dan mengingatkan kita tentang apa yang dapat kita pelajari selaku ilmuwan sosial dan warga yang terlibat secara politik, dari kehidupan dan karyanya. Elísio Estanque dan António Casimiro Ferreira menyajikan suatu wawasan kepada kita mengenai konfigurasi politik-buruh baru di Portugal dalam periode pasca-Troika akhir-akhir ini, sedangkan Tim *Dialog Global* Bengali memperkenalkan diri berikut karya mereka. ■

Brigitte Aulenbacher dan **Klaus Dörre**,
editor *Dialog Global*

› ***Dialog Global* dapat diperoleh dalam 17 bahasa pada [website ISA](#).**

› **Naskah harap dikirim ke globaldialogue.isa@gmail.com.**

ISA International
Sociological
Association

**DIALOG
GLOBAL**



> Dewan Redaksi

Editor: Brigitte Aulenbacher, Klaus Dörre.

Asisten Editor: Johanna Grubner, Christine Schickert.

Rekan Editor: Aparna Sundar.

Editor Pelaksana: Lola Busuttill, August Bagà.

Konsultansi: Michael Burawoy.

Konsultansi Media: Gustavo Taniguti.

Editor Konsultasi:

Sari Hanafi, Geoffrey Pleyers, Filomin Gutierrez, Eloísa Martín, Sawako Shirahase, Izabela Barlinska, Tova Benski, Chih-Jou Jay Chen, Jan Fritz, Koichi Hasegawa, Hiroshi Ishida, Grace Khunou, Allison Loconto, Susan McDaniel, Elina Oinas, Laura Oso Casas, Bandana Purkayastha, Rhoda Reddock, Mounir Saidani, Ayse Saktanber, Celi Scalón, Nazanin Shahrokni.

Editor Wilayah

Dunia Arab: Sari Hanafi, Mounir Saidani.

Argentina: Juan Ignacio Piovani, Alejandra Otamendi, Pilar Pi Puig, Martín Urtasun.

Bangladesh: Habibul Haque Khondker, Hasan Mahmud, Juwel Rana, US Rokeya Akhter, Toufica Sultana, Asif Bin Ali, Khairun Nahar, Kazi Fadia Esha, Helal Uddin, Muhaimin Chowdhury, Md. Eunus Ali.

Brasil: Gustavo Taniguti, Andreza Galli, Lucas Amaral Oliveira, Benno Warken, Angelo Martins Junior, Dmitri Cerboncini Fernandes.

Prancis/Spainyol: Lola Busuttill.

India: Rashmi Jain, Pragya Sharma, Nidhi Bansal, Sandeep Meel.

Indonesia: Kamanto Sunarto, Hari Nugroho, Lucia Ratih Kusumadewi, Fina Itriyati, Indera Ratna Irawati Pattinasarany, Benedictus Hari Juliawan, Mohamad Shohibuddin, Dominggus Elcid Li, Antonius Ario Seto Hardjana, Diana Teresa Pakasi, Nurul Aini, Geger Riyanto, Aditya Pradana Setiadi.

Iran: Reyhaneh Javadi, Niayesh Dolati, Sina Bastani, Sayyed Muhammad Mutallebi, Vahid Lenjanzade.

Jepang: Satomi Yamamoto, Sara Maehara, Masataka Eguchi, Riho Tanaka, Marie Yamamoto.

Kazakstan: Aigul Zabirowa, Bayan Smagambet, Adil Rodionov, Almash Tlespayeva, Kuanysh Tel, Almagul Mussina, Aknur Imankul.

Polandia: Jakub Barszczewski, Katarzyna Dębska, Anna Dulny-Leszczynska, Krzysztof Gubański, Monika Helak, Sara Herczyńska, Justyna Kościńska, Łucja Lange, Iga Łazińska, Adam Müller, Weronika Peek, Zofia Penza-Gabler, Jonathan Scovil, Marcjanna Szczepaniak, Agnieszka Szypulska, Anna Tomala, Mateusz Wojda.

Rumania: Cosima Rughiniş, Raisa-Gabriela Zamfirescu, Luciana Anăstăsoaie, Costinel Anuţa, Maria Loredana Arsene, Diana Alexandra Dumitrescu, Radu Dumitrescu, Iulian Gabor, Dan Gîţman, Alecsandra Irimie-Ana, Iulia Jugănar, Ioana Mălureanu, Bianca Mihăilă, Andreea Elena Moldoveanu, Rareş-Mihai Muşat, Oana-Elena Negrea, Mioara Paraschiv, Alina Cristina Păun, Codruţ Pînzaru, Susana Maria Popa, Adriana Sohodoleanu, Elena Tudor.

Rusia: Elena Zdravomyslova, Anastasia Daur, Valentina Isaeva.

Taiwan: Jing-Mao Ho.

Turki: Gül Çorbacıoğlu, İrmak Evren.



Dalam artikelnya yang programatis **Sari Hanafi**, presiden ISA yang baru, membahas visinya untuk ISA hingga empat tahun mendatang. Ia menyerukan adanya paradigma pluralisme guna memperkuat “Sosiologi Berdialog” global.



Pertumbuhan Ekonomi merupakan dasar kemakmuran di masyarakat-masyarakat Barat namun pertumbuhan keluaran barang secara terus-menerus memperparah kerusakan ekologi planet. Di sini para kontributor dari seluruh dunia membahas peran pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat, masalah dan tantangannya maupun visi-visi alternatif di luar paradigma ini.



Berakhirnya banyak pemerintahan kiri Amerika Latin bertepatan dengan kebangkitan pemerintahan-pemerintahan sayap kanan di berbagai wilayah lain di dunia, sering dengan kecenderungan otoriter dan populis. Dalam seksi ini para ilmuwan dari Brasil, Kolombia, Turki, dan Polandia membahas latar belakang sejarah dan politik perkembangan **populisme sayap kanan**.



Dialog Global dapat terselenggara berkat dana hibah dari **SAGE Publications**.

› Dalam Edisi Ini

Editorial	2	Tantangan untuk Strategi <i>Degrowth</i> : Kasus Yunani oleh Gabriel Sakellariadis, Yunani	34
› MEMBAHAS SOSIOLOGI			
Sosiologi Global – Menuju Arah Baru oleh Sari Hanafi, Lebanon	5	Cile: Dari Neoliberalisme ke Masyarakat Pascapertumbuhan? oleh Jorge Rojas Hernández, Cile	36
› MENELITI KELAS DAN KETIDAKSETARAAN			
Untuk Dialog Global tentang Kelas oleh Projekt Klassenanalyse, Jerman	8	› PERSPEKTIF TEORETIS	
Kelas dan Kepentingan Kelas di Amerika Latin oleh Pablo Pérez, Cile dan Rodolfo Elbert, Argentina	10	Sosiologi Ekofeminis sebagai Analisis Kelas Baru oleh Ariel Salleh, Australia	38
Kemiskinan dan Eksklusi Sosial di Rusia Pascasosialis oleh Svetlana Yaroshenko, Rusia	12	› KEBANGKITAN GLOBAL POPULISME SAYAP-KANAN	
<i>Lumpenproletariat</i> dan <i>Subaltern</i> Perkotaan di Tiongkok oleh Ngai-Ling Sum, Inggris Raya	14	Brasil 2018: Kelas-kelas Menengah Bergeser Ke Kanan oleh Lena Lavinias dan Guilherme Leite Gonçalves, Brasil	41
Pembentukan Kelas dan Kapitalisme Agraria oleh Tania Murray Li, Kanada	16	Populisme, Identitas, dan Pasar oleh Ayşe Buğra, Turki	44
Hidup dengan (dan Melawan) Reformasi Kesejahteraan di Inggris Raya oleh Ruth Patrick, Inggris Raya	18	Populisme Sayap-Kanan di Amerika Latin: Kepentingan Diri di Atas Kesejahteraan Sosial oleh Ramiro Carlos Humberto Caggiano Blanco, Brasil dan Natalia Teresa Berti, Kolombia	46
Kelas dan Ekologi oleh Richard York dan Brett Clark, AS	21	Nasionalisme Radikal sebagai Budaya Tandingan Baru di Polandia? oleh Justyna Kajta, Polandia	48
› SETELAH PARADIGMA PERTUMBUHAN?			
<i>Choke-Chain Effect</i> : Kapitalisme Setelah Melampaui Pertumbuhan Cepat oleh James K. Galbraith, AS, dan Klaus Dörre, Jerman	24	› SEKSI TERBUKA	
Kondisi Pascapertumbuhan oleh Éric Pineault, Kanada	26	Menuai Inspirasi dari Marie Jahoda oleh Johann Bacher, Julia Hofmann dan Georg Hubmann, Austria	51
<i>Degrowth</i> : Seruan bagi suatu Transformasi Sosio-Ekologi Radikal oleh Federico Demaria, Spanyol	29	Hubungan Perburuhan dan Dialog Sosial di Portugal oleh Elísio Estanque dan António Casimiro Ferreira, Portugal	53
Feminisme dan <i>Degrowth</i> —Aliansi atau Hubungan Mendasar? oleh Anna Saave-Harnack dan Corinna Dengler, Jerman, dan Barbara Muraca, AS	32	Memperkenalkan Tim <i>Dialog Global</i> Bengali	55

“Hal yang sangat penting ialah bahwa beberapa konsep dalam sosiologi mendapatkan pengakuan universal, seperti konsep hak asasi manusia, tetapi menurut saya universalitas konsep-konsep itu hanya mungkin melalui konsensus lintas budaya yang tumpang-tindih, dan bukan melalui universalisasi nilai-nilai yang datang dari suatu konteks Eropa-Amerika”

Sari Hanafi

› Sosiologi Global: Menuju Arah Baru

oleh **Sari Hanafi**, Universitas Amerika di Beirut, Lebanon, dan Presiden Asosiasi Sosiologi Internasional (2018-2022)



Sari Hanafi, Presiden Asosiasi Sosiologi Internasional.

lestina, Prancis dan Lebanon. Saya dengan demikian dibentuk oleh berbagai perdebatan yang muncul dari lingkungan seperti itu.

Karena waspada (sungguh waspada) terhadap kategori-kategori biner antagonis (seperti tradisi/modernitas, Timur/Barat, universalisme/kontekstualisme, dll.) saya mengusulkan agar berbagai aliran sosiologi itu terus berdialog. *Sosiologi dalam Dialog* sebenarnya adalah judul dari Konferensi ISA keempat dari Dewan Asosiasi Nasional (Fourth ISA Conference of the Council of National Associations) dan juga judul dari buku yang saya sunting bersama Chin-Chun Yi dan akan diterbitkan oleh SAGE. Hal yang sangat penting ialah bahwa beberapa konsep dalam sosiologi mendapatkan pengakuan universal, seperti konsep hak asasi manusia, tetapi menurut saya universalitas konsep-konsep itu hanya mungkin melalui konsensus lintas budaya yang tumpang-tindih, dan bukan melalui universalisasi nilai-nilai yang datang dari suatu konteks Eropa-Amerika. Satu contoh yang saya ajukan adalah konsep demokrasi. Apakah demokrasi universal? Ya, tetapi bukan sebagai model yang harus diekspor ke konteks lain, mengutip Florent Guénard (2016) bahwa demokrasi bukan konsep dengan *telos*, tetapi pengalaman historis yang mendapatkan otoritas normatif dari penyebaran konsep ini, terutama sejak masa 1980-an di Amerika Latin, lalu Eropa Timur dan Tengah, dan akhirnya beberapa negara di dunia Arab. Jadi, yang bersifat universal adalah suatu hasrat imajinatif tentang demokrasi yang jejaknya terdapat dalam slogan mengenai kebebasan, keadilan, dan martabat manusia yang diusung oleh para demonstran. Universalisme normatif semacam ini enteng sifatnya dan tidak membutuhkan apa yang disebut oleh Armando Salvatore pada tahun 2016 sebagai “pola-pola keadaban yang berbeda.”

Saya merasa terhormat terpilih sebagai Presiden Asosiasi Sosiologi Internasional (ISA) dalam kongres bulan Juli 2018 di Toronto. Dalam tulisan ini saya hendak menjelaskan program yang saya tanggung dalam pidato saya sebagai calon untuk jabatan ini, dan saya ingin menekankan agenda yang berisi tiga hal yaitu sosiologi dalam dialog, menuju pendekatan pascaotoriter, dan krisis dalam teori sekularisasi yang terjadi saat ini.

› Sosiologi dalam dialog

Di antara dua puluh orang Presiden ISA yang terpilih sebelumnya, hanya dua orang yang berasal dari luar Eropa dan Amerika Utara, dan saya adalah yang ketiga. Saya membawa sensitivitas sosiologis tertentu yang merupakan hasil dari perjalanan hidup pribadi dan karir profesional saya yang mencakup pendidikan universitas di Suriah, lalu Prancis, dan bekerja di berbagai lingkungan akademis yang beragam di Mesir, Pa-

Akan tetapi, karena kita tidak ingin meringkai debat ini hanya sebagai emansipasi dari situasi kolonial dan hegemoni produksi pengetahuan Barat, pendekatan pascakolonial tidak memadai untuk menerangkan persoalan-persoalan produksi pengetahuan. Pendekatan ini perlu dilengkapi dengan yang saya sebut sebagai “pendekatan pascaotoriter (*post-authoritarian approach*).” Artinya, pendekatan ini menakar bukan hanya akibat kolonialisme tetapi juga akibat otoriterisme lokal.

› Menuju pendekatan pasca-otoriter

Mau tidak mau, kita harus mengakui luka yang ditinggalkan oleh masa kolonial. Luka itu masih ada; melumpuhkan sebagian orang, dan membuat sebagian orang lain takut melangkah lagi di jalan yang sama. Akan tetapi kajian pascakolonial, yang amat menekankan faktor-faktor eksternal dan mengabaikan faktor-faktor lokal, bisa dipakai dan sekaligus disalahgunakan. Kedekatan istilah antara *kajian pascaotoriterisme* dan pascakolonialisme berarti bahwa karena kemiripannya, kajian pascaotoriterisme bisa menggunakan beberapa asumsi yang mendasari kajian pascakolonial, terutama mengenai struktur kekuasaan. Meski demikian, ini tidak berarti bahwa kita harus memaklumi otoriterisme, juga bukan bahwa kita sudah “melampaui (pasca)” era ini.

Dalam pengertian kita, otoriterisme bukan sekedar kecenderungan negara untuk bertindak secara tidak demokratis melalui pemaksaan pemolisian dan birokratis dalam kehidupan bersama. Dalam pengertian yang lebih deskriptif ini, semua negara itu otoriter sampai tingkat tertentu. Ini bukanlah negara di mana sang penguasa membuat pengecualian untuk membatalkan hak-hak rakyat seperti dalam pengertian *state of exception* dari Carl Schmitt. Kita semua tahu bahwa semua negara memiliki “momen” atau kecenderungan melakukan tindakan pengecualian dan otoriter. Yang saya maksud, otoriterisme adalah *penghilangan secara sistematis akuntabilitas atau partisipasi rakyat dalam keputusan-keputusan negara dan sentralisasi kekuasaan eksekutif di tangan birokrasi* sebagaimana dirumuskan oleh Graham Harrison pada tahun 2018.

Ada macam-macam tingkatan otoriterisme yang berbeda: ada yang mengenai suatu rezim; ada yang tentang sistem ekonomi-politik; dan yang ketiga pada tingkat individu.

› Brutalisasi otoriterisme

Gagasan pokok Norbert Elias dalam bukunya yang terkenal *The Civilizing Process* adalah bahwa masyarakat berevolusi melalui proses mengerem atau mengurangi kekerasan individu (pasifikasi perilaku). Akan tetapi, dewasa ini kita menyaksikan apa yang disebut oleh Josepha Laroche tahun 2017 lalu sebagai “kembalinya sifat yang terespresi” atau yang disebut oleh George Mosse tahun 1991 sebagai “brutalisasi” untuk menunjukkan erosi proses pengadaban atau pasifikasi tersebut. Aktor-aktor negara merupakan pelaku utama dari brutalisasi masyarakat melalui aparat polisi dan militer. Selain itu kita juga menyaksikan meningkatnya kekuasaan aktor-aktor non-negara. Contohnya, dari pengalaman saya yang pernah tinggal di Siria dan Libanon, adalah ISIS dan aktor-aktor sektarian lainnya yang menolak negara dengan memobilisir solidaritas komunal. Akan tetapi kita juga harus memperhitungkan aktor-aktor global non-negara seperti perusahaan multinasional dan pasar keuangan yang membentuk “aktor-aktor bebas kedaulatan” menurut istilah James Rosenau pada tahun 1990. Meskipun demikian, aktor-aktor non-negara jarang-jarang beroperasi tanpa persetujuan dan bantuan dari aktor-aktor negara. ISIS tidak akan pernah ada tanpa pemblokiran total ruang politik oleh elit berkuasa di Siria, atau tanpa rezim Irak yang sangat sektarian. Aktor-aktor negara dan non-negara bukan hanya melakukan brutalisasi terhadap masyarakat, mereka juga menghadirkan-

nya bagi dunia, dan saat ini kita adalah saksi sekaligus ambil bagian di dalamnya. Lebih parah lagi, seperti halnya di Siria, Libia dan Yaman, perang menyebabkan “brutalisasi politik” yang berarti bahwa politik menjadi sulit tanpa kekerasan.

Menurut Laroche, proses brutalisasi ini dimulai dengan penghancuran ikatan sosial dan solidaritas, yang mengarah pada peliyanan (*othering*) dan eksklusi kelompok-kelompok tertentu seperti kaum miskin dan orang asing dari komunitas bangsa dan memungkinkan barbarisme sehari-hari terhadap mereka dan akhirnya menyebar ke seluruh masyarakat.

› Otoriterisme neoliberal

Interaksi antara yang ekonomis dan yang politis menghasilkan munculnya suatu konfigurasi ekonomi-politik unik yang saya sebut otoriterisme neoliberal. Akan tetapi, konfigurasi baru ini bukan semata-mata capaian kombinasi kedua hal tersebut, melainkan hasil dari artikulasi baru yang dalam banyak hal mengubah baik neoliberalisme maupun kekuasaan otoriter.

Kita tahu bahwa neoliberalisme telah menghasilkan ketidakadilan ekonomi dan sosial yang luas serta pemiskinan. Akan tetapi ada hal yang baru yaitu penggunaan secara sistematis kuasa pemaksaan negara yang terpusat untuk menggerakkan transformasi kapitalis dalam masyarakat-masyarakat di mana kelas kapitalis itu lemah dan tidak dominan. Masyarakat kapitalis klasik biasanya menghasilkan suatu sistem dominasi melalui rezim politik demokratis, tetapi ini tidak terjadi di banyak negara pinggiran, dan di sebagian negara Barat di mana kelas kapitalisnya telah menipis dan lebih banyak terlibat dalam kontestasi. Relasi antarkekuatan sosial yang mendukung negara tidak hanya dibentuk oleh kelas, seperti yang dikatakan Nicos Poulantzas, tetapi mencakup hirarki ras dan gender yang dibentuk oleh proses-proses yang disebut Aníbal Quijano sebagai kolonialitas kekuasaan, yang diartikulasikan secara berbeda dalam waktu dan ruang.

› Warganegara otoriter

Sebagai suatu sistem politik yang diterapkan oleh aktor-aktor negara dan non-negara, otoriterisme berlangsung dalam korelasi dengan warga negara yang otoriter. Para pemimpin otoriter mengerdikan imajinasi: mereka mencari robot-robot membosankan yang mematuhi perintah mereka ketimbang subjek yang otonom dengan kepribadian independen. Mekanisme untuk menjadi warga negara yang otoriter bukan hanya didorong dari atas, melainkan juga diproduksi dalam hubungan dengan cara berpikir praktis.

Menurut Maeve Cooke ada dua komponen cara berpikir praktis otoriter yang saling berhubungan. Pertama adalah konsep-konsep otoriter mengenai pengetahuan. Konsep-konsep ini membatasi akses pengetahuan hanya bagi sekelompok orang yang memiliki hak istimewa dan membangun suatu sudut pandang yang lepas dari pengaruh historis dan kontekstual yang menjamin validitas tanpa syarat bagi klaim-klaim kebenaran dan kepatutan. Kedua, adalah konsep-konsep otoriter mengenai pembenaran, yang memisahkan kesahihan proposisi dan norma dari cara berpikir subjek manusiawi, yang menganggap bahwa proposisi dan norma-norma itu bersifat sah.



Sebagian orang, terutama kaum beragama, atau mereka yang mempunyai satu atau dua komponen cara berpikir otoriter tadi, sulit diajak berdebat di ruang publik. Karena konsepsi warga negara mengandaikan otonomi politik setiap pribadi, Maeve Cooke berpendapat bahwa warga negara hendaknya memiliki otonomi etis. Otonomi ini didasarkan pada intuisi bahwa kebebasan manusia, pada umumnya, terdiri dari kebebasan untuk membentuk dan mengusahakan konsepsi mereka mengenai kebaikan atas dasar cara berpikir yang bisa mereka sebut sebagai miliknya sendiri. Dalam proses revolusi dan kontra-revolusi di dunia Arab dan dalam debat untuk mengenali kekuatan-kekuatan demokratis, kita jarang memperhatikan cara berpikir praktis para elit, dan biasanya hanya menitikberatkan pada paradigma sekularisasi saja. Kekuatan-kekuatan sekuler dipandang kebal terhadap cara berpikir praktis otoriter sementara gerakan-gerakan Islam politik dianggap bekerja mengikuti cara berpikir demikian. Tentu saja hal ini terlalu menyederhanakan, dan perlu diperiksa kembali karena warga negara otoriter dapat dijumpai di kedua jenis kelompok elit tersebut. Karena itu menurut saya teori sekularisasi sedang mengalami krisis serius, dan tidak bisa menjelaskan transformasi relasi warga negara dengan agama.

› Krisis dalam teori sekularisasi

Meskipun sekularisasi masih merupakan jalan yang penting menuju demokrasi dan modernitas, proses ini perlu dipersoalkan dari sudut pandang pascasekuler agar bebas dari sebagian eksekutif dan kekurangannya. Dalam pembicaraan baru-baru ini dengan Jim Spickard, Presiden Komite Penelitian ISA tentang Sosiologi Agama (RC22), ia mengakui bahwa sosiologi secara historis telah menganut teori sekularisasi, yang menurut sosiolog seperti David Martin, Manuel Vásquez dan dia sendiri berasal dari pertarungan intelektual yang dikobarkan oleh para sosiolog awal melawan agama reaksioner di Prancis pada akhir abad sembilan belas dan awal abad dua puluh. Bagi Peter Berger teori ini, yang memandang modernitas sebagai jalan menuju kemunduran agama, telah terbukti keliru secara empiris, dan harusnya diganti dengan teori tentang pluralisme yang lebih bernuansa. Evolucionisme yang menandai agama sebagai “masa lalu” dan sosiologi sebagai “masa depan” telah tertanam dalam cara berpikir kita. Akibatnya, kebangkitan kembali agama di ruang publik pada masa 1980-an dan 1990-an segera digolongkan sebagai “fundamentalis” dan sebagai “reaksi terhadap modernitas.” Debat yang berkembang ini, menurut Ulrike Popp-Baier, dibingkai dalam tiga tipe ideal meta-narasi. Yang pertama adalah narasi mengenai *kemerosotan* ikatan, praktik dan keyakinan keagamaan karena penyebaran cara pandang ilmiah. Yang kedua adalah narasi mengenai *transformasi*, dengan argumen tentang “agama yang tak terlihat,” “agama implisit,” “percaya tanpa menjadi pemeluk,” “agama perwakilan (*vicarious religion*),” “pelembagaan hukum terhadap agama” (*judicialization of religion*), dan, yang dalam beberapa tahun belakangan ini semakin mencolok, “spiritualitas,” yang mengisyaratkan suatu metamorfosis dari bentuk sosial agama dalam konteks perubahan budaya dan kemasyarakatan yang lebih luas yang terkait dengan individualisasi dan subjektivisasi. Yang ketiga adalah *narasi kebangkitan*, yang menghubungkan kegairahan beragama dengan pluralisme agama dan pasar di mana organisasi-organisasi agama saling berkompetisi; dalam kasus

Islam, kebangkitan ini dikaitkan dengan radikalisme dan bahkan terorisme.

Kita harus mengatasi klise yang memberi cap religius atau sekuler pada beberapa wilayah geografis untuk menganalisis tradisi-tradisi intelektual yang berbeda, agama-agama kerakyatan, dan wadah-wadah lembagawi yang telah menghasilkan berbagai bentuk agama dan religiositas dalam masyarakat kontemporer. Dalam perdebatan sosiologis, pentinglah mendiskusikan tempat agama dalam demokrasi dan ruang publik. Warganegara tidak bisa dimintai pertanggungjawaban moral bagi keyakinan politik mereka tanpa melibatkan keyakinan agama mereka, seperti yang dilakukan oleh John Rawls. Bahkan dalam konsepsi Habermas mengenai pluralisme, Rawls mengakui tempat agama dalam ruang publik dan berpendapat bahwa komunitas beragama harus melakukan refleksi diri secara hermeneutik untuk mengembangkan posisi epistemik terhadap klaim agama-agama dan cara-cara pandang lain, terhadap pengetahuan sekuler terutama kepakaran ilmiah, dan terhadap prioritas cara pandang sekuler di arena politik. Akan tetapi apakah memang mungkin memisah-misahkan cara pikir “keagamaan” dari cara pikir “sekuler”? Para ahli seperti Darren Walhof (2013) mengatakan bahwa “teologi, politik dan identitas komunitas beragama semuanya terkait satu sama lain ketika para pemimpin keagamaan dan warganegara menerapkan dan merumuskan kembali teologi mereka dalam konteks politik yang baru.”

Meskipun demikian, bercampurnya hukum, agama, politik dan masyarakat telah menyebabkan berbagai persoalan, seperti sektarianisme. Di daerah-daerah yang dilanda konflik seperti Timur Tengah, sektarianisme adalah salah satu sumber dinamika konflik utama, tetapi sekaligus juga merupakan mekanisme untuk membentuk identitas lokal lewat apa yang oleh Azmi Bishara tahun 2017 disebut sebagai “sekte-sekte terbayangkan” (*imagined sects*). Demikian pula, Israel baru-baru ini mengesahkan undang-undang yang menyatakan bahwa orang-orang Yahudi memiliki hak istimewa atas penentuan nasib sendiri secara nasional, sambil tetap meneruskan politik *apartheid* di dalam Israel dan di wilayah Palestina.

› Kesimpulan

Di tengah melandanya “demokrasi-demokrasi liberal” (*illiberal democracies*) dan serangan oleh demokrasi-demokrasi mapan terhadap hak-hak dan kebebasan sipil, ISA hendaknya menangkap kekhawatiran dan perasaan begitu banyak orang di dunia pada saat ini. Hannah Arendt menempatkan asal-usul totaliterisme pada kombinasi faktor-faktor eksternal (imperialisme, krisis kerajaan-kerajaan multinasional) dan faktor-faktor internal (anti-Semitisme dan rasisme). Demikian pula, saya percaya bahwa ISA perlu menggabungkan analisis terhadap kolonialisme dan otoriterisme. ISA hendaknya mengarahkan pembicaraan seputar paradigma baru tentang agama dan pluralisme di era modernitas majemuk. Ini hanya mungkin dengan membangun bingkai yang lebih tepat untuk memahami percampuran dimensi-dimensi mikro dan makro yang menandai situasi global saat ini, dan dengan membangun “teori sosiologi di luar kanon” (*sociological theory beyond the canon*) seperti yang menjadi judul buku Alatas dan Sinha tahun 2017. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Sari Hanafi <sh41@aub.edu.lb>

› Untuk Dialog Global tentang Kelas

oleh **Projekt Klassenanalyse Jena (PKJ)**, Universitas Jena, Jerman

› Mengapa kita membutuhkan teori kelas-PKJ mencari mitra

Kita saat ini dihadapkan dengan semakin intensifnya ketidaksetaraan sosial dan meningkatnya protes sosial di seluruh dunia, sementara perekonomian global masih rentan terhadap krisis. Ini bahkan berlaku pula untuk pusat-pusat kapitalis. Menurut statistik resmi, pada tahun 2017, 19% dari penduduk Jerman terancam oleh kemiskinan atau eksklusi sosial; penelitian lain juga menunjukkan polarisasi sosial yang meningkat. Sementara itu, sebagian besar dunia mengalami pergeseran politik ke kanan. Mengingat kecenderungan ini, kita melihat bahwa istilah “kelas,” yang—setidaknya di Jerman—hampir sepenuhnya tidak muncul dalam perdebatan publik di beberapa dekade terakhir, perlahan-lahan kembali ke wacana akademik dan politik. “Projekt Klassenanalyse Jena” (Proyek Analisis Kelas Jena) baru-baru ini dimulai di Universitas Friedrich Schiller, Jena. Kami ingin memproses kembali diskusi masa lalu tentang kelas, berkontribusi pada teori kelas kontemporer, dan menyediakan forum untuk diskusi tentang politik kelas saat ini. Dalam hal ini, kami ingin memulai perbincangan dengan para akademisi dan aktivis dari seluruh dunia.

› Mengapa perlu membahas “kelas”?

Kekuatan konsep-konsep sosiologis mengenai kelas adalah bahwa konsep-konsep tersebut secara analitis berfokus pada hubungan mendasar (*inner linkages*) antara ketidaksetaraan ekonomi, politik, dan budaya. Kapasitas kritis dari istilah “kelas” dalam tradisi Marxis adalah bahwa hal tersebut mengungkapkan struktur-struktur kekuasaan dan kontrol yang berakar pada pembagian kerja ekonomi dan struktur kepemilikannya. Oleh karenanya, bagi Marx, kelas merupakan kategori relasional: kelas pekerja yang mendapatkan upah berada dalam hubungan yang antagonis dan bersifat konflik dengan kelas kapitalis. Tidak seperti pendekatan “lingkungan” (*milieu*) atau stratifikasi (kelas atas, kelas menengah, kelas pekerja, dll.), istilah “kelas” dalam tradisi Marxis menggambarkan hubungan struktural yang dapat menghubungkan kondisi kerja dan kehidupan kelompok-kelompok sosial satu sama lain alih-alih hanya menggambarkan ketidaksetaraan ekonomi. Melalui konsep “eksploitasi” (Marx), “pembatasan sosial”

(*social closure*) (Weber), “distingsi” (Bourdieu), dan “kontrol birokrasi” (Wright), istilah “kelas” utamanya mengacu pada hubungan vertikal ketidaksetaraan, dan, jika menunjuk pada hubungan kekuasaan, istilah itu sama-sama merupakan sebuah konsep dalam teori sosial maupun sebuah istilah politik. Ini mencakup hegemoni dan representasi politik serta pertanyaan-pertanyaan tentang keistimewaan-keistimewaan naratif dalam proses kultural dan intelektual dari hubungan antar kelas.

› Tantangan baru

Mempertimbangkan tantangan baru dan perubahan sosial yang dinamis dan disruptif, teori kelas kontemporer perlu membahas topik dan masalah penting berikut ini:

Fragmentasi kelas dan krisis keterwakilan politik

Tanda abadi neoliberalisme yang telah membekas pada kondisi kehidupan penduduk-penduduk di seluruh dunia menimbulkan tantangan besar bagi analisis kelas. Fragmentasi kondisi kerja dan hubungan produksi telah memilah-milah kelas pekerja lebih lanjut dan membawa heterogenitas yang sangat besar di dalamnya. Perkembangan ini telah disertai oleh peningkatan konsentrasi kekayaan yang mendukung kelas atas yang sangat kecil di satu sisi dan oleh munculnya “kelas-kelas berbahaya baru [kaum prekariat]” (Guy Standing) serta perpecahan di dalam kelas menengah. Ini adalah lahan yang subur di mana ideologi pengkotak-kotakan sosial (*social division*) dan populisme sayap kanan berkembang biak. Hilangnya perspektif kelas yang menyatu dalam arena publik dan kehidupan politik sehari-hari menunjukkan adanya “masyarakat kelas yang terdemobilisasi” (Klaus Dörre), di mana dinamika terkait kelas terus bekerja di bawah permukaan wacana sosial, tetapi hampir tidak diberi label seperti itu di ruang politik. Krisis kapitalisme keuangan dan krisis keterwakilan politik, kelemahan dan posisi defensif partai-partai kiri dan serikat pekerja, serta rusaknya kesadaran kolektif yang luas yang berkaitan dengan kelemahan ini membentuk sebuah gerbang bagi pergeseran politik ke kanan. Pada saat yang sama, kita menyaksikan meningkatnya kekuatan-kekuatan dan formasi-formasi kaum kiri di negara-negara seperti Prancis, Portugal, Spanyol, dan Yunani. Di banyak negara Utara Global, protes telah bergeser kepada isu-isu tentang

“Kami ingin menyerukan suatu pertukaran global untuk memodelkan teori kelas yang mempertimbangkan bentuk-bentuk spesifik dari masing-masing masyarakat sementara juga mengungkapkan kecenderungan-kecenderungan umum pada skala global”

migrasi. Diskusi-diskusi di kaum kiri yang politis sering dipersempit menjadi kontradiksi yang salah antara “kelas” versus “identitas.” Beberapa pertanyaan mendesak yang muncul dalam situasi ini meliputi:

- Apa hubungan antara struktur ekonomi, kesadaran politik, dan budaya?
- Apa hubungan antara kelas dan sumbu-sumbu konflik lainnya (gender, migrasi, dll.)?
- Bagaimana deklasifikasi dan distingsi bermain di dalam kelas yang didominasi? Bagaimana hubungan kelas berpengaruh ketika tidak ada keterwakilan kepentingan kelas dalam organisasi politik?
- Faksi kelas mana yang dominan dalam masyarakat tunggal tetapi juga berlangsung secara global, dan bagaimana mereka mengartikulasikan kepentingan mereka?

Ketidaksetaraan yang khas-kelas dan hubungan kelas transnasional

Keadaan negara-negara OECD [akhir-akhir ini] ditandai oleh peningkatan pengangguran, kemiskinan, dan kaum prekariat, yang sebagian disertai oleh stagnasi upah riil selama satu dekade. Disparitas dalam kekayaan dan pendapatan mencapai puncaknya yang dramatis. Kecenderungan ini tampaknya semakin menguat bahkan sampai pada keadaan di mana ketidaksetaraan yang khas-kelas menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi lebih lanjut, sehingga menimbulkan ancaman bagi stabilitas politik di negara-negara inti penganut globalisasi neoliberal itu sendiri. Di Selatan Global, konflik kelas sering didasarkan pada hubungan ekonomi yang heterogen dan informal yang mencakup pluralitas mode produksi perkotaan dan pedesaan (yang untuk sebagian hidup berdampingan). Selain itu, kecenderungan deindustrialisasi saat ini telah mencapai negara-negara di Utara Global juga. Karena itu, kita harus bertanya:

- Bagaimana kelas-kelas terbentuk dengan latar belakang globalisasi dan krisisnya? Peran apa yang dimainkan oleh negara-bangsa? Bisakah kita merujuk kepada sesuatu seperti kelas transnasional?
- Perjuangan mana yang benar-benar dapat dipahami sebagai “perjuangan kelas,” dan mana yang tidak bisa? Apakah ada persamaan atau koneksi global antara perjuangan ini?

- Memperhatikan soal hubungan ekonomi informal, bagaimana kita bisa menggambarkan kelas dan konflik kelas di Selatan Global?

Krisis ekologis

Penyebab dan upaya untuk menangani krisis ekologis global berkaitan erat dengan hubungan kelas dan logika akumulasi modal. Dorongan terus-menerus ke arah capaian pertumbuhan ekonomi dan produktivitas tidak memperdulikan landasan ekologis dan batas-batas biosferiknya. Baik akses kepada sumber daya alam maupun distribusi risiko dan beban ekologis diperebutkan secara spesifik atas dasar kelas. Kaum miskin di seluruh dunia—namun khususnya di Selatan Global—menanggung beban utama dari friksi ekologis. Konflik ekologi-sosial ini pasti akan meningkat di kemudian hari. Teori kelas kontemporer akan cenderung secara sistematis membahas hal-hal berikut ini:

- Apa dampak distorsi ekologis pada perjuangan kelas?
- Bagaimanakah beban ekologis berpengaruh pada kelas-kelas yang berbeda?
- Kelas (fraksi) manakah yang dapat diyakinkan akan [perlunya] suatu transformasi ekologis-sosial?
- Kepentingan kelas manakah yang menghalangi suatu transformasi seperti itu?

› Seruan untuk pertukaran

Jelas, ada lebih banyak permasalahan yang harus ditanggapi dan tidak semua yang disebutkan di atas berkaitan dengan masing-masing konteks nasional. Hal-hal tersebut menggambarkan kecenderungan-kecenderungan yang membentuk kapitalisme dunia saat ini. Oleh karena itu, kami ingin menyerukan suatu pertukaran global—suatu dialog global—tentang isu-isu ini dalam rangka untuk (lebih lanjut) memodelkan teori kelas yang mempertimbangkan bentuk-bentuk spesifik dari masing-masing masyarakat sementara juga mengungkapkan kecenderungan-kecenderungan umum pada skala global. Kami menantikan pertanyaan, kerja sama, dan pertukaran apa pun. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada <projekt.klassenanalyse@uni-jena.de>

› Kelas dan Kepentingan Kelas Di Amerika Latin

oleh **Pablo Pérez**, Pusat Studi Konflik Sosial dan Kohesi dan Universidad Alberto Hurtado, Chile dan **Rodolfo Elbert**, CONICET dan Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universitas Buenos Aires, Argentina dan anggota Komite Penelitian ISA tentang Pergerakan Tenaga Kerja (RC44)



Demonstrasi hari buruh 1 Mei di Santiago, Chile, 2018.
Foto: Pablo Pérez.

Dalam beberapa dekade terakhir para ilmuwan Amerika Latin telah berkali-kali mencoba untuk mengubur konsep kelas. Meskipun ada beberapa perbedaan, sejak 1980-an para ilmuwan berpendapat bahwa kebijakan neoliberal telah melemahkan kelas pekerja sedemikian rupa sehingga tidak lagi mempengaruhi dinamika konflik sosial dan politik dalam masyarakat Amerika Latin. Namun, dalam dekade terakhir, para pekerja telah mengabaikan ajakan untuk meninggalkan [konsep] kelas pekerja. Dengan berorganisasi di seputar isu-isu yang terkait dengan pekerjaan, merevitalisasi kegiatan serikat, dan menuntut distribusi pendapatan yang lebih adil dengan beraliansi dengan gerakan populer lainnya, para pekerja Amerika Latin

di negara-negara tertentu dengan keras kepala bersikukuh bahwa kelas masih terus merupakan suatu faktor untuk menjelaskan konflik dan politik di wilayah tersebut

Sejak awal 2000-an konsep kelas memang telah diperkenalkan kembali ke dalam agenda sosiologis melalui analisis kuantitatif terhadap ketidaksetaraan sosial ekonomi (yaitu studi mobilitas kelas) dan studi kualitatif terhadap aksi kolektif pekerja. Pekerjaan kami adalah bagian dari agenda yang lebih luas tersebut, yakni dengan fokus pada kelas sebagai mekanisme obyektif yang memunculkan hasil subjektif, terutama identitas dan kepentingan yang berlawanan. Penelitian terbaru kami yang berdasarkan data dari Program Survei Sosial Internasional menunjukkan bahwa 9 dari 10 individu di Argentina dan Chile mengidentifikasi diri mereka dengan kelas sosial tertentu. Konsep yang dianggap ketinggalan zaman itu ternyata masih relevan! Di kedua negara, individu dengan posisi kelas pekerja lebih cenderung melihat diri mereka sebagai seorang pekerja, daripada mereka yang memiliki posisi kelas ekonomi yang lebih baik. Kami [juga] menemukan bahwa di Chile, secara menyeluruh tingkat identifikasi dengan kelas pekerja lebih tinggi daripada di Argentina. Hasil tersebut kami jelaskan dengan melihat pada ketidaksetaraan yang lebih tinggi dan konsentrasi ekonomi yang lebih terpusat, serta sejarah konfigurasi partai-serikat yang “radikal” di Chile, apabila dibandingkan dengan dimasukkannya tenaga kerja sebagai bagian dari negara korporatis (*state-corporatist*) di Argentina.

Kami berpendapat bahwa jenis penelitian seperti ini dapat berkontribusi pada pemahaman mengenai konflik sosial dan politik di suatu wilayah yang ketidaksetaraannya paling tinggi di dunia. Kelas tidak hanya terdapat dalam struktur sosial dan identitas orang Amerika Latin: kelas juga dapat diamati sebagai pembentuk minat sosiopolitik seseorang. Individu dari kelas sosial yang berbeda berpikir tentang dunia dalam kerangka kelas pula (mungkin lebih sering daripada apa yang dapat diterima oleh para ilmuwan), dan sering berpartisipasi dalam tindakan politik untuk mempertahankan kepentingan kelas mereka—mulai dari menandatangani petisi daring dan memberikan suara, atau bergabung dengan serikat atau partai. Berdasarkan hal tersebut, proyek baru kami berfokus pada hubungan antara struktur kelas, tindakan kolektif, dan kepentingan kelas. Kami mengikuti karya Erik Olin Wright, yang mendefinisikan kesadaran kelas sebagai aspek-aspek kesadaran yang memiliki konten kelas dan efek yang berkaitan dengan kelas. Dia berargumen bahwa, pada analisis tingkat mikro, persepsi subjektif dari kepentingan kelas adalah salah satu aspek utama dari kesadaran kelas. Dengan memanfaatkan kerangka kerja Wright yang diilhami oleh Marx, kami mempelajari kepentingan kelas dengan melihat pada cara orang-orang dari kelas yang berbeda secara subjektif mengevaluasi institusi kapitalis dan dinamika kelas sosial.

Literatur mutakhir menunjukkan bahwa orang-orang dari kelas pekerja lebih cenderung memiliki sikap kritis terhadap kapitalisme dan ketidaksetaraan, memiliki pandangan tentang kelas yang menentang, dan mendukung kebijakan redistributif daripada, katakalah, pengusaha atau manajer. Hasil awal penelitian kami konsisten dengan literatur tersebut: dengan mengabaikan perbedaan negara, orang Amerika Latin yang berasal dari kelas pekerja atau wiraswasta-informal memiliki sikap yang lebih kritis terhadap lembaga-lembaga, gagasan-gagasan, atau capaian-capaian neoliberal (misalnya, mereka lebih cenderung mengkritik kesenjangan pendapatan atau tidak adanya intervensi pemerintah) daripada responden yang berasal dari kelas yang diistimewakan (misalnya, para manajer ahli).

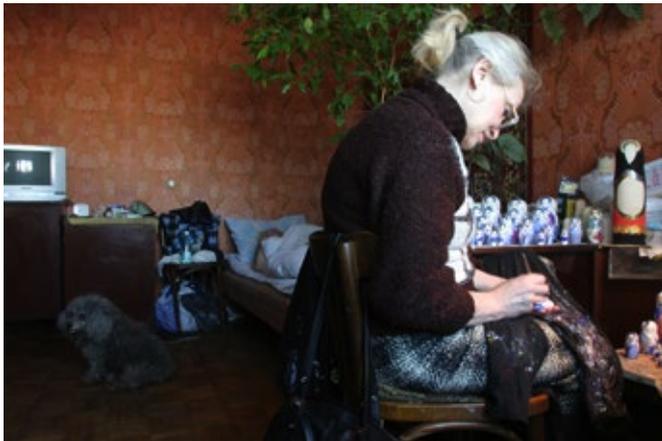
Pekerjaan kami saat ini berupaya memperluas temuan-temuan ini melalui studi tentang bagaimana aksi kolektif adalah sebuah mekanisme yang dapat memperkuat pemahaman orang tentang kepentingan material yang dibentuk oleh asal kelas mereka. Dengan demikian kami bertujuan untuk berkontribusi pada analisis yang kurang diteliti dari hubungan kausal antara kelas, aksi kolektif, dan kesadaran kelas. Kami berhipotesis bahwa di negara-negara yang baru mengalami mobilisasi radikal populer—yaitu negara-negara di mana kelas pekerja dan sektor populer telah menjadi aktor utama yang mendukung bangkitnya gerakan kiri—dampak asal kelas dan partisipasi dalam aksi kolektif terhadap kepentingan lebih kuat daripada di negara-negara dengan tingkat benturan politik yang rendah, atau di mana orang-orang dari kelas pekerja terus dikucilkan dari mobilisasi politik.

Kami percaya bahwa ada baiknya untuk mengembangkan investigasi ini, bukan karena kelas adalah satu-satunya sumber aktivisme politik di wilayah ini, tetapi karena kami berpikir bahwa kemungkinan proyek politik emansipasi di Amerika Latin ditentukan oleh keterlibatan politik dari kelas pekerja. Jenis aktivisme ini tentunya harus berjalan seiring dengan mobilisasi terhadap sumber-sumber penindasan lainnya (dan persimpangan di antara mereka), seperti protes besar-besaran perempuan dan pemogokan terhadap *femicidios* dan untuk legalisasi aborsi di Argentina dan Chile; atau gerakan #EleNão yang lebih baru di Brasil, di mana perempuan dan kelompok-kelompok yang rasnya tertindas memimpin dalam perjuangan melawan pertumbuhan ekstrem kanan. Dalam konteks historis, di mana kaum kanan berkuasa kembali, hanya kelas pekerja yang telah diberdayakan untuk membela kepentingan kelasnya dengan beraliansi dengan kelompok-kelompok tertindas lainnya akan dapat membangun gerakan sayap kiri yang cukup kuat untuk menghentikan neo-fasisme. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Pablo Pérez <pperez@uahurtado.cl> dan Rodolfo Elbert <elbert.rodolfo@gmail.com>

› Kemiskinan dan Eksklusi Sosial Di Rusia Pascasosialis

oleh **Svetlana Yaroshenko**, St. Petersburg State University, Rusia



*Bekerja di rumah.
Foto: Solmaz Guseynova.*

Saya mulai meneliti kemiskinan di Rusia pada awal tahun 1990-an, ketika reformasi pasar liberal diimplementasikan. Kemiskinan dianggap sebagai harga dari transformasi kemasyarakatan yang radikal selama transisi dari sistem distributif Soviet menjadi sistem kapitalis. Diasumsikan bahwa pengenalan pasar akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan mendorong kondisi rakyat untuk mengejar kemakmuran dan membebaskan diri mereka dari bantuan negara.

Bertolak belakang dengan prakiraan optimis, dan meskipun terjadi stabilitas ekonomi di tahun 2000-an, kemiskinan di Rusia tetap bertahan. Berdasarkan berbagai perkiraan, antara 11% dan 25% penduduk Rusia dapat teridentifikasi miskin. Rendahnya angka kemiskinan resmi, sekitar 13% pada tahun 2017, merupakan produk dari metode kikir yang digunakan untuk menghitung kemiskinan dan biaya hidup minimal, sementara tingkat pengangguran yang rendah diperoleh dengan memperluas pekerjaan informal dan bergaji rendah. Percepatan perluasan kota-kota utama Rusia dicapai melalui migrasi internal, imigrasi para pekerja dari negara bekas republik Soviet, dan kemiskinan di wilayah non-metropolitan. Namun para ahli pemerintah mengakui bahwa hanya 40% di antara orang Rusia dapat memanfaatkan keuntungan ekonomi pasar. Ini merupakan persentase yang sama dengan orang Rusia yang pendapatannya telah meningkat selama dua puluh tahun terakhir, sementara pendapatan dari 60% orang Rusia lainnya tetap sama atau malah sangat menyusut. Kemiskinan tetap bertahan di ka-

langan orang-orang yang memiliki pekerjaan dan keluarga yang memiliki anak. Koefisien Gini Rusia telah membuktikan adanya pertumbuhan ketimpangan sosial, yang naik dari 0,26 pada tahun 1991 menjadi 0,421 pada tahun 2010.

Para rekan saya di Pusat Sains Komi dan saya melakukan penelitian kualitatif longitudinal terhadap orang-orang miskin yang terdaftar dan melakukan survei terhadap penduduk perkotaan di wilayah Utara Rusia pada tahun 2000-an. Kami menemukan bahwa eksklusi sosial meluas. Kelas, gender, dan reaksi defensif terhadap ekonomi pasar berkontribusi terhadap bertahannya kemiskinan dan bentuk-bentuk khasnya. Eksklusi sosial telah menjadi terinstitusionalisasi.

Sektor pekerjaan berubah rendah meluas. Restrukturisasi pertama terhadap lapangan kerja, pada tahun 1990-an, menyebabkan pemutusan hubungan kerja pada industri berat dan perluasan perdagangan sektor ritel dan jasa. Pekerjaan-pekerjaan baru ini umumnya berubah lebih rendah dan memberikan tunjangan minimal. Sebagai konsekuensi, pada tahun 2000-an, sektor publik dioptimalkan, dan akses terhadap pelayanan sosial, termasuk pelayanan-pelayanan yang bukan berupa pasar seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan, dikurangi. Ketika deindustrialisasi terjadi dan, kemudian, pelayanan ekonomi yang berorientasi pasar berjalan dengan cepat, muncul sebuah diskusi mengenai sektor mana yang paling menderita akibat reformasi pasar dan, karenanya, siapa yang paling miskin—para pekerja kerah biru ataukah pekerja sektor publik. Kami menemukan bahwa pekerja kerah biru bukan hanya yang pertama mengalami efek negatif dari reformasi pasar tapi juga merupakan segmen terbesar di antara orang-orang yang sangat miskin.

Lebih jauh, orang Rusia yang paling tereksklusi secara sosial—yaitu orang-orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem selama periode yang panjang—dipekerjakan di sektor-sektor pinggirannya pasar kerja. Pasar juga berdampak pada gender: kami menemukan bahwa kemiskinan tidak hanya sangat terfeminisasi, kaum laki-laki pun mengalami lumpenisasi (*lumpenization*) yang

meluas. Dalam setengah kasus kami, pendapatan yang diperoleh orang-orang terlalu rendah untuk dapat menopang siapa pun selain diri mereka sendiri.

Kalau pada awal tahun 2000-an, semakin rendah status sosial seseorang, semakin besar peluang bahwa mereka akan terjerumus ke dalam kemiskinan, maka sepuluh tahun kemudian, gender tidak lagi bergantung pada kelas sosial: ibu tunggal dari beragam kelas sosial lebih berpeluang menderita kesulitan ekonomi. Dengan kata lain, penurunan tunjangan sosial yang sebelumnya dinikmati oleh para pekerja upahan yang berlangsung sebenarnya di dalam [sistem] sosialisme yang ada tidak diimbangi dengan meningkatnya peluang dalam ekonomi pasar yang muncul. Tekanan pada hambatan-hambatan struktural telah meningkat: [faktor] kelas dan gender telah bekerja secara paralel.

Sementara hubungan pasar meluas ke lapangan kerja (produksi dan reproduksi), kebijakan sosial berubah secara radikal. Di tengah kepercayaan pada pasar bebas, kritik tegas terhadap sosialisme yang sebenarnya ada, dan retorika yang tersebar luas tentang perlunya pembebasan dari paternalisme Soviet (sistem Soviet yang "tidak efektif" dan "totaliter" yang telah membentuk budaya ketergantungan pada negara), terdapat pengurangan nyata pada kewajiban negara untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan dasar. Sejak tahun 1991, metode untuk menghitung biaya hidup minimum di Rusia telah diamandemen sebanyak tiga kali dan menjadi lebih ketat, dan penentuan upah minimum telah diputuskan tidak lagi berkorelasi dengan ukuran minimum yang aktual untuk kondisi keuangan yang aman.¹

Sementara itu, prinsip berbasis tenaga kerja berupa pemberian akses terhadap *common goods* [barang/kebutuhan yang disediakan bagi publik] dipertahankan sebagai suatu kriteria kebijakan sosial utama, seperti yang dibuktikan oleh korelasi antara upah minimum, pensiun, dan tunjangan pengasuhan anak dengan biaya hidup minimum.² Namun, tempat kerja tidak lagi merupakan pusat alokasi tunjangan. Hal ini telah tergantikan oleh rumah tangga. Akses untuk memperoleh tunjangan pengasuhan anak, subsidi rumah, dan bantuan sosial yang ditargetkan sekarang ditentukan dengan menilai pendapatan rumah tangga. Kebijakan sosial diterapkan secara selektif, sesuai dengan pendapatan penerima tunjangan dan kesediaannya untuk memenuhi persyaratan tertentu.

Sebagai konsekuensinya, kemiskinan telah distigmatisasi: telah berubah dari sebagai bagian dari kehidupan dan fenomena sementara, seperti di masa Soviet, menjadi suatu masalah tetap yang menyeluruh. Lebih jauh, pemberian bantuan sosial diatur sedemikian rupa sehingga orang-orang yang paling membutuhkan diabaikan. Di antara orang-orang miskin yang terdaftar, sepertiga merupakan orang yang sangat miskin, dua pertiga adalah orang yang bekerja, dan dua pertiga merupakan keluarga dengan kepala keluarga perempuan. Dengan demikian, bantuan sosial yang ditargetkan mengkompensasi upah yang rendah. Hal ini bukan lagi merupakan jaminan terhadap risiko pengangguran dan kemiskinan.

Ideologi tentang tanggung jawab individu mengharuskan orang yang sangat miskin untuk memobilisasi semua sumber

daya yang mereka miliki dan melakukan upaya yang luar biasa untuk menghindari kemiskinan dan eksklusi sosial. Mereka menggunakan sumber daya yang dikumpulkan pada masa lalu untuk mengimbangi efek dari sistem ketenagakerjaan yang telah mengalami restrukturisasi, runtuhnya sistem distribusi sosialis di masa lampau, dan implementasi proyek pasar yang paling liberal di sebuah negara bekas negara sosialis. Pekerja dipaksa untuk bermigrasi untuk mencari pekerjaan, dan menerima pekerjaan-pekerjaan kedua dan paruh waktu. Perempuan di sektor jasa berjuang di seputar permasalahan gender, sebagai pekerja, dan sebagai pengasuh utama dalam konteks perawatan sosial yang diswastakan. Pensiun digunakan untuk melengkapi upah rendah: sekitar sepertiga responden kami yang bekerja adalah pensiunan yang bekerja.

Saat ini kami melihat pusaran yang meluas manakala para profesional seperti dokter dan dosen universitas menjadi subyek ketidakstabilan ekonomi. Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Tatiana Lytkina di bagian Republik Komi yang mengalami tekanan [ekonomi], kemiskinan melebar keluar dalam bentuk lingkaran konsentris, yang akhirnya menjangkau seluruh penghuni kota. Jelas bahwa kesempatan dan keuntungan yang dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu di kota-kota besar dipasok oleh pasar hanya karena mereka menggusur banyak orang lain ke pinggiran masyarakat.

Sementara itu, reformasi pensiun yang baru-baru ini diusulkan negara, termasuk peningkatan usia pensiun, menjadi arena bagi kelompok-kelompok yang berbeda untuk berkompetisi mencari perhatian, daripada sebagai forum untuk mendiskusikan prospek negara dan kebutuhan rakyat jelata Rusia. Seperti pada tahun 1990-an, orang muda Rusia turun ke jalan-jalan kota untuk melakukan protes, menuntut masa depan yang lebih baik bagi generasi mereka.

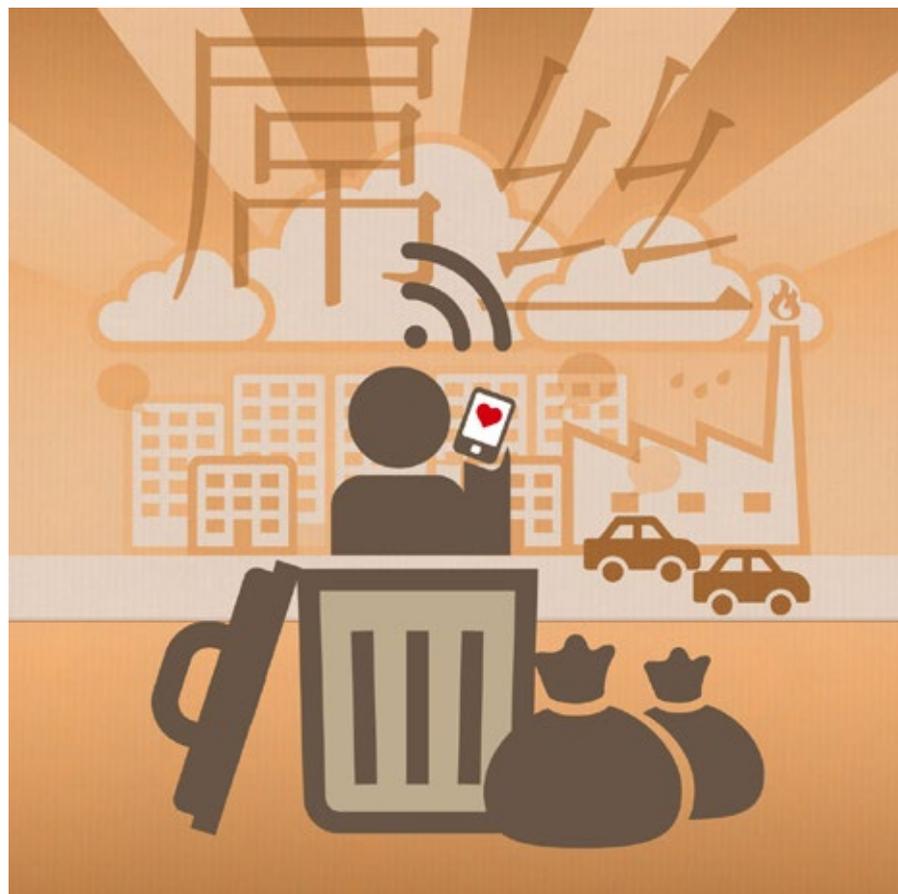
Esai ini merujuk pada artikel-artikel berikut: Svetlana Yaroshenko (2017), "Lishnie liudi, ili O rezhime isklucheniia v postsovetskom obshchestve" [Orang-orang yang tidak berguna atau rezim eksklusi sosial paska-Soviet Rusia], *Ekonomicheskaiia sotsiologiia* 18 (4): 60–90; Tatiana Lytkina and Svetlana Yaroshenko (akan terbit), "Vozmonaia li sotsiologiia dlia trudiashchikhksia klassov v Rossii" [Apakah sosiologi kerah-biru dimungkinkan di Rusia?], *Mir Rossii*. ■

1. Upah minimum baru dipatok berdasarkan biaya hidup sejak tanggal 1 Mei 2018.
2. Pada tahun 2010, biaya hidup minimum bagi seseorang di Russia adalah 5,685 Rubel. Upah minimum [waktu itu] adalah 4,330 Rubel per bulan. Pembayaran tunjangan bulanan ketunakaryaan adalah 850 Rubel, sedangkan pembayaran maksimum adalah 4,900 rubel. Minimum pembayaran pensiun usia lanjut adalah 6,177 Rubel tiap bulan, sedangkan mahasiswa yang memperoleh beasiswa universitas menerima tunjangan bulanan sebesar 1,340 Rubel. Pembayaran tunjangan minimum pengasuhan anak adalah 2,020 Rubel tiap bulan, sedangkan rata-rata upah bulanan adalah 20,952 Rubel.

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Svetlana Yaroshenko <s.yaroshenko@spbu.ru>

› Lumpenproletariat dan Subaltern Perkotaan di Tiongkok

oleh **Ngai-Ling Sum**, Universitas Lancaster, Inggris Raya



| Ilustrasi oleh Arbu.

Marx dan Engels menggunakan istilah *Lumpenproletariat* utamanya dengan cara yang deskriptif, peyoratif, dan retorik. Istilah “*underclass*” menempati tempat yang sama dalam wacana ekonomi dan politik belakangan ini, sementara “*prekariat*” (*precariat*) memiliki konotasi yang lebih positif. Tulisan ini menggunakan gagasan Gramsci tentang kelas-kelas “subaltern” atau “subordinat,” yang bertujuan untuk menangkap sifat multidimensi dari eksploitasi, penindasan, dan marginalitas dari beragam kelompok-kelompok subordinasi serta kurangnya otonomi relatif mereka dari hegemoni kelompok-kelompok sosial yang dominan. Studi kasus saya mempertimbangkan bagaimana pengalaman hidup dengan kemiskinan dan ketidaksetaraan dari strata spesifik masyarakat miskin perkotaan di Tiongkok sejak krisis keuangan tahun 2008 telah tercermin dalam pembentukan identitas baru—*diaosi*—yang menggunakan media sosial untuk menciptakan

narasi-narasi pribadi dan sebuah subkultur yang membalikkan nilai-nilai dan norma-norma yang hegemonik dengan cara yang mengejek diri sendiri.

› Identitas subaltern diaosi (pecundang) di Tiongkok

Krisis keuangan tahun 2008 memperburuk kondisi *underclass* perkotaan, pada awalnya karena meningkatnya pengangguran, dan kemudian karena efek mega-proyek perkotaan yang berbasis hutang dan ledakan real estat yang dipicu oleh program stimulus pemerintah yang masif. Ledakan properti yang dipicu utang menyebabkan kenaikan harga perumahan, sewa perumahan, dan kota-kota hantu; para pekerja migran yang rawan (*precarious*) semakin menanggung jam kerja yang panjang dengan upah rendah tanpa hak atas tempat tinggal di kota dan tunjangan kesejahteraan terkait.

Mereka yang tidak memiliki akomodasi asrama yang disediakan pabrik harus membayar sewa yang lebih tinggi untuk akomodasi sub-standar di pinggiran kota, atau tinggal di ruang-ruang terbatas (misalnya, balkon, atap, kontainer, atau bunker bawah tanah) di pusat-pusat perkotaan. Di Beijing pada tahun 2014, misalnya, hampir satu juta migran menyewa kamar kecil bersama seharga sekitar USD 65 per bulan di tempat-tempat berlindung dari serangan udara di bawah tanah dan ruang penyimpanan tanpa cahaya alami dan dengan toilet dan dapur umum. Mereka terdiri dari pekerja sektor jasa yang bergaji rendah, seperti pelayan, penata rambut, petugas kebersihan, asisten toko, pedagang jalanan, koki, satuan pengamanan, dan pekerja konstruksi. Kelompok subaltern ini dijuluki “suku tikus” yang ditunjukkan C.Y. Sim dalam videonya pada tahun 2015: <http://creativetimereports.org/2015/01/24/sim-chi-yin-rat-tribe-beijing-underground-apartments/>.

Sejak akhir tahun 2011, banyak pekerja migran muda di pabrik-pabrik yang sungguh-sungguh ataupun yang digital, yang juga sangat terlibat dalam budaya pop Internet dan media sosial, menanggapi perasaan ketidaksetaraan dan ketidakadilan mereka dengan menceritakan marginalitas dan subalternitas mereka melalui suatu identitas baru. Posisi subjek *diaosi*—secara harfiah adalah para penggemar seorang pesepakbola selebriti—muncul dalam pertarungan daring antara penggemar-penggemar saingan. Identitas ini kemudian diinterpretasikan kembali dengan cara mengejek diri sendiri sebagai “penggemar penis,” sebuah homonim yang dekat. Transposisi ini segera menyebar di media sosial. Dua bulan setelah diciptakan, identitas tersebut telah meraih 41,1 juta pencarian Google dan 2,2 juta unggahan blog di Weibo, situs di Tiongkok yang mirip Twitter. Para subaltern muda mulai menyatakan diri mereka sebagai *diaosi* dan segala macam jenis ruang-ruang obrolan daring dan media sosial terkait telah tersedia (misalnya obrolan daring YY dan QQ).

Makna-makna baru ditambahkan ketika wacana dan identitas beredar di media sosial. Hal ini memekatkan perasaan pekerja migran tentang ketidaksetaraan, marginalitas, pengucilan, kesulitan ekonomi, frustrasi, dan kepedihan sosial serta keinginan-keinginan konsumen dan romantis yang tidak terpenuhi. Mereka menggambarkan diri mereka sebagai yang berlatar belakang yang kurang mampu, memperoleh upah yang amat kecil, konsumsi yang sedikit, dan kurang koneksi sosial. Penghasilan, konsumsi, dan kapasitas pinjaman yang sangat kurang serta status sosial yang rendah secara sosial-emosional ditambah dengan suatu perasaan menjalani kehidupan yang terdevaluasi: jam kerja yang panjang, perumahan yang buruk, prospek karier yang tidak menentu, kehilangan kehidupan rumah, rasa bersalah terhadap orang tua di rumah, dan

kehidupan emosional dan romantis yang hampa. Ini sering disorot dalam narasi-narasi *diaosi* tentang bagaimana mereka menghabiskan Hari Valentine, Natal, musim-musim perayaan, dan waktu-waktu terbatas di malam hari untuk mencari teman Internet. Wacana afektif dari kaum pinggiran tersebut mengungkapkan pengalaman sosial kolektif yang didasarkan pada ketidaksetaraan yang dihasilkan dalam kehidupan ekonomi dan sosial perkotaan sehari-hari.

Keberadaan sehari-hari dari subalternitas *diaosi* ini juga diekspresikan melalui suatu biopolitik biner yang menggambarkan dua tipe utama tubuh menurut gender yang didasarkan pada akses mereka yang tidak setara terhadap pendapatan, kesempatan konsumsi, jaringan kekuasaan, cinta, romansa, dan keintiman. Para *diaosi* laki-laki menela diri sendiri sebagai pecundang yang “miskin, pendek, dan jelek.” Dengan penghasilan yang amat sedikit dan fisik yang tidak menarik, mereka mengkonstruksikan diri mereka sendiri sebagai orang tidak mampu membuat perempuan-perempuan terkesan dengan cara menghujani mereka hadiah materi dan/atau memikat mereka. Mereka “tidak punya rumah, tidak punya mobil, dan tidak punya pengantin/pacar” dan menghabiskan sebagian besar waktu di kediaman mereka, menggunakan telepon seluler murah, berselancar di Internet, dan bermain permainan daring seperti DOTA. Konstruksi ini secara bertahap menyebar ke subaltern perempuan. Lalu ada *gaofushuai*. Anggota-anggota kelompok superior ini adalah (1) “tinggi, kaya, dan tampan”; dan (2) para “princeling” [keturunan pejabat tinggi partai komunis di Tiongkok] dengan koneksi partai dan negara yang khusus yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan keistimewaan dalam pekerjaan dan akses. Mereka menikmati “tiga harta” (iPhone, mobil sport, dan arloji disainer) dan dapat menarik perhatian perempuan-perempuan cantik. Kelompok biner ini merupakan campuran dari kritik laten, cemoohan terhadap diri sendiri, perlindungan diri, dan hiburan diri. Ini adalah cara sehari-hari untuk memprotes dan menghilangkan rasa tidak aman di negara-kapitalis Tiongkok. Kesenjangan yang dihasilkan antara dua kelompok yang dibayangkan ini selanjutnya disorot secara daring melalui kartun satir, foto-foto, acara-acara TV, pembicaraan fantasi, dll. Kedua kelompok memiliki mode transportasi yang berbeda (bis vs BMW), telepon pintar (Nokia vs iPhone), tempat makan (toko pinggir jalan vs restoran mahal), dan pertemuan romantis. Singkatnya, narasi-narasi *diaosi* mencerminkan ejekan diri sendiri terhadap nasib tanpa masa depan atau harapan; kekosongan emosional dalam kehidupan romantis; permusuhan laten terhadap elitisme sosial yang dijelmakan oleh para *princeling*; dan keputusan karena tidak diterima dalam masyarakat yang tidak setara. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Ngai-Ling Sum
<n.sum@lancaster.ac.uk>

› Pembentukan Kelas Dan Kapitalisme Agraria

oleh **Tania Murray Li**, Universitas Toronto, Kanada



| Sebuah desa yang dikelilingi perkebunan kelapa sawit. Foto: Tania Li.

Siapa menguasai apa? Siapa mengerjakan apa? Siapa memperoleh apa? Apa yang mereka perbuat dengan surplus? Keempat pertanyaan ini, yang secara padat diajukan oleh ilmuwan agraria Henry Bernstein, menawarkan titik tolak yang bermanfaat untuk menganalisis pembentukan kelas pedesaan. Pertanyaan-pertanyaan ini berjalan dengan baik khususnya di tempat-tempat di mana kepemilikan atas tanah pertanian dan kemampuan untuk menginvestasikan surplus pada pertanian yang kian meningkat skala dan efisiensinya menjadi penentu petani mana yang dapat melanjutkan usaha taninya dan melakukan akumulasi, serta mana yang tersingkir dari tanahnya. Saya meneliti tempat semacam itu di sudut-sudut perdesaan Indonesia di mana saya melacak pembentukan kelas-kelas pedesaan yang berlangsung cepat setelah para petani asli dataran tinggi mulai mengklaim petak-petak tanah individualnya dari tanah yang semula milik bersama untuk ditanami kakao. Sejak itu dan seterusnya, mereka tidak punya lagi pilihan untuk berbalik ke produksi subsistensi karena tanah-tanah sempit yang tersisa tidak dapat lagi menghasilkan cukup pangan untuk keluarga dan memenuhi kebutuhan tunai untuk sandang, biaya sekolah,

dan sebagainya. Oleh karena itu, mereka dituntut untuk kian mengintensifkan produksi komoditas berorientasi pasar ini dan berharap dapat memperoleh cukup uang untuk menutupi kebutuhan keluarga serta untuk menjaga lahan pertaniannya tetap produktif. Mereka yang gagal, kehilangan tanahnya. Ini adalah tipikal kasus dalam buku teks mengenai apa yang terjadi ketika pertanian rumah tangga menjadi tidak ubahnya perusahaan kecil: diatur oleh relasi-relasi kapitalis, mereka rentan untuk kehilangan segalanya jika tidak mampu untuk berinvestasi demi menjaga usahanya tetap kompetitif; dan mereka juga tidak dapat mempertahankan usahanya sebagaimana adanya, karena tidak memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok.

Proses pembentukan kelas agraria yang telah saya uraikan semakin dimodifikasi oleh sejumlah faktor lain. Faktor yang terpenting adalah bantuan pemerintah dan remitansi. Sebuah keluarga petani yang menerima bantuan tunai dari pemerintah seperti “*Bolsa Familia*” di Brasil, atau remitansi dari anggota keluarga yang bekerja di tempat lain memiliki satu penopang yang melindungi mereka dari kehilangan tanahnya ketika mengalami masa-masa sulit (misalnya, ketika harga produk

pertanian rendah, terjerat hutang, gagal panen, jatuh sakit atau kondisi darurat keluarga). Remitansi bisa digunakan untuk membeli tanah, untuk usaha peminjaman uang, atau untuk investasi di bidang pendidikan. Remitansi juga bisa digunakan untuk membangun rumah megah ataupun menyelenggarakan pesta perkawinan mewah yang sepertinya merupakan pemborosan keuangan belaka namun berfungsi membangun jaringan sosial keluarga dan meningkatkan akses pada sumber daya produktif (seperti kontrak, pinjaman uang, informasi dan subsidi). Kita dapat menyaksikan “rumah-rumah hasil remitansi” dan tanda-tanda lain dari transformasi peran tanah, tenaga kerja, dan modal di seluruh perdesaan Asia, Afrika dan Amerika Latin dewasa ini. Pada titik ini, empat pertanyaan yang disebutkan di atas (siapa menguasai apa, siapa mengerjakan apa, siapa memperoleh apa, dan apa yang mereka perbuat terhadap surplus) masih dapat membantu untuk menganalisis pembentukan kelas perdesaan, namun keempatnya harus ditafsirkan secara lebih luas untuk menjangkau rentang relasi-relasi di luar pertanian (*off-farm relations*) yang lebih luas.

Dengan beranjak naik dari skala pertanian kecil atau berbasis rumah tangga kepada kontrol atas hamparan tanah yang luas, analisis kelas juga dibikin lebih kompleks oleh kekuasaan-kekuasaan non-pasar yang menentukan “siapa menguasai apa” dan “siapa memperoleh apa” di wilayah perdesaan. Di Filipina, sebagaimana halnya di banyak tempat di Amerika Latin, para tuan tanah besar yang memperoleh tanahnya pada masa penjajahan Spanyol mendominasi kehidupan politik dan mereka menetapkan aturan-aturan sehingga mereka dapat mempertahankan tanahnya terlepas dari soal apakah tanah itu produktif atau tidak. Di Indonesia dan di belahan Asia Tenggara lain di mana tidak ada sejarah penguasaan tanah skala luas warisan kolonial, para politisi dan pejabat pemerintah memakai kekuasaan resmi dan tak resmi dari jabatan mereka untuk memperoleh akses pada tanah dalam jumlah besar. Di tempat-tempat ini, bukanlah tanah yang menghasilkan jabatan politik melainkan jabatan politik yang menghasilkan tanah. Mengingat tanah bisa dijadikan obyek spekulasi, atau diputar untuk memperoleh keuntungan, maka menjadi “tuan tanah” tidak secara niscaya memiliki hubungan dengan kapitalisme atau pertanian.

Memahami karakter kelas dari pertanian dan perkebunan skala luas menjadi hal yang mendesak saat ini karena bentuk produksi ini mengalami ekspansi secara besar-besaran. Di Indonesia, misalnya, lahan perkebunan sawit mencapai 10 juta ha dan pemerintah ingin memperluasnya hingga menjadi 20 juta ha. Di Laos dan Kamboja, perkebunan karetlah yang menghabiskan lahan dalam jumlah yang terus bertambah. Di Brasil dan negara-negara sekitarnya, pertanian skala luas itu untuk produksi kedelai yang termekanisasi. Pertanian dan perkebunan skala luas itu, baik yang dikuasai oleh individu, perusahaan nasional atau multinasional, sering kali bukan “kapitalis” dalam pengertian buku teks, karena mereka tidak membayar berbagai input produksi menurut harga pasar. Mereka ini memperoleh subsidi besar melalui sewa tanah yang diklaim milik negara dengan biaya cuma-cuma atau dengan

harga murah, melalui infrastruktur yang disediakan negara, pemotongan pajak, dan kredit murah. Sering kali mereka juga mendapatkan buruh murah yang dengan baik disediakan melalui berbagai skema migrasi yang didukung negara. Pada kenyataannya, “investor” multi-nasional—yang sering dibayangkan sebagai model kapitalis—hanya bisa berinvestasi sangat sedikit atau bahkan tidak sama sekali, dan sepenuhnya bergantung pada input yang cuma-cuma atau disubsidi. Banyak perusahaan besar yang hanya bergantung pada berbagai skema kontrak pertanian atau produksi oleh pihak lain yang mengaburkan pertanyaan mengenai siapa yang sebenarnya memiliki apa dan siapa yang memperoleh porsi apa dari keuntungan yang beredar. Subsidi untuk pertanian besar sering dijustifikasi dengan argumen bahwa produsen skala besar akan menciptakan “pembangunan” dan lapangan kerja—yang sama sekali tidak memperhitungkan berbagai jenis lapangan kerja dan pembangunan yang justru mereka hilangkan, ataupun berbagai peluang paksaan dan pemerasan yang berjalan beriringan dengan posisi monopoli mereka.

Pejabat pemerintah dan politisi memperoleh keuntungan dari ekspansi usaha pertanian skala besar ini yang membuka aliran pendapatan bagi mereka, mulai dari ijin, biaya (*fee*), suap (*kickback*), dan pemerasan. Mereka sering duduk di dewan perusahaan. Bagaimanakah kita dapat menganalisis konfigurasi kelas dari campuran pribadi-negara-perusahaan semacam ini? Relasi-relasi kelas yang dapat kita amati antara modal dan buruh pada titik waktu produksi masih tetap penting, namun beragam skala dan relasi lainnya juga mesti ditelusuri pula. Modal global tidak hanya sampai di negara seperti Brazil dan Indonesia dengan sendirinya—perjalanannya juga dimungkinkan oleh berbagai macam koneksi, koalisi, hukum dan wacana. Beberapa istilah yang muncul di literatur menyoroti kenyataan berjalannya kelindannya kekuasaan negara dan non-negara dalam memfasilitasi investasi semacam ini, oleh sebab itu ada istilah “elit predator” atau “kapitalis kroni”. Hibrida semacam ini tidaklah unik terdapat pada pertanian atau Selatan Global semata. Banyak perusahaan besar sangat sering mendapatkan dukungan dari perlindungan politik dan monopoli yang dilisensi negara, dan meraup keuntungan sangat besar (*mega-profits*) dari kemampuannya untuk mencomot rente yang belum dibayarkan (*unearned rent*). Keempat pertanyaan di awal tulisan ini masih berguna sebagai panduan untuk menganalisis pembentukan formasi-formasi ini: kita masih tetap perlu mengetahui siapa menguasai apa, siapa melakukan apa, siapa memperoleh apa, dan apa yang mereka perbuat dengan surplus. Namun, sekali lagi, pertanyaan-pertanyaan ini perlu direntangkan lebih luas lagi agar mencakup bentuk-bentuk kepemilikan, pekerjaan, dan investasi yang beroperasi lintas skala. Semakin pembentukan kelas ini meluas dan berjalannya kelindan, maka semakin kabur bentuknya bagi para pekerja perkebunan, petani kontrak, atau petani mandiri kecil yang terperangkap dalam relasi-relasi ekstraktif yang bukan saja tidak dapat mereka identifikasi, tetapi juga lebih kecil kemungkinannya untuk dapat mereka lawan. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Tania Murray Li <tania.li@utoronto.ca>

› Hidup dengan (dan Menolak)

Reformasi Kesejahteraan di Inggris Raya

oleh **Ruth Patrick**, Universitas York, Inggris



| Hak cipta: Poverty 2 Solutions, 2017.

18

Selama 35 tahun terakhir, sistem jaminan sosial Inggris Raya telah menjadi subjek pasang-surutnya gelombang reformasi. Perubahan-perubahan diimplementasikan sebagai bagian dari upaya untuk mengakhiri apa yang sering digambarkan oleh para politisi sebagai “budaya ketergantungan terhadap kesejahteraan” (*welfare dependency*), dan suatu upaya yang lebih besar dikembangkan untuk menentukan persyaratan tunjangan kesejahteraan (*welfare conditionality*)—persyaratan (yang sebagian besar terkait dengan pekerjaan) untuk dapat menerima tunjangan (*benefit*). Perubahan signifikan terjadi selama pemerintahan Partai Buruh Baru (*New Labour*) dan setelahnya, di bawah kepemimpinan Partai Konservatif pasca-2010. Skala pemotongan dana tunjangan oleh negara sangatlah mengejutkan, dan konsekuensinya ekstrem. Beberapa angka berikut memberikan pencerahan.

Dibandingkan dengan tahun 2010, kelak pada 2021, jaminan sosial usia kerja akan berkurang [37 miliar pound sterling](#), terlepas dari kenaikan harga dan peningkatan

biaya hidup. Ini mencerminkan penurunan 25% dari total pengeluaran untuk tunjangan, dengan pemangkasan yang besar khususnya pada anggaran tunjangan bagi penyandang disabilitas, yang dirancang untuk menyokong sebagian di antara mereka yang paling rentan dalam masyarakat kita.

Tidaklah mengherankan bahwa dampak pemotongan tunjangan jaminan sosial ini terlihat dalam bentuk naiknya kemiskinan anak, meningkatnya jumlah fakir miskin, serta makin tumbuhnya ketergantungan di kalangan banyak keluarga termiskin di Inggris Raya kepada bank makanan. Lembaga Kajian Fiskal (*Institute for Fiscal Studies*) memperkirakan bahwa kemiskinan absolut anak akan meningkat dalam kisaran empat persen di antara kurun 2015-16 dan 2021-22, dengan menghubungkan tiga-perempat dari peningkatan ini (setara dengan 400.000 anak) dengan perubahan-perubahan tunjangan tersebut. Badan amal anti kemiskinan—Yayasan Joseph Rowntree (*the Joseph Rowntree Foundation*)—memperkirakan bahwa pada tahun 2017 terdapat lebih dari [1,5 juta](#) individu yang

»



Gambar fragmen dari film “All in this together. Are benefits ever a lifestyle choice?” disajikan oleh the Dole Animators (2013)

Hak cipta: Dole Animators.

dihadapkan pada kemiskinan, sementara penyedia bank makanan terbesar di Inggris Raya—Badan Amal Trussell (*The Trussell Trust*)—membagikan [1.332.952](#) paket pasokan makanan darurat untuk tiga hari kepada mereka yang membutuhkannya selama tahun krisis keuangan 2017-18.

Terlepas dari angka-angka ini, pemerintah Inggris Raya tetap bersikukuh untuk melaksanakan perubahan tunjangan dan tetap melakukan justifikasi serta mempertahankan paket reformasi kesejahteraan sosialnya. Hal ini berlanjut dengan pengenalan Kredit Universal (*Universal Credit*), suatu tunjangan yang dirancang untuk menyederhanakan sistem tunjangan dan meningkatkan insentif untuk bekerja, namun masih terkendala oleh rancangan dan implementasinya. Perdana Menteri Theresa May selalu berargumen bahwa “pekerjaan adalah jalan keluar terbaik dari kemiskinan,” meskipun telah terbukti bahwa dua pertiga individu yang miskin sekarang hidup dalam rumah tangga di mana salah seorang anggota keluarganya bekerja.

› **Pengalaman yang dijalani dengan reformasi kesejahteraan**

Dalam konteks ini, sangatlah penting untuk menggali pengalaman keseharian tentang perubahan tunjangan, dan untuk mendokumentasikan dampak reformasi kesejahteraan tersebut pada kehidupan mereka yang terdampak secara langsung. Hal inilah yang merupakan maksud dari “kajian realitas sehari-hari dari reformasi kesejahteraan” ([the everyday realities of welfare reform study](#)), yang melacak sejumlah kecil orang yang terkena imbas dari perubahan tunjangan di sebuah kota di bagian utara Inggris. Melalui serangkaian wawancara dengan para pencari kerja, orang tua tunggal, serta kaum difabel, telah dapat dilacak dampak reformasi kesejahteraan terhadap kehidupan individu dan bagaimana narasi politik yang mengatakan bahwa “reformasi kesejahteraan dibutuhkan, dan dapat terlaksana” sangat bertentangan dengan pengalaman kehidupan sehari-hari mereka yang terkena imbas langsung.

Bagi para subyek penelitian tersebut, perubahan berulang kali pada tunjangan mereka telah mencip-

takan iklim ketidakamanan sosial (*social insecurity*), dengan kekhawatiran dan kecemasan terus menerus mengenai dampak perubahan serta bagaimana individu dapat mengatasinya. Proses pengurusan mengajukan klaim tunjangan ini menimbulkan keresahan pula, khususnya proses penilaian kelayakan tunjangan bagi penyandang disabilitas yang merupakan sumber ketakutan dan ketidakpastian. Sharon menggambarkan perasaannya terhadap tunjangan disabilitasnya yang berulang kali dinilai kembali: “Hal tersebut menimbulkan banyak stres [pada diri saya] . . . Menjadikannya beban pikiran terus-menerus.”

Lebih jauh lagi, pengetatan persyaratan penerimaan tunjangan kesejahteraan (*welfare conditionality*) dirasakan sebagai hal yang sangat negatif, di mana ancaman sanksi dan hilangnya pendapatan merupakan suatu kemungkinan yang terus-menerus membayangi para penerima tunjangan dan membebani mereka dengan rasa ketakutan tentang bagaimana mereka dapat mengatasinya apabila sewaktu-waktu tunjangan mereka dibatalkan. Bahkan mereka yang selama ini telah memenuhi seluruh butir persyaratan yang ada pun khawatir pula, dan menolak bergabung dalam “layanan dukungan” Jobcentre Plus [kantor pusat tenaga kerja] karena takut ketentuan persyaratan mereka akan bertambah dan terdapatnya kemungkinan lebih besar untuk terkena sanksi.

Bukti-bukti tentang meningkatnya kemiskinan dan kesulitan hidup telah terungkap, di mana banyak peserta menjelaskan pilihan sangat sulit yang harus mereka putuskan (kadang-kadang setiap hari), seperti apakah [memilih] menjaga suhu ruangan ataukah makan, atau bagaimana orang tua terpaksa sedemikian sering mendahulukan anak-anaknya agar mereka mendapat apa yang mereka butuhkan. Sebagaimana disampaikan Chloe: “Kami miskin, sangat nestapa. Kami seolah-olah hidup seperti di—Anda tentu tahu kan iklan-iklan di jalanan ‘tolong beri makan anak-anak kami’—berikanlah makan pada anak-anak kami.”

Penelitian menunjukkan pula bagaimana orang menerima stigma tunjangan, dan merasakan bagaimana kelayakan dan hak mereka untuk menerima tunjangan dipertanya-



kan melalui sistem persyaratan, dan melalui penilaian kelayakan yang berlapis-lapis. Mereka juga menggambarkan stigma institusional yang mereka alami saat mengunjungi Jobcentre Plus atau pada saat terlibat dalam bentuk-bentuk dukungan [bagi transisi] dari [tunjangan] kesejahteraan ke pekerjaan (*welfare-to-work support*). Di sini, mereka biasanya bertemu penasihat-penasihat yang menurut perasaan mereka hanya memandangi mereka dengan sebelah mata, dan memperlakukan mereka tanpa martabat atau rasa hormat. Menurut penjelasan Sophie: “Pada dasarnya mereka [para penasihat di pusat bursa kerja] memandangi kami seperti sampah.”

Secara keseluruhan, penelitian di atas menggambarkan kesenjangan sangat lebar antara karakterisasi politik populer “kesejahteraan” dengan realitas hidup yang dijalani sehari-hari, dan bagaimana reformasi kesejahteraan semakin mempersulit kehidupan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan.

› **Tumbuhnya Perlawanan**

Selama beberapa tahun terakhir, di samping bergulirnya perubahan pada tunjangan, Inggris Raya juga telah menyaksikan peningkatan resistensi terhadap reformasi tersebut. Hal penting yang perlu dicermati, gerakan tersebut untuk sebagian diprakarsai oleh orang-orang yang langsung mengalami kemiskinan serta mereka yang

menerima tunjangan di luar ranah pekerjaan, yang berkumpul bersama untuk menentang karakterisasi populer “kesejahteraan” dan mengkampanyekan perubahan. Sebagai contoh, pada tahun 2013 beberapa peserta kajian “*the everyday realities of welfare reform*” berkumpul untuk membuat suatu film dokumentasi tentang pengalaman mereka, yang kemudian dikenal sebagai proyek [Dole Animators](#). Proyek tersebut tetap aktif, dan baru-baru ini terpaut dengan [Poverty 2 Solutions](#), yang merupakan kolaborasi dengan dua kelompok lain untuk mengembangkan cetak biru untuk benar-benar mengubah penanggulangan kemiskinan. Dua contoh tersebut merupakan bagian dari sejumlah besar contoh lain, dan merupakan bukti penolakan terhadap perumusan reformasi kesejahteraan yang parsial sebagaimana yang selama ini ditawarkan oleh oleh para politisi arus utama. Kegiatan ini sangat penting, dan merupakan suatu sumber harapan yang sangat dibutuhkan, terutama dalam konteks meningkatnya kemiskinan dan tingkat kesulitan hidup ketika perubahan-perubahan pada tunjangan kesejahteraan sosial di Inggris Raya terus menimbulkan dampak. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Ruth Patrick <ruth.patrick@york.ac.uk> atau melalui Twitter [@ruthpatrick0](#)

› Kelas dan Ekologi

oleh **Richard York**, Universitas Oregon, AS dan **Brett Clark**, Universitas Utah, AS

Untuk membangun suatu dunia yang lebih baik dan menyelamatkan lingkungan, cengkeraman modal atas dunia perlu dipatahkan. I. Ransley/flickr. Hak tertentu dilindungi.



Kapitalisme adalah sebuah sistem yang didasarkan atas perburuan akumulasi yang tak berkesudahan oleh dan untuk kelas kapitalis. Sistem kapitalis mewujudkan tujuan ini melalui berbagai pencaplokan yang tak terkendali dan eksploitasi yang tak ayal menyebabkan degradasi lingkungan dan ketimpangan sosial.

Pencaplokan (*expropriation*)—suatu proses perampokan—melibatkan penghancuran hak-hak adat, penelnyapan relasi-relasi produktif non-kapitalis dan juga perbudakan. Kekerasan kolonial dan pencaplokan tanah telah membantu memprivatisasi sarana-sarana produksi, menciptakan kelas dan merasialkan sistem akumulasi. Proses

ini memungkinkan penjarahan sumber daya alam dan manusia di seluruh penjuru dunia yang sebagiannya turut berfungsi sebagai landasan kebangkitan kapitalisme industrial. Orang-orang yang dirampas hak miliknya (*dispossessed peoples*) lalu dipaksa menjual tenaga kerjanya untuk memperoleh upah guna membayar sarana-sarana subsistensinya. Di negara-negara berpendapatan rendah, tingkat eksploitasi tenaga kerja sangatlah tinggi. Di wilayah ini, eksploitasi yang berlebihan menghasilkan transfer surplus secara masif ke negara-negara kapitalis inti. Para kapitalis mengendalikan surplus sosial—yang dihasilkan oleh masyarakat secara keseluruhan, dalam interaksinya dengan dunia bio-fisik yang lebih besar—dan mengakumulasi kapital. Selain itu, mereka juga mencaplok kerja



Kapitalisme membahayakan kesejahteraan manusia maupun lingkungan. M. Crandall/ flickr. Hak tertentu dilindungi.

reproduksi sosial yang tak berbayar, yang turut berfungsi mempertahankan kehidupan. Pekerjaan ini secara tidak proporsional banyak dikerjakan oleh perempuan, yang menghasilkan bertambahnya ketimpangan sosial.

Dihadapkan pada keharusan pertumbuhan dari kapitalisme, sistem ini secara berangasan merambah ke seluruh penjuru planet. Setiap ekspansi dalam proses produksi, dalam rangka menjaga operasi ekonomi pada skala yang lebih besar dan lebih intensif, memunculkan permintaan tambahan sumber daya (yaitu materi dan energi), dan menghasilkan polusi lebih besar lagi. Hal ini secara progresif menimbulkan degradasi lingkungan pada satu skala dan kategori yang tidak pernah dijumpai dalam sejarah manusia, yang melampaui kapasitas regeneratif ekosistem, membanjiri cekungan ekologis, mematahkan daur alami, dan menguras sumber daya. Metabolisme sosial—yakni hubungan yang saling bertukar antara masyarakat dan dunia biofisik yang lebih besar—yang teralienasi pada kapital terbukti secara nyata pada perubahan iklim, amplifikasi kepunahan keragaman hayati, dan pengasaman laut—untuk hanya menyebut sejumlah kecil masalah lingkungan yang mendesak.

Dalam logika kapital, seluruh dunia—manusia, binatang, tanaman, batu, udara, air dan sebagainya—berfungsi sebagai sarana untuk memfasilitasi akumulasi keuntungan pribadi. Apabila cara kerja kapitalisme dipahami secara tepat, koneksi yang erat antara eksploitasi kelas dan degradasi lingkungan menjadi jelas. Hal ini juga menjelaskan pentingnya perjuangan kelas, termasuk perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial, dan pentingnya gerakan lingkungan radikal.

Namun, dominasi kapitalisme di seluruh penjuru dunia telah mendistorsi pemahaman umum mengenai bukan

saja penyebab masalah lingkungan dan ketidakadilan sosial, namun bahkan juga mengenai apa yang dimaksud dengan memperbaiki kondisi manusia. Selama dua abad—dan terus demikian selepas Perang Dunia II—telah diterima secara luas di hampir seluruh negara bahwa pertumbuhan ekonomi sinonim dengan “kemajuan sosial” dan “pembangunan”. Karena itu, telah dianggap sebagai keniscayaan (*taken for granted*) bahwa masyarakat harus mengejar pertumbuhan ekonomi yang tanpa henti (dengan ukuran nilai tukar yang dimonetisasi). Pendekatan semacam ini dianggap akan dapat meningkatkan permintaan konsumsi dan meningkatkan kualitas sekaligus kuantitas barang dan jasa, menyediakan manfaat bagi setiap orang kendati secara tidak merata. Tipe pembangunan ini dipuji oleh para pemimpin bisnis dan pemerintahan sebagai solusi atas kemiskinan dan sebagai cara untuk memperbaiki kondisi pekerja. Cara ini juga diidentifikasi sebagai jalan yang tepat untuk mengatasi masalah lingkungan dengan memacu inovasi dan peningkatan teknologi. Dengan kata lain, semua perbaikan tergantung pada pertumbuhan ekonomi secara terus menerus. Pandangan umum semacam ini sepenuhnya mengabaikan kenyataan bahwa program modernisasi kapitalisme telah menyebabkan rangkaian panjang masalah lingkungan yang berakumulasi, membiarkan ratusan juta orang terjatuh dalam kemiskinan dan menimbulkan ketimpangan yang luar biasa baik di dalam maupun antar negara.

Meski demikian, sebagian lantaran dominasi ideologis kapital, organisasi strukturalnya, kekuasaan globalnya dan sistem produksinya yang teralienasi, banyak pekerja, serikat buruh dan bahkan pemerintah yang condong ke kiri di seluruh dunia menerima seluruh atau sebagian agenda pembangunan kapitalis sebagai cara untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Satu aspek utama yang menggosokkan dari hal ini adalah bahwa banyak orang yang dirugikan



oleh kapitalisme tidak menyalahkan para kapitalis atau sistem ekonomi atas nestapa mereka, namun justru menyalahkan para pejuang lingkungan, imigran, sosialis, feminis, ras lain, dan berbagai kelompok lain—pihak-pihak yang bukan musuh melainkan calon-calon sekutu.

Cara kerja kapitalisme menciptakan beragam tantangan dan hambatan bagi mobilisasi luas untuk menentang sistemnya. Sistem ekonomi global yang berlapis mendorong pembangunan yang tidak merata di mana buruh murah di Selatan Global digunakan untuk menghasilkan barang-barang yang ditujukan untuk Utara. Dalam kondisi demikian, surplus ekonomi ditransfer kepada para kapitalis di Utara, sementara degradasi lingkungan dan polusi industri yang terkait dengan produksi komoditas terkonsentrasi secara tidak proporsional di selatan. Lebih parah lagi, dampak langsung dari perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan yang parah telah menimbulkan efek yang merugikan di Selatan Global, khususnya di antara penduduk yang paling rentan. Operasi kapitalis telah menimbulkan rangkaian ketidakadilan lingkungan yang lebih banyak membebani penduduk kulit berwarna dan kelompok miskin, dengan akibat pengkotak-kotakan dan ketimpangan lebih lanjut di dalam masyarakat. Pada saat yang sama, kapital mengerahkan kekuasaan dan pengaruhnya untuk mempertahankan operasinya dan mencegah perdebatan dan aksi politik warga yang serius untuk mengatasi masalah lingkungan, seperti perubahan iklim. Dalam kesemuanya ini, sistem kapitalis memunculkan berbagai kontradiksi sosial dan ekologis. Jelas sudah bahwa pemberontakan yang luas dalam sebuah kesatuan, yang mencakup beragam kelas yang mengalami perampasan dan eksploitasi yang berlainan, sangatlah dibutuhkan. Namun, bagaimana oposisi semacam ini borganisasi dan melampaui batas-batas geografis dan beragam pengkotak-kotakan sosial merupakan suatu proses yang sedang terbentuk.

Pemberontakan global ini menawarkan kemungkinan untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Beberapa landasan umum bagi transformasi revolusioner ini mencakup tantangan atas bagaimana kapitalisme mbingkai makna pembangunan, standar penghidupan, kualitas hidup, dan kekayaan. Cara kerja kapitalisme bersifat anti-tesis bagi pemenuhan kebutuhan manusia, pemajuan keadilan sosial, dan pencegahan degradasi lingkungan. Alternatif yang radikal namun masuk akal terhadap kapitalisme adalah membangun masyarakat di mana tujuan utamanya bukanlah untuk memperluas produksi dan konsumsi sedemi-

kian rupa guna memfasilitasi akumulasi kekayaan pribadi. Namun, tujuannya adalah untuk membuat hidup manusia lebih baik dengan membangun komunitas yang didasarkan pada kesetaraan dan keadilan, di mana semua orang tidak hanya terpenuhi kebutuhan dasarnya melainkan juga memiliki saluran kreatif, waktu luang, kesenangan estetis termasuk lingkungan yang indah. Membangun dunia alternatif ini tidak memerlukan bahan bakar fosil, lebih banyak mobil, lebih banyak pesawat, lebih banyak plastik, lebih banyak mal perbelanjaan, atau lebih banyak peternakan pabrik (*factory farms*). Karena itu, ia tidak mengharuskan kerusakan lingkungan lebih besar. Yang ia butuhkan adalah perubahan sosial, politik dan ekonomi.

Singkatnya, mematahkan kontrol kapital atas dunia merupakan sebuah keniscayaan demi membangun sebuah masyarakat yang dapat melestarikan ekosistem yang beragam, iklim yang stabil, dan lingkungan yang tidak meracuni sambil menyediakan pula kualitas hidup yang baik bagi seluruh manusia. Mengingat kebenaran ini, pendekatan neoliberal dalam mengatasi masalah lingkungan, yang mengupayakan solusi pasar dan perbaikan teknologi, telah ditakdirkan untuk gagal. Yang dibutuhkan adalah gerakan lingkungan yang radikal yang menantang kekuasaan dan berjuang untuk merestrukturisasi relasi-relasi sosio-ekonomi dengan menciptakan pekerjaan yang penuh makna dan tidak mengalienasi. Hal ini mencakup penentangan terhadap warisan kolonialisme dan imperialisme yang berperan dalam melanggengkan ketidakadilan rasial dan ekonomi antar dan dalam negara-negara, seraya menghapuskan serbuan yang penuh keserakahan terhadap ekosistem baik yang dilakukan oleh korporasi, pemerintah maupun organisasi-organisasi pembangunan.

Demikian pula, jika kita ingin membangun dunia yang lebih baik, maka kaum sosialis, feminis, anti-kolonialis dan lain-lain yang berjuang untuk keadilan sosial mesti mengakui bahwa krisis lingkungan bukanlah sekedar satu dari berbagai isu lainnya, melainkan terjalin erat dengan penindasan manusia dan merupakan inti dari kontradiksi kapitalisme. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada
Richard York <rfyork@uoregon.edu> dan
Brett Clark <brett.clark@soc.utah.edu>

› Choke-Chain Effect

Kapitalisme yang Melampaui Pertumbuhan Cepat

oleh **James K. Galbraith**, Universitas Texas, AS dan **Klaus Dörre**, Universitas Jena, Jerman.



Konferensi 'Transformasi Raya. Masa Depan Masyarakat Modern' akan berlangsung di Jena, Jerman pada bulan September 2019. Hak cipta: Sarah Cords.

Ekonomi di negara-negara industri awal telah meninggalkan masa pertumbuhan cepat. Salah satu alasan berakhirnya pertumbuhan ekonomi yang cepat di negara-negara ini adalah karena adanya kecenderungan ke arah pengetatan keuntungan yang oleh James Galbraith disebut sebagai “efek rantai yang mencekik” (*choke-chain effect*).

Istilah ini menjelaskan keadaan di mana ekonomi dengan sumber daya—dan energi—intensif yang muncul setelah tahun 1945 baik di Timur maupun di Barat, yang menjamin kemakmuran melalui angka pertumbuhan yang tinggi, tidak dapat berlanjut tanpa perubahan karena efisiensi di dalam tipe ekonomi seperti ini hanya bisa meningkat selama sumber daya tetap murah. Namun intensitas sumber daya juga berarti biaya tetap yang tinggi, yang hanya bisa diangsur dalam jangka panjang. Biaya ini hanya bisa dibenarkan apabila sistem diharapkan dapat tetap menguntungkan untuk jangka waktu yang lebih panjang. Oleh sebab itu stabilitas politik dan sosial merupakan suatu kondisi fungsional kunci untuk aktivitas ekonomi sejenis ini. Karena persyaratan stabilitas ini, sistem biaya tetap yang tinggi secara khusus bersifat rentan. Tetapi, apa yang terjadi ketika waktu menjadi tidak pasti dan harga komoditas dan energi mengalami kenaikan? Kurun waktu untuk keuntungan dan investasi berkurang, dan total surplus atau keuntungan perusahaan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan waktu-waktu stabil. Karena keuntungan menyusut, konflik distribusional yang terjadi di semua tingkatan—antara pekerja, manajemen, pemilik, dan otoritas pajak—semakin intensif karena kepercayaan pada suatu perkembangan yang positif mulai goyah.

“Efek rantai yang mencekik” semakin intensif apabila (a) adanya kelangkaan pada sumber daya krusial tertentu, dalam pengertian bahwa agregat permintaan melebihi pasokan total dengan harga biasa, dan (b) pasokan komoditas tersebut bisa dimanipulasi melalui penimbunan dan spekulasi.

Laksana kalung yang mencekik seekor anjing, efeknya tidak selalu mencegah pertumbuhan ekonomi. Tetapi seiring dengan akselerasi konsumsi sumber daya energi, harga-harga melonjak dengan cepat dan keuntungan menurun dengan pesat. Ini menurunkan investasi, menabur keraguan pada keberlangsungan pertumbuhan dan mungkin juga memantik suatu pengetatan (yang menyesatkan) pada tuas ekonomi lain.

Pertimbangan ini bahkan tidak mencakup biaya tinggi dari perubahan iklim. Biaya komoditas dan energi bukan satu-satunya penyebab krisis besar pada tahun 2007-2009, juga bukan satu-satunya penyebab pertumbuhan yang relatif rendah di pusat-pusat kapitalis lama. Namun, isu-isu sumber daya, manakala biaya perubahan iklim menjadi akut, dapat menjadi hambatan utama bagi pertumbuhan. Masalahnya nyata: agar kehidupan terorganisasi di planet ini bisa berlanjut dalam wujud ini, akan diperlukan pengurangan besar-besaran pada emisi karbon, dan ini akan berbiaya tinggi; di samping itu, banyak di antara aktivitas bisnis yang mengkonsumsi energi akan menjadi tidak menguntungkan.

Kendatipun terdapat kontroversi ekonomi internal di seputar ini, analisis ini penting bagi diskusi tentang kapitalisme, pertumbuhan, dan demokrasi, setidaknya dalam tiga hal. Pertama, telah jelas bahwa masyarakat pascapertumbuhan—lebih tepatnya, masyarakat pascapertumbuhan kapitalisme yang relatif lemah atau tanpa pertumbuhan di negara Utara yang kaya—telah lama menjadi sebuah realitas sosial. Penyebab dari perkembangan ini sebagian adalah struktural, sebagian lainnya adalah politis. Dengan konversi hutang swasta menjadi hutang negara untuk menyelamatkan perbankan, negara-negara zona Eropa telah membeli waktu, tetapi solusi berkelanjutan untuk ketidakseimbangan ekonomi struktural tidak dimasukkan dalam langkah-langkah yang ditempuh. Kebijakan penghematan di Eropa telah gagal, dan bahkan sebagian kelompok protagonis sekarang telah mengakui hal itu, terutama dalam kasus Yunani.

Tetapi kebijakan Keynesian dengan upah yang lebih tinggi dan permintaan yang meningkat sebenarnya bukanlah satu alternatif. Proposal terkini kurang melihat kesenjangan kekuasaan struktural yang telah lebih terkonsolidasikan dengan rezim hutang Eropa. Karena pasar finansial secara global saling terhubung dan para investor bisa menilai risiko secara internasional, penyesuaian di suatu negara tidak akan banyak membantu. Dengan kata lain, hambatan struktural akan memblokir jalan menuju pemulihan ekonomi yang bersifat langgeng. Sangat mungkin bahwa di beberapa negara dan wilayah ekonomi akan tumbuh dengan laju yang tinggi dalam waktu yang lama, tetapi pertumbuhan dan distribusi menjadi semakin tidak merata, dan kembali secara menyeluruh ke laju pertumbuhan tinggi di masa lalu merupakan hal yang tidak diharapkan.

Kedua, apabila hal ini benar, maka ini berarti bahwa sedikit tidak masuk akal untuk secara normatif membesar-besarkan konsep masyarakat pascapertumbuhan atau bahkan menggadag-gadangnya sebagai alternatif pas-kapitalis. Sebaliknya, kita perlu mencari tahu apa arti

pertumbuhan lambat dengan angkat pertumbuhan rendah permanen bagi hubungan antara kapitalisme dan demokrasi. Secara nyata, ekonomi kapitalis bisa stagnan dalam waktu yang lebih lama (lihat Jepang, Italia) atau bahkan menyusut (Yunani) tanpa adanya perubahan di dalam inti struktur sosioekonomi mereka. Dan di dalam struktur kekuasaannya, kapitalisme yang relatif stabil dengan laju pertumbuhan lemah dengan demikian akan dimungkinkan untuk periode yang lebih lama—tetapi apakah hal ini akan berlaku pula bagi stabilitas institusi-institusi dan prosedur demokrasi, merupakan soal lain.

Ketiga, ini juga berarti bahwa di kala kita berargumentasi bahwa kembali ke pertumbuhan cepat tidaklah mungkin, kritik menyeluruh mengenai pertumbuhan dan kapitalisme dan ide mengenai ekonomi yang stagnan atau bahkan menyurut sepertinya bukan langkah maju. Sebaliknya, suatu ekonomi baru yang pertumbuhannya secara disadari lambat, yang memasukkan fondasi biofisika dari ekonomi ke dalam mekanisme fungsinya, bisa menjadi solusi. Suatu ekonomi yang stagnan atau bahkan menyusut selalu akan menghasilkan sedikit pemenang dan banyak pecundang. Dengan alasan ini, suatu jenis aktivitas ekonomi dibutuhkan di masa depan, yang dapat menjamin pertumbuhan yang lambat tetapi stabil dalam jangka waktu yang lebih lama. Kami menyarankan suatu desentralisasi kapitalisme dengan pertumbuhan yang lambat sebagai hal yang diinginkan. Namun kapitalisme [yang terdesentralisasi dengan pertumbuhan lambat] seperti ini akan berbeda secara signifikan dengan varian yang terfinansialisasi. [Kapitalisme] ini akan secara signifikan mengurangi ukuran institusi dan organisasi (militer) yang biaya tetapnya termasuk penggunaan sumber daya yang ekspansif, dan meniadakan sektor perbankan secara keseluruhan. [Kapitalisme] ini akan menjamin standar hidup yang layak, memungkinkan pensiun dini, menguatkan peningkatan upah minimum, meringankan beban pajak tenaga kerja tetapi secara signifikan meningkatkan pajak warisan dan hadiah bagi semua warga negara. Yang paling penting, [kapitalisme] ini akan menyediakan insentif untuk menjamin pengeluaran aktif untuk infrastruktur keberlanjutan sosial dan lingkungan daripada akumulasi pasif. Apakah ini adalah suatu skenario yang realistis merupakan sebuah pertanyaan yang terbuka.

Sosiologi harus terlibat dalam upaya mencari jawaban tersebut. Sebuah upaya akan dilakukan sebagai bagian dari konferensi 'Transformasi Raya. Masa Depan Masyarakat Modern' (*Great Transformation. The Future of Modern Societies*) yang akan berlangsung pada akhir September 2019 di kota universitas Jena di Jerman. Di sana, kami akan meluncurkan sebuah jaringan penelitian yang akan membuka peluang bagi para sosiolog dan ekonom untuk berpartisipasi dalam suatu dialog global mengenai masa depan yang melampaui pertumbuhan yang cepat. ■

Semua korespondensi ditujukan kepada Klaus Dörre <klaus.doerre@uni-jena.de>

› Kondisi Pascapertumbuhan

oleh **Éric Pineault**, Université du Québec à Montréal, Kanada, dan Kelompok Penelitian mengenai Masyarakat Pascapertumbuhan, Universitas Jena, Jerman



Pertumbuhan ekonomi telah sejak lama berada di pusat politik Barat.
Foto: Lending Memo.com./flickr. Hak tertentu dilindungi.

Pertumbuhan (*growth*) dalam suatu masyarakat kapitalis mempunyai beberapa pengertian dan implikasi, seiring dengan kemungkinan pupus atau menjelang titik akhirnya. Pertumbuhan adalah suatu fakta konkret (*material fact*), suatu pewujudan moneter dari skala ekonomi maupun ide sentral yang posisinya sangat sulit dilawan dalam masyarakat kapitalis. Kondisi pascapertumbuhan (*post-growth condition*) di sini mengacu pada konteks di mana tantangan ini tidak hanya mungkin tetapi perlu.

Pertumbuhan mengacu, pertama, pada apa yang diukur PDB dan ukuran nasional lainnya, yaitu ukuran dan dinamika kapitalisme sebagai suatu produksi ekonomi moneter. Hal ini mencakup jumlah komoditas yang diproduksi (keluaran) dan dikonsumsi (permintaan); akumulasi saham; investasi dalam modal tetap baik yang tampak (mesin dll.) maupun yang tidak tampak (penelitian dan pengembangan, hak paten). Hal ini diterjemahkan menjadi pekerjaan, yang menghasilkan pendapatan moneter dalam bentuk gaji, keuntungan, pajak, bunga, dan dividen.

Pertumbuhan dalam perspektif ekonomi yang sempit ini berarti lebih banyak keluaran, dan kapasitas lebih besar untuk memproduksi keluaran. Angka pertumbuhan, yang diekspresikan dalam persentase, menunjukkan proses ekspansi ini. Dalam masyarakat kapitalis modern pertumbuhan muncul sebagai wujud situasi ekonomi yang “normal”, satu angka—PDB—menunjukkan dan merangkum sekian banyak hubungan sosial dan material yang membentuk fakta ini. Suatu angka pertumbuhan yang rendah akan memunculkan konflik dalam distribusi antara modal, tenaga kerja, dan negara. Suatu penurunan angka pertumbuhan yang berkepanjangan (“*secular stagnation*”) akan memunculkan kondisi konflik dan ketidakstabilan berlarut-larut. Menurunnya angka pertumbuhan dalam ekonomi-ekonomi kapitalis merupakan sebuah fenomena mempertahankan diri, dimana negara-negara melakukan pemotongan pengeluaran, perusahaan-perusahaan membatalkan investasi dan memangkas produksi; para kapitalis menimbun keuntungan atau memindahkannya ke ruang finansial; para pekerja kehilangan kekuatan kolektif kelas, ketika mereka membagi diri mereka dalam perjuangan untuk bertahan, dan permintaan yang melemah dalam eko-



nomi yang telah terbiasa dengan dinamika pertumbuhan berbasis upah (*wage-led growth dynamic*). Ini merupakan pengalaman banyak negara kapitalis utama sejak krisis tahun 2008.

Dengan demikian pertumbuhan merupakan suatu cara pusat untuk mengatur kontradiksi-kontradiksi yang terjadi di dalam kelas pada masyarakat kapitalis. Kapitalisme yang didasarkan pada akumulasi melalui eksploitasi, menemukan stabilitasnya lewat pertumbuhan. Upah naik seiring dengan keuntungan yang diperoleh; penyerapan seluruh tenaga kerja (*full employment*) menyertai tingginya angka investasi; konflik kelas dikurangi dan menjadi bisa diatur; naiknya surplus terserap dalam bentuk meningkatnya “standar kesejahteraan” untuk kebanyakan orang, namun juga lewat perluasan negara kesejahteraan. Jika pertumbuhan turun sampai di bawah angka tertentu, maka kesemua hal di atas pun mulai goyah. Hal ini tidak langsung menjadi keprihatinan bagi para kapitalis, sebab mereka dapat memberikan kompensasi atas pertumbuhan yang tidak pasti dengan cara memeras keuntungan lebih besar dari produksi. Tentu hal ini semakin menekan permintaan dan pertumbuhan, sebab pendapatan para pekerjalah yang pada akhirnya akan diperas, namun para pekerja selalu dapat berpaling ke kartu kredit, ataupun hasil produksi dapat dijual kepada para konsumen di tempat lain yang “tidak diperas.” Di titik simpang ini, para kaum pekerja terorganisasikan yang menjadi “penuntut pertumbuhan” (*growth demanders*): mereka mengusulkan dan memperjuangkan kebijakan yang memicu suatu angka pertumbuhan yang lebih tinggi, seperti kebijakan peningkatan dana sosial oleh negara, kenaikan upah, dan akhirnya investasi perusahaan yang lebih tinggi yang bersifat “nyata” dan menciptakan lapangan kerja. Jika stagnasi sekuler (*secular stagnation*), yang difahami sebagai suatu kecenderungan struktural yang tertanam secara mendalam dan diperkuat kelas menuju suatu angka pertumbuhan nol (*zero growth rate*), sungguh mewakili masa depan masyarakat kapitalis maju, maka kita akan tetap berada pada kegentingan paradox berupa pekerja yang mendambakan pertumbuhan dan gerakan sosial—yang dapat kita sebut sebagai suatu koalisi pertumbuhan yang progresif—yang menghadapi perusahaan-perusahaan yang tidak peduli pada pertumbuhan dan para kapitalis yang sudah bosan dengan keadaan semacam itu.. Orang akan dapat dengan mudah membayangkan tantangan yang dihadapi sosiologi kritis dan teori kapitalisme.

PDB mengukur ukuran ekonomi dalam kaitannya dengan dirinya sendiri. Sebab hal itu dinyatakan dalam satuan moneter, seolah menyatakan bahwa kapitalisme adalah sistem yang bertumbuh sendiri yang “tumbuh dalam dirinya sendiri.”

Tetapi sejak adanya pemikiran Polanyi, kita tahu bahwa hubungan-hubungan kapitalis berkembang dan tumbuh dalam hubungan-hubungan sosial dan institusi-institusi yang lebih luas yang mengabaikan logika-logika kapitalis, yang kadang-kadang menghancurkan fondasi-fondasi pertumbuhan itu sendiri. Teori feminis selanjutnya menunjukkan ketergantungan utama daritenaga kerja, nilai, dan modal pada pekerjaan reproduktif “yang tak dinilai” seperti perawatan (*care*). Tak hanya ekonomi bertumbuh melalui sesuatu (seperti hubungan-hubungan sosial), tetapi pertumbuhan ekonomi juga bertumpu pada sesuatu (kerja reproduktif dan pelayanan). Jika diaplikasikan pada hubungan Utara-Selatan, dapat dibuat argumen bahwa pertumbuhan di negara-negara kapitalis inti juga bertumpu pada kapasitas untuk melakukan eksternalisasi ke Selatan Global atau Negara-negara pinggir dengan tekanan yang melekat pada apa yang dapat disebut sebagai mode kehidupan imperial. Ketika hal ini didefinisikan ulang sebagai suatu ekspansi dari komodifikasi hubungan-hubungan sosial, sebagai eksternalisasi, dan sebagai semakin tingginya tuntutan terhadap pekerjaan reproduktif yang tidak dihargai, maka tuntutan atas pertumbuhan yang lebih kuat, lebih kokoh, dari inklusif oleh suatu koalisi progresif pertumbuhan dapat memicu suatu kegelisahan yang serius.

Hal ini semakin rumit ketika pertumbuhan dipandang sebagai suatu proses material, dan ketika efek disruptif dari ekstraksi, produksi, konsumsi, dan limbah untuk ekosistem, makhluk hidup dan siklus biogeokimia global dimengerti dan diterima, seperti halnya dengan kasus perubahan iklim. Skala biofisik—ukuran agregat ekonomi dibandingkan dengan ekosistem dan, lebih global lagi, sistem bumi di mana hal tersebut tertanam di dalamnya—dan intensitas dampak biofisik (depleksi, pencemaran, artifisialisasi), memberikan kita wajah ekonomi yang secara inheren terkungkung dan terbatas. Kemunculan bidang Ekologi Sosial telah mengembangkan metrik dan kategori yang memetakan pertumbuhan dan skala ekonomi kapitalis dalam terminologi biofisik. Pandangan sosiologis mengatakan bahwa metabolisme kita selaku individu ditempatkan oleh metabolisme organisasi sosial pada tingkat kemasyarakatan. Metabolisme sosial ekonomi dapat diukur sebagai hasil materi dan energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan keluaran konsumsi dan investasi barang dan jasa di masyarakat kapitalis. Ketika kita telah membuang semboyan mengenai sebuah produksi ekonomi moneter yang telah terpisah secara menyeluruh dari segala basis biofisik, dari akumulasi dematerialisasi (seolah kita dapat hidup dari *Twitter feed!*), dan mengerti artikulasi padat dari hasil biofisik dan produksi moneter maupun sebagai penjelmaan modal dalam bentuk artefak (bangunan-bangunan, mesin-mesin, infrastruktur) yang hanya dapat bekerja jika dipasok dengan energi dan



materi, maka kemudian pertanyaan tentang keterbatasan biofisik untuk pertumbuhan menjadi suatu fakta yang sekeras dan senyata layaknya PDB.

Berdasarkan perspektif biofisik ini, kondisi pascapertumbuhan menunjuk pada kontradiksi ekologis dari masyarakat kapitalis dan pertumbuhan ekonominya. Kontradiksi-kontradiksi ini berdiri sendiri dan tidak lagi dapat dipandang sebagai hal sekunder atau turunan dari kontradiksi lebih dalam antara tenaga kerja dan modal. Kondisi pascapertumbuhan dengan demikian membutuhkan materialism ekologi yang telah diperkaya di samping materialism historis yang lebih tradisional yang sejak awal menjadi dasar perkembangan teori kritis sejak Marx.

Dengan telah berkembangnya model analisis kapitalisme ini selama beberapa dekade terakhir, hal itu membuktikan bahwa [pertumbuhan] metabolisme masyarakat kapitalis tingkat lanjut perlu diturunkan. Tetapi ada juga bukti bahwa penurunan pertumbuhan biofisik ekonomi kapitalis adalah suatu ketidakmungkinan, sebagaimana argumen John Bellamy Foster yang mengatakan bahwa meskipun angka pertumbuhan PDB sangat buruk, skala biofisik tidak ikut menurun. Banyaknya mekanisme yang membuat gerak roda akumulasi kapital terwujud dalam proses metabolik dan biofisik yang secara ekologis tidak berkelanjutan, telah didokumentasikan secara rinci oleh teori sosial ekologis.

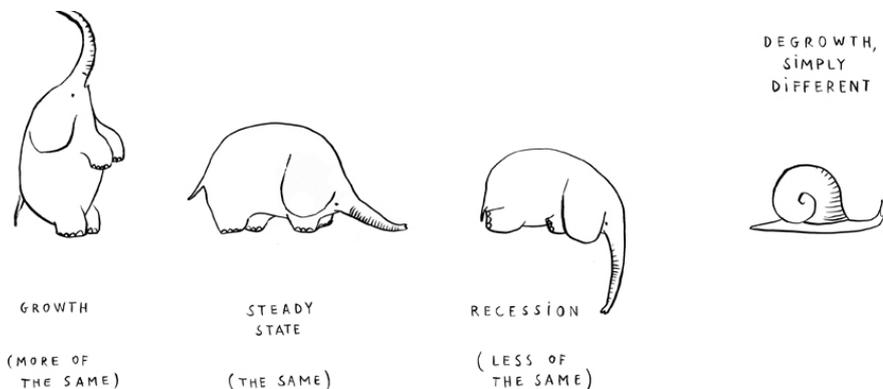
Upaya menghadapi dan menyelesaikan kontradiksi-kontradiksi ekologis sama artinya dengan menurunkan proses ekonomi masyarakat-masyarakat kapitalis. Namun proses institusionalisasi hubungan-hubungan sosial di bidang produksi dan konsumsi dalam masyarakat-masyarakat kapitalis didasarkan pada proses kenaikan ekonomi secara terus-menerus dan intensifikasi dampak-dampaknya. Semakin masyarakat terpecah karena kontradiksi dan menghadapi tantangan terhadap pada pembangunannya, pertumbuhan semakin dilihat sebagai solusi oleh para konstituen dari berbagai kelas sosial. Masyarakat kapitalis modern membutuhkan dan menginginkan pertumbuhan untuk alasan ekonomi, politik, dan budaya, namun metabolisme mereka harus diturunkan karena alasan-alasan biofisika. Mereka kekurangan suatu kosakata politis dan imajinasi untuk menyatakan kontradiksi ini sesuai dengan kehendak mereka. Inilah adalah persoalan yang dihadapi kondisi pascapertumbuhan dan inilah tantangan yang diberikan kepada sosiologi kritis dan teori kritis secara umum. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Éric Pineault
<eric.pineault@uni-jena.de>

› Degrowth:

Seruan untuk Transformasi Sosio-Ekologis Radikal

oleh **Federico Demaria**, Institut Ilmu Lingkungan dan Teknologi, Universitas Otonom Barcelona, Spanyol



Siput telah menjadi lambang gerakan Degrowth. Hak cipta.: Bàrbara Castro Urío.

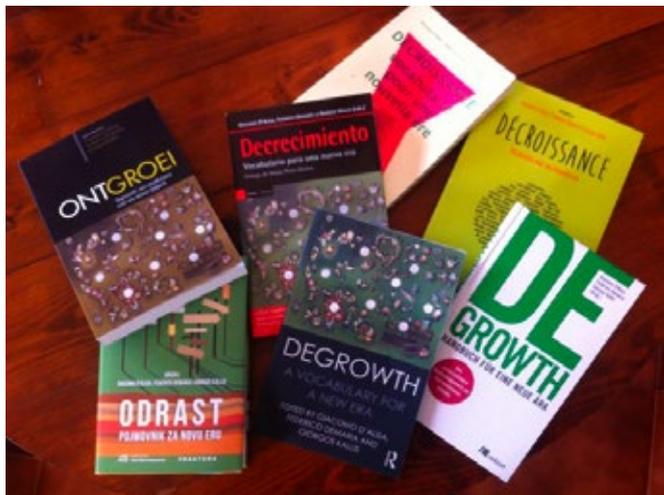
“**P**ertumbuhan demi kepentingan pertumbuhan itu sendiri” hingga saat ini masih menjadi credo seluruh lembaga pemerintah dan internasional. Pertumbuhan ekonomi disajikan sebagai solusi untuk seluruh masalah dunia: kemiskinan, ketimpangan, keberlanjutan; bisa apa saja. Kebijakan-kebijakan sayap kiri maupun sayap kanan hanya berbeda dalam hal bagaimana cara mencapainya. Meskipun demikian, suatu kebenaran ilmiah harus dihadapi: pertumbuhan ekonomi tidak sepadan dengan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, setelah melampaui batas tertentu, pertumbuhan tidak dibutuhkan secara sosial. Dengan demikian pertanyaan utamanya adalah: bagaimana kita dapat mengelola suatu perekonomian tanpa pertumbuhan?

Pertanyaan ini memperoleh legitimasi di berbagai arena, mulai dari sains hingga politik. Sebagai contoh, pada bulan September 2018, saat Konferensi Pascapertumbuhan berlangsung di Parlemen Eropa, dalam sebuah surat terbuka mereka yang berjudul “Eropa, Telah Tiba Saatnya untuk Mengakhiri Ketergantungan pada Pertumbuhan,” lebih dari 200 ilmuwan bersama dengan hampir 100.000 warga mendesak lembaga-lembaga Eropa untuk bertindak. Aksi ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Perdebatan telah berlangsung

selama setidaknya dua dekade, seperti yang dapat dilihat pada lebih dari 200 artikel akademik, sepuluh publikasi khusus, konferensi internasional dengan ribuan peserta, sekolah-sekolah musim panas, dan bahkan suatu gelar master pada universitas kami di Barcelona. Buku yang kami publikasikan, *Degrowth: A Vocabulary for a New Era* telah diterjemahkan ke dalam lebih dari sepuluh bahasa. Inisiatif-inisiatif akar rumput yang penting sedang berlangsung, dimulai dari penolakan terhadap proyek-proyek yang merusak lingkungan (lebih dari 2.000 di antaranya telah dipetakan dalam Atlas Keadilan Lingkungan; misalnya, kampanye ‘Hentikan Penggunaan Batu bara. Lindungi Iklim!’ oleh *Ende Gelände* di Jerman), hingga ke pembangunan alternatif-alternatif seperti asas kepemilikan bersama, perekonomian solidaritas, dan perumahan bersama. Namun, apa yang sebenarnya kita maksud dengan *degrowth*?

Secara umum, *degrowth* menantang hegemoni pertumbuhan ekonomi dan menyerukan penurunan produksi dan konsumsi redistributif yang diarahkan secara demokratis di negara-negara industri sebagai sarana untuk mencapai keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan kesejahteraan. *Degrowth* biasanya dikaitkan dengan gagasan bahwa sesuatu yang lebih kecil dapat bersifat





Literatur mengenai degrowth tersedia dalam banyak bahasa. Foto: Federico Demaria.

indah. Namun, penekanannya seharusnya tidak hanya pada *lebih sedikit*, melainkan juga *berbeda*. Dalam suatu masyarakat *degrowth*, segala sesuatunya akan berbeda: aktivitas, bentuk dan penggunaan energi, hubungan-hubungan, peran gender, alokasi waktu antara pekerjaan berbayar dan tak berbayar, serta hubungan-hubungan dengan dunia non-manusia.

Inti dari *degrowth* adalah upaya untuk melepaskan diri dari masyarakat yang kian diserap oleh fetisisme pertumbuhan. Perbenturan semacam itu oleh karenanya berhubungan dengan kata-kata dan benda-benda, dengan praktik-praktik simbolik dan material, dengan dekolonisasi hal-hal yang imajiner dan implementasi dunia lain yang sekiranya dimungkinkan. Proyek *degrowth* tidak bertujuan untuk meraih suatu pertumbuhan yang lain, ataupun sejenis *pembangunan (development)* tertentu (berkelanjutan, sosial, adil, dsb.) melainkan ditujukan untuk membentuk suatu masyarakat yang lain, suatu masyarakat berkelimpahan yang sederhana (Serge Latouche), suatu masyarakat pascapertumbuhan (Niko Paech), atau suatu masyarakat makmur tanpa pertumbuhan (Tim Jackson). Dengan kata lain, sejak awal *degrowth* bukanlah suatu proyek ekonomi, melainkan suatu proyek kemasyarakatan yang menyiratkan eskapisme dari ekonomi sebagai realitas dan sebagai wacana imperialis. “Berbagi,” “kesederhanaan,” “keramahtamahan,” “kepedulian,” dan “milik bersama” adalah makna utama dari masyarakat yang dibayangkan tersebut.

Meskipun konsep ini mengintegrasikan ekonomi ekologis, *degrowth* adalah suatu konsep non-ekonomi. Di satu sisi, *degrowth* menyiratkan reduksi metabolisme sosial (energi dan hasil-hasil material ekonomi), untuk menghadapi kendala biofisik yang ada (sumber daya alam dan kapasitas ekosistem untuk berasimilasi). Di sisi lain, *degrowth* adalah suatu upaya untuk menantang meratanya kehadiran relasi berbasis pasar dalam masyarakat serta akar imajinasi so-

sial berbasis pertumbuhan, dengan menggantikannya dengan gagasan pola hidup sederhana yang berkelimpahan. *Degrowth* merupakan pula suatu seruan untuk demokrasi yang lebih mendalam, yang diterapkan pada isu-isu yang berada di luar ranah arus utama demokrasi, seperti teknologi. Pada akhirnya, *degrowth* menyiratkan suatu redistribusi kesejahteraan yang adil, baik di dalam maupun di segenap Global Utara dan Selatan, maupun lintas generasi sekarang dan di masa yang akan datang.

Selama beberapa dekade terakhir, wajah kemenangan suatu ideologi berpemikiran tunggal mengenai pertumbuhan senantiasa diejawantahkan melalui slogan “*pembangunan berkelanjutan (sustainable development)*”, suatu oksimoron menarik yang seolah-olah telah disepakati bersama. Tujuan ideologi tersebut adalah untuk mencoba membela agama pertumbuhan ekonomi (*the religion of economic growth*) dalam krisis ekologis, dan hal ini tampaknya diterima dengan baik oleh gerakan anti-globalisasi. Menentang kapitalisme suatu pasar global menjadi hal yang urgen demi menggantikannya dengan suatu proyek peradaban, atau, lebih spesifik, untuk memberikan visibilitas terhadap suatu rencana yang telah lama disusun, namun berkembang di bawah tanah. Benturan dengan developmentalisme, suatu bentuk produktivisme yang sering digunakan untuk apa yang dinamakan negara-negara berkembang, dengan demikian menjadi dasar bagi proyek alternatif ini.

Istilah “*degrowth*” dicetuskan oleh cendekiawan ekologi politik, André Gorz, pada tahun 1972, dan digunakan sebagai judul terjemahan bahasa Prancis dari esai-esai Nicholas Georgescu-Roegen pada tahun 1979. *Degrowth* kemudian diluncurkan oleh para aktivis lingkungan hidup Prancis pada tahun 2001 sebagai suatu slogan provokatif untuk mempolitisasi ulang gerakan pelestarian lingkungan hidup (*environmentalism*). Moto *degrowth* diluncurkan secara hampir tidak sengaja karena kebutuhan mendesak untuk meninggalkan istilah *pembangunan berkesinambungan* yang rancu dan seringkali tidak bermakna. Dengan demikian frase *pembangunan berkesinambungan* tersebut pada awalnya bukan berupa suatu konsep (setidaknya, maknanya asimetris dengan pertumbuhan ekonomi) melainkan lebih berwujud slogan politik yang menantang yang bertujuan mengingatkan kita akan makna keterbatasan. *Degrowth* bukan resesi atau pertumbuhan negatif dan tidak boleh diartikan secara harafiah: menidaktumkan untuk tidak tumbuh sama absurdnya dengan menumbuhkan untuk tumbuh. (*degrowing to degrow would be as absurd as growing to grow.*)

Hijrah menuju *degrowth* bukanlah suatu transisi kehidupan yang mengarah menuju kemunduran, melainkan sebuah perubahan positif menuju masyarakat madani yang hidup sederhana, bersama, dan berkecukupan. Ada beberapa gagasan mengenai praktik dan institusi yang dapat memfasilitasi



transisi tersebut dan memungkinkan jenis masyarakat yang hidup di dalamnya untuk berkembang. Daya tarik *degrowth* timbul dari kekuatannya untuk menarik dan mengartikulasikan berbagai ide dan aliran pemikiran (termasuk keadilan, demokrasi, dan ekologi); untuk merumuskan beragam strategi pada tingkat yang berbeda (termasuk aktivisme oposisi, gerakan akar rumput alternatif, dan politik kelembagaan); dan mempertemukan aktor-aktor heterogen yang fokus pada isu-isu berbeda, mulai dari agroekologi hingga keadilan iklim. *Degrowth* melengkapi dan memperkuat area seputar topik tersebut, berfungsi sebagai benang penghubung (mimbar jaringan dari kelindan jaringan lain), melampaui politik berisu tunggal (*one-issue politics*).

Pada dasarnya, *degrowth* bukanlah satu-satunya alternatif, melainkan suatu matriks alternatif-alternatif yang membuka kembali petualangan manusia menuju kreativitas dan pluralitas kesempatan dengan mengangkat tabir utama totaliterisme ekonomi. *Degrowth* berarti berjalan keluar dari paradigma *homo oeconomicus* atau konsep manusia satu dimensi (*one-dimensional man*) yang dikemukakan Marcuse, sumber utama homogenisasi planet dan pembunuhan budaya. Jika “pembangunan” tidak lagi menjadi prinsip pengorganisasian kehidupan sosial, maka akan tumbuh ruang bagi suatu *pluriverse*. Ini akan merupakan apa yang oleh kaum Zapatista dijuluki sebagai “sebuah dunia di mana berbagai dunia akan selaras.” *Degrowth* hanyalah satu di antara banyak pandangan mengenai dunia (*worldviews*)

yang merupakan alternatif dari pembangunan, seperti *Buen Vivir*, *Afrotopia*, dan *Swaraj*. Dalam buku baru kami, *Pluriverse: A Post-Development Dictionary*, kami telah mengumpulkan lebih dari seratus pandangan alternatif dari seluruh dunia. Oleh karena itu, tidaklah mungkin untuk merumuskan solusi “baku” (*turnkey*) untuk *degrowth*, selain sebatas menguraikan dasar-dasar masyarakat non-produktif berkelanjutan dan contoh-contoh konkret dari program-program transisi.

Hipotesis *degrowth* menyatakan bahwa suatu lintasan transformasi sosio-ekologis radikal diperlukan, diinginkan, dan dimungkinkan. Kondisi realisasi, serta pertanyaan-pertanyaan politis yang berhubungan dengan dinamika sosial, para aktor, aliansi-aliansi, institusi-institusi, dan proses-proses yang akan menciptakan transisi-transisi *degrowth* selalu terbuka dan aktif diperdebatkan di Eropa dan di luarnya. Waktunya telah tiba untuk menyusun suatu agenda penelitian ilmiah terhadap *degrowth* yang bukan hanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang kurang nyaman terdengar, namun juga pertanyaan-pertanyaan politis. Sebagaimana argumen yang disampaikan ekonom ekologi Tim Jackson dan Peter Victor di *The New York Times*: “membayangkan sebuah dunia tanpa pertumbuhan termasuk dalam tugas-tugas paling vital dan mendesak yang harus dilakukan masyarakat.” ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Federico Demaria
<federicodemaria@gmail.com>

› Feminisme dan Degrowth

Aliansi atau Hubungan Mendasar?

oleh **Anna Saave-Harnack**, Universitas Jena, Jerman, **Corinna Dengler**, Universitas Vechta, Jerman, dan **Barbara Muraca**, Universitas Negara Bagian Oregon, AS

Istilah “*degrowth*” mungkin membuat banyak orang berpikir tentang penyusutan ekonomi setelah krisis keuangan tahun 2007. Tetapi maksud *degrowth* bukan seperti itu. Slogan aktivis “resesi mereka bukanlah *degrowth* kami!” menjelaskan bahwa *degrowth* sebagai wacana akademik dan gerakan sosial tidak boleh disalahartikan sebagai suatu deskripsi dari pertumbuhan negatif dalam paradigma pertumbuhan (misalnya resesi). Sebaliknya, *degrowth* secara mendasar mempertanyakan paradigma ini dan menekankan perlunya membebaskan masyarakat dari ketergantungan mereka terhadap tuntutan pertumbuhan ekonomi. Ini berarti bahwa *degrowth* mencari dan menjabarkan kemungkinan bagi masyarakat modern untuk mereproduksi tanpa harus bergantung pada percepatan yang konstan, ekspansi, dan intensifikasi eksploitasi sosial dan ekologis. Sebagai utopia konkret, aktivisme dan keilmuan *degrowth* melihat suatu transformasi *bottom-up* ke suatu masyarakat yang secara sosial adil dan secara lingkungan berkelanjutan, dan menyarankan langkah-langkah yang mungkin menuju visi yang lebih besar ini, dari praktik kolektif alternatif hingga transformasi institusi dasar. Oleh karena itu—dan ini adalah sebuah slogan lain dari aktivis—ketika berbicara tentang *degrowth*, kami merujuk pada “*degrowth* yang direncanakan (*by design*), bukan karena bencana (*by disaster*)!”

Namun, jika kita melihat pada *degrowth* ekonomi yang dipaksakan di Yunani, ada hal-hal yang kita, sebagai cendekiawan dan aktivis *degrowth*, dapat pelajari. Penurunan tingkat pertumbuhan yang mengikuti krisis keuangan di Yunani menyebabkan tantangan kemasyarakatan yang besar terkait layanan sosial dan publik. Perekonomian yang tidak tumbuh mempunyai arti bahwa masyarakat sipil harus menghadapi kebijakan penghematan sebagai reaksi terhadap utang publik. Rumah sakit, taman kanak-kanak, dan jaringan komunal lingkungan warga diciptakan untuk mengurangi konsekuensi dari pengurangan pengeluaran publik. Banyak dari prakarsa ini muncul dari konsekuensi

nyata krisis ekonomi (misalnya *degrowth* karena bencana), seperti klinik solidaritas di Thessaloniki, benar-benar mirip dengan gagasan (cita-cita) bahwa *degrowth* ingin dibangun “dengan perencanaan.” Tetapi mereka juga berbicara dengan keprihatinan feminis yang sangat beralasan: dalam kasus Yunani khususnya, perempuan dipengaruhi secara negatif oleh krisis saat mereka mengisi kesenjangan yang diciptakan oleh kebijakan penghematan. Sementara pekerjaan laki-laki yang sedikit lebih tradisional hilang, perempuan memikul bagian yang lebih besar dari layanan publik sebelumnya terutama di bidang pekerjaan perawatan dan kegiatan yang berkaitan dengan reproduksi sosial. Contoh dari Yunani dapat membuat para feminis menyimpulkan bahwa *degrowth* karena bencana, tetapi mungkin juga karena perencanaan, bisa sangat berisiko bagi perempuan dan kemungkinan berkontribusi pada re-tradisionalisasi reproduksi sosial dan pekerjaan perawatan. Kekhawatiran feminis ini semakin diperkuat oleh keilmuan yang menguraikan *jalur degrowth* yang tidak membutuhkan transformasi radikal dari institusi sosial dasar seperti tenaga kerja dan negosiasi ulang kondisi yang esensial bagi kehidupan yang baik untuk semua. Menghadapi pemahaman yang agak konservatif mengenai *degrowth* ini, maka perspektif-perspektif yang lebih radikal, seperti diskusi yang sangat aktif dalam “*Feminisms and Degrowth Alliance*” (Aliansi Feminisme dan *Degrowth*) (FaDA) menyoroti potensi emansipatoris dari masyarakat *degrowth*, apabila dibangun di dengan prinsip-prinsip panduan yang terinspirasi, misalnya, oleh feminisme dalam berbagai bentuk dan tradisi.

Ada diskusi yang telah berlangsung intens antara aktivis feminis, cendekiawan, dan aktivis lingkungan jauh sebelum wacana *Degrowth* memperoleh momentum. Misalnya, perspektif subsistensi, yang dikembangkan di Jerman pada tahun 1980-an, menekankan pada keterkaitan antara kepedulian lingkungan dengan eksploitasi perempuan dan koloni. Edisi khusus 1997 *Ecological Economics* tentang “Perempuan, Ekologi dan Ekonomi” adalah tong-



“Kontribusi feminis sangat penting untuk mencapai transformasi sosial-ekologi yang adil dan berorientasi solidaritas yang dicita-citakan *degrowth*”

gak lain dalam upaya ini. Sementara dialog ini semakin dipertimbangkan oleh para pendukung *degrowth*, pemikiran feminis masih belum menjadi bagian utuh dari proposal *degrowth* tersebut.

Kami berpendapat bahwa *degrowth* masih harus banyak belajar dari tradisi feminis; kontribusi feminis sangat penting untuk mencapai transformasi sosial-ekologi yang adil dan berorientasi solidaritas yang dicita-citakan oleh *degrowth*. Pertama, suatu wawasan inti dari feminisme ekologi adalah bahwa “alam” (yang dalam tradisi pemikiran Barat dikonstruksikan sebagai “perempuan”) dan “reproduksi sosial” (yang diasumsikan terjadi “secara alami”) adalah dasar pokok dari setiap proses produksi dalam ekonomi kapitalis. Namun, dalam paradigma pertumbuhan kapitalistik keduanya secara struktural didevaluasi, dibuat tidak terlihat, dan dihancurkan setiap harinya. *Degrowth* perlu memperhitungkan eksploitasi paralel dan devaluasi dari reproduksi sosial dan ekologi dan menjadikannya sebagai komponen kunci dari perjuangannya untuk mewujudkan hubungan manusia-alam yang lebih berkelanjutan. Kedua, teori feminis sejak dulu mengungkap hubungan kekuasaan yang tertanam dalam paradigma pertumbuhan. Sebagai contoh, kisah Maria Mies tahun 1986 tentang hubungan antara patriarki dan “paradigma akumulasi dan ‘pertumbuhan’ yang tidak pernah berakhir” menunjukkan bahwa interaksi silang yang produktif antara gerakan feminis dan gerakan *degrowth* tidak hanya dimungkinkan tetapi sangat penting untuk menghadapi secara menyeluruh struktur penindasan dalam kapitalisme. Ketiga, feminisme telah mengartikulasikan teori-teori dan praktik-praktik yang mendukung pengorganisasian perawatan secara bersama, menentang realokasi perawatan kepada keluarga atau sektor swasta yang merupakan hasil tak terelakkan dari penyusutan ekonomi tanpa transformasi. Penjelasan Amaia Pérez Orozco tentang “keberlanjutan hidup” menawarkan sebuah titik awal yang berharga untuk menggambarkan perawatan dalam suatu masyarakat *degrowth*. Suatu “pembakuan perawatan” (*commonization of care*) juga akan mendukung individu, seringkali pengasuh perempuan, dan menyediakan tempat sosial bagi pengasuh untuk bertemu, bertukar, dan mengembangkan suara politik, seperti ditunjukkan misalnya oleh Silvia Federici. Cara mengorganisasikan pekerjaan perawatan ini bisa menjadi inspirasi bagi praktik-praktik *degrowth* yang lebih luas.

Meskipun banyak yang bisa diperoleh dengan mengembangkan dialog antara feminisme dan *degrowth*, muncul

juga tantangan-tantangan terhadap upaya tersebut. Beberapa jenis feminisme mungkin lebih kecil kemungkinannya untuk berpartisipasi. Bahkan di antara mitra percakapan yang paling mungkin—feminisme ekologis dan *degrowth*—terminologi yang berbeda yang mereka andalkan kemungkinan dapat menyebabkan kurangnya saling pengertian.

Selain itu, mengingat urgensi nyata dan yang dirasakan dari percepatan bencana ekologis, intervensi berisiko mengabaikan implikasi bagi kelompok-kelompok sosial yang lebih rentan, termasuk mereka yang biasanya melakukan reproduksi sosial. Seperti yang baru-baru ini ditunjukkan oleh Federici (2018), kita dihadapkan pada peningkatan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia yang mengkhawatirkan, terutama mereka yang bertugas menyatukan masyarakat lokal melalui subsistensi, pengetahuan adat, dan kepedulian. Kekerasan dipelopori oleh gelombang baru “pembatasan-pembatasan” global dalam perang neoliberal untuk mengamankan pertumbuhan bagi para elit. Inilah sebabnya mengapa sangat penting bagi aktivisme *degrowth* dan keilmuan, bahkan dalam menghadapi tekanan waktu, untuk *tidak* jatuh ke dalam perangkap meremehkan tantangan patriarki yang, sebagaimana telah kami tunjukkan sebelumnya, terkait erat dengan paradigma pertumbuhan kapitalis.

Tantangan untuk menjadikan feminisme sebagai bagian integral dari gerakan *degrowth* tercermin oleh diskusi yang sangat aktif di jaringan FaDA. Beberapa anggota berargumen bahwa alih-alih mencoba membangun aliansi antara dua wacana dan gerakan, sehingga membingkai hubungan mereka hanya sebagai suatu kemungkinan dan menyoroti perbedaan-perbedaan dalam perjuangan bersama, seharusnya ada fokus pada hubungan yang mendasar antara keduanya. Transformasi masyarakat secara radikal di luar paradigma pertumbuhan hanya dapat dicapai dengan mengatasi tuntutan pertumbuhan kapitalis dan akar patriarkinya yang mendalam dalam hubungan mereka. Mengintegrasikan feminisme dengan *degrowth* adalah sebuah proyek yang sedang dalam proses pembentukan dimana kita semua diundang untuk terlibat. Adalah tugas kita untuk terlibat dalam dialog global untuk menciptakan masyarakat *degrowth* feminis! ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada:
 Saave-Harnack <anna.saave-harnack@uni-jena.de>
 Corinna Dengler <corinna.dengler@uni-vechta.de>
 Barbara Muraca <Barbara.Muraca@oregonstate.edu>

› Tantangan untuk Strategi *Degrowth*: Kasus Yunani

oleh **Gabriel Sakellaris**, Universitas Athena, Yunani



Demonstrasi Biarkan Yunani Bermafas di London, 2015. Sheila/flickr. Hak tertentu dilindungi

Sudah dianggap sebagai hal yang aksiomatis bahwa, dalam ekonomi kapitalis, pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang sangat penting bagi suatu negara untuk memastikan kesejahteraan bagi warganya. Namun daya tarik pertumbuhan sebaiknya jangan dipahami hanya sebagai seperangkat ide dominan yang berlaku dalam wacana publik dan paradigma ilmiah. Pendewaan pertumbuhan bukan sekedar masalah “ideologi pertumbuhan” yang ditegakkan oleh para elit akademis dan politisi yang berpengaruh. Sebaliknya, “ideologi pertumbuhan” ini harus dilihat sebagai hasil dari undang-undang tangguh yang mengatur cara produksi kapitalis, yang dalam kode genetiknya memuat nilai-nilai kompetisi, akumulasi modal, dan maksimalisasi.

Pertumbuhan sebagai sebuah keharusan itu telah ditentang oleh gagasan *degrowth* yang muncul seiring dengan meningkatnya keprihatinan tentang bahaya terhadap lingkungan. *Degrowth* dapat didefinisikan secara singkat sebagai: “penurunan skala produksi dan konsumsi secara adil” dengan cara yang secara sosial dan ekologis menguntungkan. Para ahli teori dan aktivis *degrowth* berargumen bahwa ada kendala sosial spesifik terhadap pertumbuhan, yang ditentukan oleh kelangkaan sumber daya alam, perubahan iklim, lamanya hari kerja, kualitas hidup, dan beberapa faktor lainnya. PDB dianggap sebagai indikator kemakmuran yang menyesatkan, karena tidak mencakup sejumlah variabel penting yang tidak dinyatakan dalam istilah moneter dan, terlebih lagi, mengikat masyarakat dalam perlombaan menuju produktivisme dan konsumerisme.

Dengan terjadinya kemerosotan ekonomi global akhir-akhir ini yang mengikuti krisis finansial, model produksi internasional telah menjadi bahan perdebatan. Sementara para ekonom umumnya mempertanyakan hal tersebut dalam konteks ketidakseimbangan neraca berjalan global, “kubu *degrowth*” semakin banyak melontarkan kritik yang justru memandang krisis tersebut sebagai suatu peluang untuk melakukan reorientasi terhadap prioritas sosial agar menjauh dari pencarian pertumbuhan.

Yunani telah menjadi pusat perdebatan publik mengenai dampak penghematan yang diberlakukan, karena negara tersebut mengalami salah satu resesi terdalam di negara-negara kapitalis maju sejak Depresi Besar (*Great Depression*); antara 2008 hingga 2017, Yunani kehilangan 28,1% dari PDB riilnya, sedangkan pengangguran membubung dari 7,8% menjadi 21,5% pada periode yang sama (memuncak pada 27,5% pada tahun 2013). Krisis ekonomi membenamkan negara itu ke dalam krisis sosial yang mendalam, yang tercermin juga pada tingkat politik, dalam bentuk krisis keterwakilan yang mendalam, di mana identitas politik dan afiliasi partai yang telah berurat-berakar runtuh, sementara yang baru dibentuk.

Mengingat latar sosialnya, pertanyaan krusialnya adalah apakah strategi *degrowth* yang berkelanjutan dan disengaja dapat terus berkembang. Jika tidak, seperti yang dikemukakan di sini, maka akan menjadi penting untuk menyoroti hambatan mekanisme utama apa yang telah sedemikian mempersulitnya. Tantangan terhadap gagasan *degrowth* tersebut janganlah dijadikan alasan untuk menolak agenda dari gagasan tersebut, namun, sebaliknya, harus dilihat oleh para ahli teori *degrowth* sebagai rintangan yang harus diatasi untuk memperkuat fondasi strategi mereka.

Sebagaimana akan menjadi jelas dalam dua paragraf berikut, baik resep kebijakan Troika maupun alternatif kiri masih berputar di pusaran debat mengenai pertumbuhan, dan oleh sebab itu, seluruh perdebatan publik berkembang di sekitar amat pentingnya pertumbuhan.

Strategi yang diadopsi oleh Troika berusaha untuk mempromosikan investasi dan pertumbuhan yang bertumpu pada ekspor untuk ekonomi Yunani, memajukan resep devaluasi internal dan reformasi struktural pasar tenaga kerja dan produk, dan menargetkan nilai tukar riil sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing dan menempatkan ekonomi Yunani ke dalam siklus yang baik. Namun hasilnya terbukti merupakan bencana bagi sebagian besar rakyat Yunani.

Rute alternatif yang diusulkan oleh kaum kiri kepada Troika berlipat ganda. Di satu sisi, mereka yang menganjurkan bahwa Yunani harus tetap di zona Euro namun tetap berpijak pada kubu “anti-penghematan”, mengusulkan sebuah “Rencana Marshall” (*Marshall Plan*) baru yang diharapkan akan meningkatkan investasi publik maupun manajemen permintaaan agregat yang akan meningkatkan konsumsi dan investasi swasta. Melalui kombinasi dengan restrukturisasi hutang publik Yunani, strategi ini akan memastikan keberlanjutannya dan menghasilkan pekerjaan dan pendapatan melalui mekanisme Keynesian. Di sisi lain, para pendukung *Grexit* [mundurnya Yunani dari zona Eropa] mengklaim bahwa adopsi mata uang nasional baru yang didevaluasi secara nominal terhadap Euro akan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor, sehingga mengarah pada kombinasi pertumbuhan yang dimotori oleh ekspor (*export-led growth*) dan substitusi impor yang sebagian besar didasarkan pada manufaktur.

Tantangan pertama terhadap pengembangan narasi *degrowth* yang solid di Yunani berasal dari keberlanjutan hutang publik dan hubungannya dengan pertumbuhan *output*. Sejak saat Yunani dihadapkan pada krisis kebangkrutan utang publik, keberlanjutan utang menjadi tujuan kebijakan yang diutamakan, setidaknya secara retorika. Variabel kunci untuk keberlanjutan utang publik adalah keseimbangan antara fiskal primer, dan hubungan antara suku bunga obligasi pemerintah dan tingkat pertumbuhan output nominal. Jika tingkat pertumbuhan nominal kurang dari tingkat bunga, apa yang disebut “efek bola salju” akan terpicu dan diharapkan dapat meningkatkan utang publik, bahkan di bawah surplus primer. Pertumbuhan *output* kemudian menjadi variabel yang paling penting untuk keberlanjutan hutang publik. Dalam keadaan yang mendesak seperti itu, proposal untuk strategi “*degrowth*” kurang memiliki daya tarik.

Tantangan kedua berasal dari bentuk finansialisasi kapitalisme kontemporer dan terkait dengan deflasi utang, yang kemudian menjerat suatu perekonomian ke dalam lingkaran setan “resesi utang swasta.” Ekonomi kapitalis adalah ekonomi yang memproduksi uang, dan neraca unit mereka saling terkait melalui jaringan finansial yang kompleks. Di bawah kehadiran utang swasta yang berlebihan, sebuah resesi meningkatkan beban utang, yang mengarah ke deflasi utang.

Tantangan ketiga terkait dengan pengangguran dan biaya sosial yang menyertainya. Tidak perlu ada argumen bahwa tingkat pengangguran yang memuncak dari 7,8% pada tahun 2007 menjadi 27,5% pada tahun 2013 telah mengguncang fondasi masyarakat Yunani dan menimbulkan risiko politik yang signifikan. Mengingat bahwa ketenagakerjaan memiliki korelasi positif yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi, agenda kebijakan di Yunani pasti terkait dengan strategi pertumbuhan, dimana tekanan tinggi untuk mengatasi peng-

angguran dalam periode politis telah menyebabkan rintisan ketergantungan yang semakin kuat. Dengan kata lain, karena tidak ada persiapan untuk strategi *degrowth* yang mampu menciptakan lapangan kerja baru, maka paradigma “urusan berjalan seperti biasanya” (*business-as-usual*) tetap mendominasi perdebatan publik, yaitu: dengan pertumbuhan yang lebih tinggi—lapangan kerja akan lebih banyak.

Tantangan keempat berasal dari fakta bahwa ekonomi yang mengalami kelangkaan masuknya kapital, seperti yang terjadi di Yunani selama resesi, menurunkan standar lingkungan ekonomi secara signifikan untuk menarik investasi. Undang-undang baru tentang investasi jalur cepat telah menjadi bukti dari kecenderungan di atas. Terdapat banyak contoh mengenai investasi yang akan memicu resistensi sosial seandainya berlangsung sebelum krisis, tetapi pada waktu ini dianggap sah secara sosial. Ini termasuk proyek-proyek ekstraktif baru, termasuk tambang-tambang emas baru di Chalkidiki di Yunani Utara, atau kontrak eksplorasi yang telah ditandatangani pemerintah Yunani dengan perusahaan-perusahaan minyak untuk eksploitasi cadangan minyak dan gas alam di laut Ionia dan Kreta. Contoh lain mengenai kehausan akan pertumbuhan adalah konsesi dari bekas bandara Athena di Elliniko, yang oleh pemerintah sekarang pernah direncanakan untuk dialihfungsikan menjadi sebuah taman metropolitan, kemudian berubah menjadi rencana pengembangan permukiman sangat besar karena tekanan dari investor asing dan domestik.

Sifat ekonomi dari tantangan-tantangan yang harus dihadapi suatu “agenda *degrowth*” bukan berarti bahwa ekonomisme [*economism*, teori yang mendukung keutamaan penyebab atau faktor ekonomi] harus diterima. Namun tantangan-tantangan tersebut menimbulkan kendala spesifik yang harus dipahami, karena pentingnya peran permasalahan-permasalahan tersebut dalam suatu “perekonomian pertumbuhan” (*growth economy*). Menghindari tantangan-tantangan tersebut sebagai “segi-segi ekonomisme” hanya mengabaikan kenyataan dan melemahkan kemungkinan untuk suatu strategi *degrowth*.

Pada saat yang sama, tidaklah adil untuk mengatakan bahwa selama Yunani berada dalam masa kritis, tidak muncul metode-metode alternatif untuk mengatur produksi atau mempertanyakan pola konsumsi. Sebaliknya, sejumlah inisiatif alternatif telah lahir, meskipun di tingkat lokal, termasuk bank waktu [*time bank*, pertukaran jasa dengan memakai jangka waktu jasa sebagai nilai tukar], pertamanan kota, jaringan “tanpa perantara” untuk barang-barang pertanian, dan bahkan usaha ventura manajemen mandiri. Meskipun demikian, inisiatif-inisiatif tersebut seringkali terpisah-pisah dan tidak dapat membentuk alternatif yang layak, terutama di bawah kondisi resesi yang parah. Namun setidaknya mereka telah merangkul benih-benih kontra-paradigma organisasi sosial, yang secara ideologis mempertanyakan persepsi dominan mengenai kebutuhan sosial dan mengarahkannya ke arah pelestarian lingkungan dan demokrasi ekonomi. Mereka hadapi ekonomisme dan menempatkan kebutuhan sosial di pusat pola produksi dan konsumsi. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Gabriel Sakellaris <Gabriel.sakellaris@gmail.com>

› Chile:

Dari Neoliberalisme ke Masyarakat Pascapertumbuhan?

oleh **Jorge Rojas Hernández**, Universitas Concepción, Chile



Untuk mendorong perubahan, diperlukan gagasan praktis maupun utopis. Times Up Linz/flickr. Hak tertentu dilindungi.

Dalam sejarahnya yang relatif pendek, Chile telah melewati berbagai rezim ekonomi, sosial, kebudayaan, dan politik. Beberapa pemerintahan menjanjikan reformasi atau revolusi, tetapi dengan berbuat demikian mereka telah menyebabkan konflik yang lebih dalam. Pemerintahan *Frente Popular*, suatu aliansi kiri-tengah, mengambil alih kekuasaan pada tahun 1938 tetapi tidak berlangsung lama. Pada 1964, Eduardo Frei Montalva memenangkan pemilihan presiden sebagai kandidat dari Partai Demokratik Kristen. Program pemerintahannya, yang disebut “Jalan Ketiga” yang merupakan suatu alternatif terhadap sosialisme dan kapitalisme, ditandai oleh reformasi struktural dan politisasi masyarakat secara kuat. Tujuan terpentingnya adalah reformasi agraria.

Dari tahun 1970 sampai 1973, Salvador Allende berkuasa, memimpin pemerintahan populer *Unidad Popular*, sebuah aliansi sosialis, komunis, dan beberapa partai kecil lainnya. Ia menasionalisasi sektor ekonomi utama (perbankan, pertanian,

pertambangan tembaga, dan industri utama). Pemerintahan Allende adalah hasil dari “*Long March*” melalui aparaturnegara Chile untuk meraih lebih banyak kesetaraan dan keadilan untuk kelas pekerja dan strata sosial lain yang lebih miskin di masyarakat. Selain merupakan paradigma pertumbuhan, reformasinya merupakan bagian dari konsep politik emansipatoris di tahun 1960-an. Sayangnya, pada tahun 1973, eksperimen dalam sosialisme demokratis ini berakhir secara dramatis melalui sebuah kudeta militer.

Bersama dengan para ekonom neoliberal, diktatur militer lantas mengimplementasikan kebijakan privatisasi yang radikal. Maksud mereka tidak hanya untuk mengubah model ekonomi, tetapi untuk mentransformasikan masyarakat Chile dan membangun model sosial dan kebudayaan yang baru: suatu masyarakat yang neoliberal dan berorientasi pasar, masyarakat yang terdepolitisasi dan terindividualisasi, secara prinsip berorientasi konsumen, di mana pertumbuhan dan kompetisi dibangun sebagai cara yang “dibenarkan” untuk meraih ke-

majuan dan kebahagiaan individual. Negara semakin menarik diri dari ekonomi dan fungsi sosialnya. Paradigma ini berlanjut selama proses demokratisasi di tahun 1990-an.

Kebijakan privatisasi dan individualisasi ini tentunya menyebabkan hilangnya makna dan ketakutan akan masa depan di kalangan masyarakat Chile yang lebih luas. Sebagai hasilnya, protes dan gerakan sipil seperti protes “*Penguins*” pada tahun 2006, suatu gerakan mahasiswa yang menuntut pendidikan publik yang lebih baik, tumbuh. Ini diikuti di tahun 2011 dengan gerakan mahasiswa besar-besaran menuntut pendidikan tinggi gratis. Kedua gerakan ini meninggalkan jejak pada program pemerintahan selanjutnya. Proses perubahan ini berlangsung sulit dan lambat, tetapi pada akhirnya gerakan ini memiliki dampak sosial dan politik yang positif.

Di awal abad 21, model pembangunan masa kini yang berupaya menjelaskan krisis sosio-ekologis, iklim, dan institusional tampaknya mengalami kejenuhan. Meskipun demikian, yang masih dominan dalam masyarakat industrial adalah rasionalitas instrumental, yang memisahkan aktivitas manusia—yang pasti produktif di Utara Global dan ekstraktif di wilayah Selatan Global—dari alam, menghasilkan perubahan mendalam pada ekosistem, iklim, dan kehidupan sosial. Dan ideologi neoliberal tentang kemajuan dan pertumbuhan yang baru diluncurkan, yang didorong oleh aspirasi bagi modernisasi dan paradigma baru tentang globalisasi, saat ini sedang melintasi batas-batas ekologis dan batas-batas sosial yang bisa disangga oleh Bumi (planet *Earth*) ini. Pembangunan ini tidak berhenti di perbatasan Chile. Pada saat ini kita jauh dari suatu sistem sosial berkelanjutan yang memiliki tanggung jawab ekologis dan sosial.

Perubahan yang dilakukan dengan kekerasan oleh kudeta di Chile saat ini juga dialami di banyak negara, dalam bentuk proses perubahan neoliberal yang perlahan tetapi pasti yang berkaitan dengan globalisasi. Model neoliberal Chile tahun 1980-an sejak awal menunjukkan kepada kita bahwa eksternalisasi produksi mengarah pada lingkungan kerja yang lebih fleksibel dan pembentukan suatu kelas prekariat yang baru. Proses globalisasi bekerja dengan cara yang sama saat ini. Di samping itu terdapat dampak dari revolusi teknologi baru (4.0) yang baru saja dimulai, dengan perkiraan hilangnya pekerjaan-pekerjaan dalam jumlah sangat besar di seluruh dunia. Krisis lingkungan dan perubahan iklim juga memaksa kita untuk berpikir tentang bagaimana pekerjaan akan terdampak oleh kerusakan lingkungan dan peningkatan bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim. Kesemua faktor ini menghasilkan disintegrasi sosial dan ketidaksetaraan baru. Sebagai hasilnya, ketidakpuasan warga meningkat. Ketiadaan inklusi sosial, terlihat di banyak negara, saat ini mengancam demokrasi yang sudah mapan dan hak-hak individual dan sipil, dan pada akhirnya dapat berkontribusi pada hancurnya masyarakat. Tetapi gerakan-gerakan sosial dan lingkungan di banyak tempat di dunia—termasuk di Chile dan di seluruh Amerika Latin—sedang dibentuk, menuntut tidak hanya solusi untuk masalah-masalah kongkrit tetapi lebih banyak reformasi yang ramah pada warga demi masa depan yang lebih baik.

Apakah krisis neoliberalisme dan model pertumbuhan saat ini akan mendorong kemunculan model pascapertumbuhan baru? Tendensi populis sayap kanan yang mengkhawatirkan yang diamati di berbagai negara tampaknya mengarah pada arah yang berbeda. Mereka membentuk suatu kekuatan yang

berlawanan dengan proses transformasi sosio-ekologis dan liberal yang telah diinisiasi sebelumnya. Tetapi bisa saja terjadi bahwa gerakan sosial dan lingkungan yang muncul sebagai respon atas krisis terkini maupun sebagai perlawanan terhadap kebijakan populis sayap kanan akan tumbuh lebih kuat dan lebih tekonsolidasi. Sebagai contoh, dalam pemilihan presiden dan parlemen terakhir di Chile, suatu aliansi kelompok sayap kiri, *Frente Amplio*, turut berpartisipasi. Kurang dari 2 tahun sejak kelahirannya, perolehan suara kelompok ini mencapai 20% dan sekarang memiliki wakil di parlemen. Berlawanan dengan kelompok kiri tradisional, kelompok ini mewujudkan gagasan-gagasan baru di bidang politik, masyarakat dan alam.

Tetapi, fenomena menarik lainnya juga muncul saat ini: serang Chile adalah salah satu negara yang maju dalam pengembangan alternatif baru dalam bidang bisnis, apa yang disebut “*Empresas B*” (“korporasi B” atau “korporasi menguntungkan”), yang diluncurkan oleh suatu generasi *start-up* muda yang memiliki kesadaran sosial dan ekologis yang tinggi. Pangsa pasar mereka terus meningkat secara konstan. Saat ini, di seluruh Amerika Latin, model-model sertifikasi internasional yang telah diadaptasi mempertimbangkan faktor-faktor seperti lingkungan dan keberlanjutan sosial, potensi inovasi, dan kualitas kerja di dalam suatu perusahaan. Dinamisme baru ini mengarah pada kemunculan budaya kerja dan gaya hidup baru.

Di akhir tahun 2017, di seluruh Amerika Latin terdapat 450 “*Empresas B*” yang telah tersertifikasi, 130 di antaranya berada di Chile. Mereka merupakan bagian dari Gerakan Global B yang baru dan suatu model bisnis *Sistema B* yang berdasar pada etika sosio-ekologis. Efisiensi mereka bisa dinilai oleh indikator seperti kesejahteraan publik, suatu cara yang keberkesinambungan dalam menangani ekosistem yang ada, suatu komitmen pada daur ulang dan bio-ekonomi maupun bentuk kerjasama baru. Dengan cara ini, *Sistemas B* nasional membentuk dan kelompok *Academia B* mendukung mereka dengan penelitian ilmiah. Chile saat ini sedang mempromosikan perkembangan ini melalui program Kementerian Ekonomi, Pembangunan, dan Badan Pembangunan Produksi Pariwisata (CORFO) dan lainnya, dengan tujuan melatih orang dan menciptakan pekerjaan-pekerjaan berketrampilan.

Di akhir tahun 2018, lebih dari 1.000 orang dari 30 negara berpartisipasi dalam Pertemuan Dunia Pertama dari Gerakan B di Puerto Montt, Puerto Varas dan Frutillar di sebelah selatan Chile. Inisiatif semacam ini adalah hasil dari perubahan budaya dan politik dalam dekade-dekade terakhir. generasi baru masa kini menghargai nilai-nilai seperti kemerdekaan, kebebasan, demokrasi akar rumput, kreativitas dan inisiatif, penghormatan, toleransi, solidaritas, dan kesadaran ekologis di atas segalanya.

Diharapkan bahwa pendekatan baru dan berkelanjutan yang dapat diamati di Chile ini akan terus memperoleh dukungan politik dan akan tercermin dalam program pemerintah dan konstelasi politik di masa depan. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Jorge Rojas Hernández <jrojas@udec.cl>

› Sosiologi Ekofeminis

sebagai Analisis Kelas Baru

oleh **Ariel Salleh**, Universitas Sydney, Australia dan anggota Komite Riset ISA tentang Lingkungan dan Masyarakat (RC24) dan Gerakan Sosial, Tindakan Kolektif dan Perubahan Sosial (RC48)



Analisis feminis ekologis tumbuh dari praksis kehidupan sehari-hari, sehingga mereka sering mempertanyakan premis-premis gerakan sosial yang diterima begitu saja yang dibingkai secara *top-down* oleh ideologi politik yang mapan. Misalnya, selama tahun 1980-an dan 1990-an, para pakar ekofeminis memperdebatkan kurangnya kesadaran gender-jenis kelamin dalam filosofi “ekologi yang mendalam.” Bukan tujuan dari program lingkungan yang ditolak oleh para pakar ekofeminis; alih-alih, seperti yang mereka katakan, krisis planet berawal pada sistem institusi dan nilai-nilai patriarki kapitalis yang mengglobal dengan cepat. Karena alasan ini, solusi krisis harus mengubah “budaya istimewa maskulinis” yang mendukung sistem itu. Kontroversi ini, yang dikenal sebagai “debat ekofeminisme/ekologi mendalam” berlangsung selama lebih dari satu dekade di jurnal *AS Environmental Ethics*. Dalam pelaksanaan peningkatan kesadaran yang serupa, para teoretisi feminis ekologis telah terlibat secara kritis dengan keilmuan Marxis. Dalam dekade terakhir, artikel-artikel dalam *Capitalism Nature Socialism*, *Journal of World-Systems Research*, dan di tempat lain, telah

memperluas pemahaman publik tentang ekofeminisme sebagai sosiologi kritis. Posisi saya adalah bahwa kombinasi dari situasi-situasi global kontemporer tersebut membutuhkan suatu analisis sosiologis yang baru tentang kelas. Jadi yang diuraikan berikut ini adalah suatu garis besar singkat dari lintasan sejarah dan klaim dari apa yang saya sebut sebagai “materialisme yang terwujud” (*embodied materialism*).

› Materialisme yang terwujud

Kerja reproduksi merupakan dasar dari setiap masyarakat. Dalam pengalaman langsung pekerjaan tersebut, para ibu belajar bagaimana mempertahankan siklus biologis dalam tubuh yang mereka rawat. Demikian juga, petani dan pengumpul menyelenggarakan dan memperbaharui siklus tanah. Pekerja yang tidak termonetisasi ini sebagian besar tidak terlihat dalam ekonomi global, tidak cukup diakui dalam sosiologi, dan tidak diteorikan pula dalam Marxisme. Tetapi dapat diargumentasikan bahwa ketiga pengelompokan kerja ini—ibu-ibu, para petani, dan pengumpul—membentuk suatu *kelas* yang waktunya telah tiba, karena peran keterampilan material mereka dalam menopang kehidupan di bumi.

Kata feminisme ekologis digunakan secara luas untuk menggambarkan politik yang memperlakukan ekologi dan feminisme sebagai satu perjuangan. Itu muncul ketika kondisi kehidupan di lingkungan perkotaan dan komunitas pedesaan berisiko. Perempuan atau laki-laki dapat terlibat dalam pekerjaan yang menguatkan kehidupan. Tetapi karena terutama perempuan di seluruh dunialah yang diposisikan secara sosial sebagai pengasuh dan penanam makanan, maka biasanya para perempuan dari suatu komunitas lah yang terlebih dahulu melakukan aksi lingkungan. Intervensi semacam ini bersifat universal, terlepas dari wilayah, kelas, atau etnisitas; artinya, mereka adalah titik-temu (*intersectional*) yang unik. Di setiap benua sejak 1970-an dan seterusnya, para wanita yang merespon kerusakan kolateral dari model-model konsumerisme kapitalis dan pembangunan pasca-Perang Dunia II mulai melakukan apa yang mereka sebut “ekofeminisme” (*ecofeminism*). Apakah itu menentang polutan beracun, penggundulan hutan, tenaga nuklir, atau agroindustri, politik mereka selalu menghubungkan “lokal” dengan “global.” Para ekofeminis Jerman seperti Maria Mies bahkan memba-



Suatu contoh mengenai bagaimana “kerja meta-industri” meraih kecukupan ekonomi dengan keberlanjutan ekologis. Foto: Ariel Salleh.

ngun karya mereka secara eksplisit atas kontribusi sosialis Rosa Luxemburg.

Tahun 1980-an juga menyaksikan kebangkitan pesat “gerakan sosial baru”—anti-nuklir, *Black Power*, Pembebasan Perempuan, hak tanah adat—dan kaum Marxis benar untuk bersikap skeptis. Ekologi radikal akan dikooptasi oleh Partai Hijau dan kaum profesional teknokratis. Feminisme dibelokkan oleh individualisme liberal, dan berubah menjadi negosiasi isu tunggal dengan negara untuk persamaan hak. Fase ekofeminisme berikutnya mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi Bumi PBB 1992 (1992 *United Nations Earth Summit*), yang mengintensifkan kebijakan neokolonial Utara Global atas nama melindungi alam. Sekarang rencana induk perjanjian regional di seluruh dunia membuka jalan bagi penambangan korporat terhadap tanah adat dan pematenan korporat terhadap tanaman obat masyarakat setempat. Ekofeminis seperti Vandana Shiva dan lainnya hadir di Konferensi Tingkat Tinggi Bumi Rio, dan melakukan apa yang mereka bisa untuk menentang langkah-langkah tersebut. Segera, sebagaimana dicatat oleh sosiolog Peru Ana Isla, Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim akan memaksa konsesi lebih lanjut dari mereka yang tidak berdaya. Abad kedua puluh ditutup dengan *Battle for Seattle*, di mana pemberontakan akar rumput internasional menghadapi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Gerakan luas dari gerakan alternatif rakyat untuk globalisasi ini mengadakan Forum Sosial Dunia pertamanya pada tahun 2001.

› Globalisasi: dekolonisasi

Perluasan perdagangan bebas neoliberal mendemoralisasi proletariat di negara-negara metropolitan dengan mengirim pekerjaan mereka ke luar negeri ke zona-zona pemrosesan ekspor berupah rendah di Selatan Global. Tetapi banyak orang di pinggiran geopolitik memiliki agenda positif—yaitu dekolonisasi. Di Brasil, Gerakan Rakyat Tanpa Tanah yang dinamis berbicara mengenai desa-desa lingkungan dan kedaulatan pangan. Di Ekuador, para perempuan Acción Ecológica menemukan konsep “utang ekologis” untuk menggambarkan pencurian kolonial selama 500 tahun atas sumber daya alam; pencurian modern yang didasari oleh bunga Bank Dunia atas pinjaman pembangunan; dan degradasi mata pencaharian yang terjadi sebagai hasil ekstraksivisme ekonomi. Keadilan dengan keberlanjutan juga ditampilkan di Konferensi Tingkat Tinggi Iklim Rakyat Cochabamba 2010, yang menghadirkan cara-cara Andean dalam penyediaan sebagai alternatif dari pemborosan

kehidupan di bawah kemakmuran yang diproduksi. Penyamaan industrialisasi dengan kemajuan sedang dipertanyakan.

Menyusul krisis keuangan 2008, kaum muda yang sadar global memulai gerakan *Occupy* (menduduki), mendirikan kemah di dekat bursa saham Wall Street untuk menentang kelas kapitalis; di Jerman, mereka memblokir bank-bank Frankfurt. Politik lain yang berdasarkan “nilai-nilai reproduksi” yang menguatkan kehidupan muncul di negara-negara Mediterania yang menentang program-program penghematan Uni Eropa. *Indignados* Spanyol memprakarsai berbagai ekonomi lingkungan hunian mandiri. Di Rio + 20 pada tahun 2012, kelompok bisnis, politisi, dan Program Lingkungan PBB meningkatkan proposal *Green New Deal* mereka—latihan PR untuk bio-ekonomi nanoteknologi; dan sekali lagi, para ekofeminis menantang mereka. Kemudian, para akademisi akan berkumpul di Leipzig dan Budapest untuk mendiskusikan *degrowth*, meskipun visi pasca pembangunan dari pemikir subsisten ekofeminis seperti Veronika Bennholdt-Thomsen belum diakui pada saat itu. Saat ini, Rosa-Luxemburg-Stiftung sedang memeriksa konvergensi ekofeminisme dengan politik berorientasi komunitas lainnya seperti *buen vivir* dari Amerika Selatan, ubuntu dari Afrika Selatan, dan swaraj dari India.

Para ekofeminis memiliki literatur yang luas, yang sering diajarkan di universitas, dan yang mencatat bagaimana di bawah budaya patriarkal kapitalis, pengkarantinaan dan komodifikasi alam merefleksikan tempat dan komodifikasi tubuh pekerja perempuan. Kiasan tradisional untuk Ibu Pertiwi jauh lebih dari sekadar metafora. Sebagaimana yang Greta Gaard tunjukkan, etika veganisme yang welas asih kini beredar di antara jejaring ekofeminis dan pertemuan internasional reguler tentang Perlindungan Hewan. Perempuan di seluruh Afrika yang mata pencahariannya terancam oleh penambangan di dekat desa mereka telah mendirikan WoMin, jaringan anti-ekstraktif kontinental dengan manifesto ekofeminis tersendiri mengenai perubahan iklim. Ibu-ibu dari Appalachia di AS mengatur aksi langsung melawan penghancuran puncak gunung oleh industri batubara. Sekolah Navdanya di India untuk eko-ketercukupan “menyimpan” benih tradisional untuk menyelamatkannya dari paten farmasi. Di Sichuan, Tiongkok, perempuan petani memulihkan kesuburan tanah dengan menghidupkan kembali teknik organik yang sudah berusia berabad-abad. Dan di London, para ibu rumah tangga menyumbangkan waktu mereka untuk memperbaiki tangkapan Sungai Thames dari penyalahgunaan selama berabad-abad.

› Antroposentrisme: ekosentrisme

Ketika aktivis atau, katakanlah sosiolog RC48 ISA, tidak melihat bagaimana logika reproduksi saling berhubungan dengan ekologi, gerakan pekerja, perempuan, dan masyarakat adat, sebuah isu tunggal destruktif “politik identitas” terjadi, di mana hak-hak satu kelompok diadu melawan yang lain. Imajinasi sosiologis yang terbatas ini merupakan ekspresi dari dualisme antroposentris Barat “kemanusiaan” versus “alam,” suatu “akal sehat” tradisional yang diulangi dengan sosialisasi setiap generasi baru.

Sayangnya, roda globalisasi masih dilumasi oleh hierarki “*Great Chain of Being*” nya Aristoteles, sebuah pemikiran diskursif kuno yang menempatkan para dewa, raja, dan pria di puncak kehidupan sosial, yang memiliki kekuasaan atas bawahan seperti perempuan, masyarakat asli, dan alam. Mantra kuno Aris-



toteles telah menyusun arah sejarah sedemikian rupa sehingga selama berabad-abad, perempuan dan budak yang ditaklukkan akan menjadi objek belaka. Lembaga-lembaga Eurosentris, dari agama dan hukum, hingga ekonomi dan sains, dirancang untuk melayani “keistimewaan maskulin” itu—posisi standar internasional yang sedang berlangsung baik untuk kaum liberal maupun sosialis. Seperti yang diamati oleh sejarawan sains ekofeminis Carolyn Merchant, nalar Pencerahan mengkonsep-sualisasi tubuh dan alam sebagai mesin dengan bagian-bagian yang dikendalikan oleh rumus-rumus matematika. Budaya kehidupan yang teralienasi ini sangat diperlukan bagi berfungsinya kapitalisme dan dipertahankan dalam sosiologi oleh beberapa modernis ekologi RC24 ISA yang percaya bahwa inovasi teknologi dapat menyelamatkan lingkungan. Namun, masa depan yang terotomatisasi tidak akan serta-merta “meniadakan wujud materi” (*dematerialize*) menjadi keberlanjutan atau keadilan. Demikian juga, langkah-langkah seperti ekonomi sirkular atau penilaian ulang (*transvaluation*) tenaga kerja perawatan oleh para ekonom feminis diserap kembali oleh logika modal.

Dalam masa krisis ekologis, orang harus dapat berpikir di dalam kerangka ekosentris. Ketika hal ini memberikan suatu tantangan bagi para pengajar sosiologi, para mahasiswa radikal seringkali bergerak melintas ke ekologi politik atau bahkan geografi manusia. Tetapi profesional modernis dapat belajar banyak dari eko-sentrisme epistemologi dari masyarakat adat dan analisis yang berdasarkan pada pengalaman perempuan dalam pekerjaan perawatan organik.

Wacana “kemanusiaan” versus “alam” telah mencegah kaum Kiri, dan terutama kaum feminis pascamodern, untuk menganggap serius angkatan kerja reproduksi yang terpinggirkan ini sebagai aktor politik. Tuduhan Kiri yang biasa adalah bahwa para pakar ekofeminis mengaitkan wawasan politik perempuan dengan “esensi feminin” bawaan—yang merupakan omong kosong belaka. Sumber persepsi ekofeminis bukanlah perwujudan biologis, atau struktur ekonomi, atau adat istiadat budaya, meskipun semua hal tersebut mempengaruhi tindakan manusia. Sebaliknya, epistemologi ekofeminis didasarkan pada kerja: dalam pembuatan dan penciptaan kembali pemahaman dan keterampilan melalui interaksi dengan dunia material yang hidup. Orang-orang yang bekerja secara mandiri, di luar rutinitas industri yang mati rasa—pengasuh, petani, pengumpul—berhubungan dengan semua kapasitas indera mereka dan mampu membangun model resonansi yang lebih akurat tentang bagaimana suatu hal berhubungan dengan yang lain.

› Kerja regeneratif

Kerangka waktu kelas pekerja ekosentris ini bersifat antargenerasi, dan dengan demikian pada hakekatnya merupakan tindakan pencegahan. Keakraban menjadi pertimbangan, memaksimalkan daya tanggap pekerja terhadap transfer materi-energi di alam atau dalam tubuh manusia-sebagai-alam. Penilaian didasarkan pada suatu keahlian yang dibangun dengan mencoba-coba, dengan menggunakan penilaian sejak lahir hingga akhir hayat (*cradle-to-grave*) dari ekosistem atau kesehatan tubuh. Beragam kebutuhan spesies atau kelompok umur diseimbangkan dan disesuaikan. Ketika ekonomi domestik dan mata pencaharian mempraktikkan pemecahan masalah secara sinergis, pengambilan keputusan multi-kriteria adalah sebuah kewajaran. Ketika tidak ada pemisahan antara keterampilan mental dan manual, maka tanggung jawab menjadi transparan; produk tenaga kerja tidak

teralienasi dari pekerja seperti di bawah kapitalisme, tetapi dinikmati dengan berbagi dengan orang lain. Di sini logika linier produksi digantikan oleh logika sirkular reproduksi. Nyatanya, penyediaan sosial dengan cara ini secara simultan merupakan ilmu setempat dan aksi politik langsung.

Feminisme ekologi mengemukakan politik sinergis, menumbuhkan mata pencaharian, pekerjaan terampil, solidaritas, otonomi budaya, kesadaran jenis kelamin-gender, pembelajaran, pemberdayaan, dan pembaruan spiritual. Sebuah contoh saat ini dapat ditemukan di Ekuador di antara para ibu dan nenek dari bukit-bukit Nabon yang hancur karena pembangunan. Dengan berpandangan ke depan dan kreativitas, para perempuan yang mengatur diri ini telah mencapai kontrol erosi, panen air, kesuburan tanah, dan kedaulatan pangan dengan menanam untuk memulihkan daerah tangkapan air dan aliran air tua. Dalam hal ini, mereka juga melakukan bagian mereka untuk krisis iklim global. Demikian juga, serikat tani internasional Via Campesina menegaskan, “penyediaan skala kecil kami mendinginkan bumi.”

Pekerjaan reproduksi menciptakan “cara mengetahui” yang relasional yang melawan kekerasan mekanistik dari akal instrumental Barat. Jika politik radikal tidak dipandu oleh pekerja perawatan, dia akan dengan mudah kembali ke jenis Pencerahan yang memperlakukan Bumi dan orang-orangnya sebagai sumber daya tanpa akhir untuk pertumbuhan ekonomi. Di saat alasan linear dari industri modern memotong metabolisme alam, meninggalkan kekacauan dan entropi, meta-industri yang memelihara proses kehidupan mengembangkan epistemologi diam-diam yang mengekspresikan bentuk alternatif kreativitas manusia. Tenaga kerja semacam itu, yang secara bebas dirampas oleh modal dari wilayah pinggiran domestik dan geografisnya, sebenarnya merupakan prasyarat dari moda produksi kapitalisme. Dengan kata lain, kelas pekerja yang unik ini ada “di dalam kapitalisme” ketika aktivitasnya mensubsidi nilai lebih; namun penyediaan reproduksi juga berada “di luar kapitalisme,” cukup untuk dirinya sendiri. Istilah “meta” yang saya gunakan menyiratkan suatu kerangka dasar, yang membatasi aktivitas subsider.

Ekonomi yang ramah lingkungan tidak mengeksternalisasi biaya dengan mengeksploitasi tubuh orang lain, juga tidak mengeksternalisasi limbah sebagai “polusi.” Keterampilan tenaga kerja regeneratif sangat diperlukan untuk masa depan global yang berkelanjutan dan fakta yang luar biasa adalah bahwa hal itu sudah dipraktikkan oleh mayoritas pekerja di dunia. Pengakuan ini memberikan kekuasaan strategis yang besar pada kelas meta-industri sebagai aktor sejarah dalam arena politik internasional. Kepedulian sosialis klasik dengan “hubungan produksi” yang eksploitatif—sangat penting sebelumnya—mengesampingkan kekhawatiran terhadap “hubungan reproduksi” yang sangat menindas. Meskipun demikian, ada bagian-bagian dalam tulisan Marx yang mungkin menggambarkan dengan baik “kelas tenaga kerja meta-industri,” seandainya fokus humanisnya kurang patriarkis dan Eurosentris. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Ariel Salleh
<ariel.salleh@sydney.edu.au>

› Brasil 2018:

Kelas-kelas Menengah Bergeser ke Kanan

oleh **Lena Lavinias**, Universitas Federal Rio de Janeiro, Brasil, dan **Guilherme Leite Gonçalves**, Universitas Negeri Rio de Janeiro, Brasil



Sejak Februari 2018 kehadiran banyak tentara dan polisi di jalan-jalan telah menjadi suatu bagian yang normal dalam kehidupan di Rio de Janeiro. Foto: EBC - Empresa Brasil de Comunicação/Agência Brasil. Creative Commons.

Di Amerika Latin, tahun 1980-an mengakhiri kediktatoran-kediktatoran militer yang telah mengekang kekuatan-kekuatan perubahan sosial selama beberapa dekade. Tetapi sementara transisi menuju demokrasi memperluas lingkaran formal kewarganegaraan, ia juga mempengaruhi krisis ekonomi dan pakta-pakta elit.

Di Brasil, transisi yang *lambat*, *bertahap*, dan *aman* yang digembar-gemborkan oleh presiden [yang berlatar belakang] militer kedua terakhir [1974-1979], Ernesto Geisel, mengandung kontradiksi-kontradiksi ini. Undang-undang Amnesti yang merupakan kesepakatan yang dibuat antara para pemimpin politik dan ekonomi dan angkatan bersenjata, mengabaikan para korban penyiksaan dan para keluarga orang-orang yang hilang. Di negara-negara seperti Argentina, Bolivia, Chile, Guatemala,

la, Peru, dan Uruguay, kesepakatan serupa juga dibuat, yang mendorong dipenjarakannya para penyiksa dan, dalam beberapa kasus, mantan kepala negara. Di Brasil, Komisi Kebenaran (2011-14) mencoba untuk terus mengekalkan kenangan tentang kekerasan negara itu ke dalam kebijakan, tetapi rekomendasinya tetap tidak efektif.

Terlepas dari keterbatasannya, redemokratisasi Brasil menciptakan ruang untuk partisipasi politik yang lebih besar. Kelas-kelas menengah memainkan peran mendasar dalam menata kembali masyarakat sipil, berjuang untuk kebijakan-kebijakan yang feminis dan anti-rasis. Mereka juga berperan sangat penting dalam Majelis Konstituante 1987, dan menentukan dalam sejumlah pemilihan umum setelah berakhirnya kediktatoran. Pada tahun 1989, kelas-kelas menengah mendukung Luís Inácio Lula da Silva, calon yang diusung Partai Peker-

ja (PT) sebagai presiden. Sedangkan kandidat yang menang, Fernando Collor de Mello, mewakili keberlanjutan bagi para elit yang telah diuntungkan oleh rezim militer. Ketika muncul dugaan korupsi terhadap Collor, sektor-sektor kelas menengah melakukan mobilisasi secara besar-besaran pada tahun 1992 demi memakzulkan presiden neoliberal pertama Brasil.

Pada tahun 1990-an, kelas-kelas menengah terus mendukung Lula, yang [kemudian masih] kalah dari Fernando Henrique Cardoso pada 1994 dan 1998. Pada tahun 1994, mayoritas suara Lula berasal dari mereka yang berpenghasilan antara dua sampai sepuluh kali lipat upah minimum, dan dari pemilih yang paling berpendidikan. Dukungan terkuat bagi Cardoso datang dari kedua ujung di spektrum pendapatan. Pada tahun 1998, Cardoso memenangkan mayoritas di semua kelompok pendapatan, berkat kinerjanya yang sangat baik di

kalangan mereka yang paling tidak berpendidikan. Lula, sementara itu, terus memperlihatkan prestasi yang kuat di kalangan yang paling terdidik.

Era Cardoso dicirikan oleh kebijakan stabilitas moneter, privatisasi penuh, dan penghematan fiskal dan itu justru membawa Brasil ke dalam resesi. Restrukturisasi ekonomi yang mendalam menempatkan kelas menengah dalam kondisi yang buruk, ditekan oleh menyusutnya pekerjaan tradisional, letupan model substitusi impor (yang telah memperluas posisi-posisi teknis dan birokrasi), hilangnya nilai upah, dan berkurangnya kesempatan kerja yang baik. Hilangnya status sosial berubah menjadi dukungan kelas menengah bagi Lula dalam pemilihan umum tahun 2002, di mana suara mereka membawa pekerja untuk pertama kali ke tampuk kekuasaan menjadi presiden Brasil. Pada tahun 2006, dukungan kelas menengah untuk Lula mulai berkurang. Kecenderungan menurun itu akan makin menukik pada tahun 2010 dan 2014, ketika Partai Pekerja mencalonkan Dilma Rousseff (yang memenangkan kedua pemilihan umum). Perlahan tapi pasti, pemilih kelas menengah bergeser ke kanan.

› **Ekspansi pro-pasar di era Lula/Dilma**

Lula naik ke kursi kepresidenan pada tahun 2003 di tengah-tengah perlambatan ekonomi dan menyusutnya pertumbuhan, meskipun stabilitas moneter dicapai oleh “*Plano Real*” [rencana pemerintah untuk menstabilkan ekonomi]. Keberhasilan yang banyak dipuji oleh seluruh warga negeri dalam mengatasi inflasi gagal mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, serta gagal mendorong mobilitas sosial ke atas bagi warga kelas menengah.

Pemulihan ekonomi dalam masa jabatan pertama Lula (2003-06) tumbuh lebih kuat di masa keduanya (2007-10). Awalnya, ledakan harga

komoditas menopang ekspor dan mendorong pertumbuhan. Ini adalah tahun-tahun yang ditandai oleh perluasan lapangan pekerjaan formal secara signifikan dan peningkatan pendapatan rata-rata. Upah minimum mengalami peningkatan nyata lebih dari 70%, jauh di atas angka inflasi. Secara paralel, program-program pengentasan kemiskinan memastikan manfaat yang tidak berlebihan tetapi ajek bagi 14 juta keluarga. Akses kepada jalur kredit baru juga memungkinkan proses inklusi keuangan yang luar biasa. Keberhasilan program “*Bolsa Família*” [tunjangan keluarga; sebuah program kesejahteraan sosial dari pemerintah] yang terkenal di dunia justru bersumber dari kenaikan tajam dalam tingkat monetisasi kelompok masyarakat yang paling rentan, yang digiring menuju pasar konsumen massal.

Pada saat yang sama, proses privatisasi juga terjadi. Privatisasi layanan kesehatan, bersamaan dengan menurunnya pembiayaan layanan kesehatan masyarakat (*public*), memperlihatkan peningkatan yang mengejutkan dalam permintaan untuk perencanaan-perencanaan layanan swasta. Dalam bidang pendidikan tinggi, mahasiswa semakin bergeser dari lembaga publik ke swasta. Pada tahun 2015, 75% mahasiswa belajar di lembaga-lembaga pendidikan swasta. Angka hutang pinjaman mahasiswa mencolok: 51% telah gagal bayar (dengan jumlah sekitar USD 5 miliar), dan dari kelompok itu, lebih dari setengahnya tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan pembayaran.

Penilaian yang terlalu tinggi (*overvaluation*) terhadap mata uang Real menjadi insentif bagi impor barang-barang manufaktur secara besar-besaran, dan pada akhirnya melemahkan pemulihan kegiatan industri. Salah satu warisan Partai Pekerja adalah diperbarunya sentralitas sektor primer, yang didorong tidak hanya oleh permintaan global yang lebih tinggi untuk bahan baku, tetapi juga oleh aliansi erat an-

tara koalisi yang memerintah dengan agrobisnis.

Pertumbuhan ekonomi mulai melemah pada tahun pertama pemerintahan Dilma (2011). Jalan-jalan mulai menjadi tempat untuk menggemakan ketidakpuasan “kelas menengah baru”—sebuah istilah yang diciptakan untuk menjelaskan hilangnya rintangan bagi mobilitas sosial, yang memungkinkan kelompok berpenghasilan rendah untuk mengkonsumsi seperti kelas menengah. Kemudian saat memasuki bulan Juni 2013, suatu gerakan massa yang spontan menuntut transportasi umum, layanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan yang lebih baik.

Untuk memahami proses ini dengan lebih baik, haruslah diingat bahwa meskipun pendapatan telah meningkat, dan harga barang-barang manufaktur dari tahun 2006 hingga 2013 menurun, pengeluaran untuk pendidikan, perawatan kesehatan, penitipan anak, dan perawatan lanjut usia jauh melampaui angka rata-rata inflasi dan gaji. Sementara kredit yang mudah diperoleh tetapi mahal memenuhi impian-impian untuk konsumsi, [akibatnya] semakin banyak orang terpuruk menjadi korban hutang, yang menghabiskan banyak pendapatan rumah tangga mereka. Saat ini sekitar 63 juta orang dewasa di Brasil berada dalam keadaan gagal memenuhi kewajiban membayar hutang kepada lembaga keuangan.

› **Kelas menengah dan kaum ekstrem kanan**

Dengan tenggelamnya mereka dalam hutang, kelas-kelas menengah menjadi kecewa terhadap berbagai kontradiksi yang terjadi pada perkembangan tahapan-tahapan berturut-turut dari perluasan pro-pasar, setelah terjadinya redemokratisasi. Ditambah dengan depolitisasi yang menandai masa-masa *booming* [pertumbuhan ekonomi], keadaan ini telah menempatkan mereka dalam



posisi yang saling bertentangan dan bergejolak yang dihadapkan pada berbagai platform politik dan membuat mereka mudah tertawan ke dalam wacana dari kaum kanan.

Elemen pertama dari wacana ini adalah seruan untuk kembali ke kediktatoran militer, yang dipuja-puja sebagai masa yang lebih baik dalam sejarah Brasil. Ini didorong oleh kebijakan yang menutup mata terhadap kekerasan negara yang dilakukan pada periode ini, berkat pakta elit yang disepakati selama redemokratisasi.

Lebih jauh lagi, kaum ekstrem kanan telah menciptakan kembali ketegangan sosial melalui cara-cara diskriminatif yang bersifat nasionalis, *chauvinist*, dan etno-rasial. Ini adalah cerminan dari rasa tidak aman di kalangan kelas menengah dengan menuding musuh yang dianggapnya bertanggung jawab atas keadaan masyarakat, yaitu: kaum kiri, perempuan, homoseksual, kalangan Kulit Hitam, kaum masyarakat adat, dan semua orang yang telah mencapai status sosiopolitik lebih tinggi yang sebelumnya tidak dapat diakses. Melalui penindasan terhadap “kaum liyan,” hal itu merupakan upaya untuk mempertahankan posisi istimewa mereka yang telah didegradasikan secara sosial oleh pasar. Yang kru-

sial, kelompok ekstrem kanan juga memanfaatkan kekecewaan kelas menengah terhadap pemerintahan Lula dan Dilma: berupa “*antipetismo*” (*anti-PTism*) [sikap anti Partai Pekerja-partai tempat Lula dan Dilma berafiliasi] yang merupakan pengolahan rasa frustrasi politik dan ekonomi menjadi kebencian dan kekerasan yang bersifat pribadi.

Ujaran kebencian dari kaum kanan didasarkan pada kebiasaan melakukan kekerasan terhadap kaum miskin dan kelas pekerja yang telah dianggap sebagai kebijakan negara, yang hasilnya dapat dilihat ke dalam angka-angka yang brutal: di mana sejak Februari 2018, ketika militer diminta untuk campur tangan di Rio de Janeiro, polisi atau militer telah membunuh satu orang setiap enam jam. Sasarannya adalah pemuda Kulit Hitam yang tinggal di *favelas* [wilayah-wilayah kumuh di Brasil]. Dorongan untuk memerangi kekerasan dengan kekerasan, meskipun strategi-strategi semacam itu sangat tidak efektif, telah menjadi standar bagi sektor-sektor menengah yang melihat ketidakamanan kota sebagai bentuk kurangnya otoritas negara, yang harus diperbaiki dengan konsekuensi apapun bagi masyarakat.

Dalam pemilihan umum baru-baru ini, kandidat pemenang ekstrem

kanan, mantan militer berpangkat kapten, Jair Bolsonaro, menguasai dukungan kalangan pemilih berpenghasilan tinggi dan kelas menengah tamatan sekolah menengah atau bergelar perguruan tinggi, sementara Fernando Haddad, kandidat Partai Pekerja, mendapat dukungan di kalangan yang termiskin dan paling tidak berpendidikan. Hal ini mengungkapkan seberapa jauh posisi-posisi tersebut menjadi terbalik di percaturan politik. Tetapi sekarang kita dapat mengamati dua elemen baru dalam pertarungan politik Brasil yang sangat mirip. Yang pertama terkait dengan kinerja tinggi Bolsonaro yang ia peroleh di semua segmen sosial. Yang kedua, memahami meningkatnya ketidakpedulian dan tidak dihargainya aturan demokrasi justru di kalangan kelas-kelas yang sangat vital bagi redemokratisasi Brasil. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada:
Lena Lavinias <lenalavinias@gmail.com>
Guilherme Leite Gonçalves
<guilherme.leite@uerj.br>

› Populisme, Identitas, dan Pasar

oleh **Ayşe Buğra**, Universitas Bogaziçi, Turki



Krisis mata uang di Turki baru-baru ini menunjukkan bagaimana pelanggaran hukum untuk menyelamatkan otonomi bank sentral dapat mengakibatkan gangguan serius pada perekonomian. Foto: Ayşe Buğra.

Sejak tahun 1990-an, populisme adalah suatu istilah yang telah digunakan secara luas untuk merujuk pada suatu ideologi non-liberal tipe baru yang menandai partai politik tertentu beserta para pimpinan mereka di sejumlah besar negara. Suatu klaim moral atas representasi eksklusif—di mana keabsahan seluruh oposisi dapat ditolak—nampaknya merupakan salah satu ciri inti populisme dan merupakan dasar dari pengamatan yang mengganggu bahwa pemerintahan yang terpilih secara demokratis bisa menjadi ancaman bagi demokrasi. Namun, ancaman yang dipermasalahkan tersebut ini mungkin tidak tampak dengan jelas di dalam wacana dan orientasi politik dari suatu partai populis ketika mereka baru mulai berkuasa; ciri-ciri yang umumnya dikaitkan dengan partai populis sering berbentuk proses dinamis yang secara bertahap menyimpang dari norma dan institusi demokrasi representatif. Karena itu mungkin dapat diberi arahan bahwa sifat populisme dapat difahami dengan lebih baik dengan mendekatinya sebagai sebuah proses daripada sebuah ideologi dengan seperangkat ciri bawaan.

› Proses populisme sayap kanan di Turki

Ketika AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan) mulai berkuasa di Turki pada tahun 2002, “demokrasi konservatif” adalah istilah yang digunakan oleh para pemimpinnya untuk menggambarkan posisi ideologisnya dalam upaya untuk menghilangkan keprihatinan terhadap masa lalu Islamisnya. Para pendiri partai ini sesungguhnya memiliki formasi politik dalam Gerakan Pandangan Nasional Islamis (*Islamist National Outlook Movement*), dan kebanyakan dari mereka pernah menduduki posisi penting dalam koalisi pemerintah yang dipimpin oleh RP (Partai Kesejahteraan) yang dibubarkan pada tahun 1997 karena orientasi anti-sekuler mereka. Meskipun demikian, klaim para pemimpin AKP bahwa partai telah meninggalkan posisi Islamisnya mereka terdengar meyakinkan bagi banyak orang di dalam dan di luar negeri. Pernyataan komitmen pada strategi ekonomi berorientasi pasar juga menenteramkan mereka yang telah siap menerima AKP sebagai suatu partai sayap kanan yang normal.

Pada waktu ini AKP dan pemimpinnya,

Erdoğan, tampil sebagai suatu contoh utama di dalam perdebatan tentang ancaman populisme terhadap demokrasi. Perubahan persepsi ini lebih sedikit kaitannya dengan adanya agenda Islamis terselubung dibandingkan dengan berkembangnya kecenderungan yang sudah ada untuk mempolarisasikan masyarakat. Kecenderungan ini pada awalnya merupakan suatu argumen defensif untuk melawan apa yang dimunculkan sebagai suatu oposisi yang terdiri atas kekuatan-kekuatan sekuler otoriter yang asing bagi keseluruhan budaya negara dan memusuhi pemerintahan yang dipilih oleh mayoritasnya.

AKP, sebagaimana RP pada tahun 1990-an, telah menggunakan banyak bahasa politik pengakuan (*politics of recognition*) untuk menegaskan posisi yang tidak menguntungkan dari mayoritas Muslim di negara di bawah [Partai] Republik yang sekuler. Sejatinnya, ini adalah kasus mengenai pemenang populis yang bertindak selaku korban dan menampilkan mayoritas sebagai minoritas yang zalimi, sebagaimana disampaikan Jan-Werner Müller dalam bukunya *What is Populism?* Namun, dalam lingkungan yang berlaku pada



Foto: Ayşe Buğra.

periode itu, di mana politik identitas (identity politics) dianut secara luas untuk pemilahan antara politik sayap kiri dan sayap kanan, beberapa orang menafsirkan pula bahwa elemen wacana AKP ini merupakan panggilan demokrasi untuk mengakui adanya perbedaan budaya melawan kontestasi universalisme pada posisi para sekularis. Selain itu, pendekatan AKP pada politik identitas juga meluas ke minoritas etnik, dengan janji untuk mengakui dan menghormati perbedaan budaya mereka yang selama ini ditolak, setidaknya di tingkat wacana. Untuk sejenak, ini membantu partai untuk menikmati dukungan dari segmen yang berbeda dari penduduk, termasuk para intelektual liberal kiri dan beberapa warga Kurdi.

Lebih dari satu dekade setelah pembentukan pemerintahan pertama AKP barulah dapat terlihat masalah yang melekat pada pendekatan partai terhadap perbedaan kelompok. Ketika pengakuan terhadap perbedaan budaya ditampilkan sebagai suatu dimensi utama dari keadilan, pertanyaan mengenai representasi yang adil [justru] dinilai dari monopoli yang sah dari partai terpilih atau pemimpinnya di atas representasi politik semua kelompok.

› Penggunaan politik identitas oleh kelompok kanan

Menimbang perkembangan politik terkini di Turki, sebuah pertanyaan yang diajukan oleh Sheri Berman menjadi relevan: “Mengapa politik identitas lebih menguntungkan kelompok

kanan dibanding kelompok kiri?” Sebagaimana telah diperingatkan Eric Hobsbawm pada tahun 1996 dalam artikel yang dipublikasikan dalam *The New Left Review*, nasionalisme adalah satu-satunya bentuk politik identitas yang didasarkan pada suatu keterikatan bersama pada mayoritas warga negara; dan “kelompok Kanan, terutama kelompok Kanan dalam kekuasaan, telah selalu melakukan klaim monopoli atas hal ini.” Dalam kasus AKP, keberhasilan menggunakan bahasa politik identitas telah berkembang menjadi suatu bentuk nasionalisme di mana partai-partai oposisi ditampilkan sebagai ancaman terhadap kepentingan nasional. Hal ini tergambar, contohnya, dalam pidato-pidato kampanye sebelum pemilihan umum tahun 2015.

Seiring dengan perubahan diskursif dari afirmasi perbedaan budaya ke bahasa nasionalistik, terdapat pula perubahan institusi penting yang diperkenalkan secara berturut-turut setelah tiga referendum yang dilaksanakan pada tahun 2007, 2010, dan 2017. Faktanya, kasus Turki menunjukkan bagaimana usia populisme kami sama dengan usia referendum. Kebangkitan populisme terkini dan arti penting referendum yang diamati secara global sebagai bentuk pengambilan keputusan politik dapat ditafsirkan sebagai refleksi dari ketidakpuasan yang luas di kalangan rakyat terhadap demokrasi perwakilan. Dengan demikian, keduanya membangkitkan kekhawatiran yang sama dalam lingkaran liberal mengenai bentuk kedaulatan rakyat yang tidak di-

batasi oleh sebuah sistem *checks and balances*. Di Turki, referendum memang telah memainkan peranan signifikan dalam penghapusan secara bertahap terhadap hambatan-hambatan birokrasi dan hukum pada pihak eksekutif, dan, pada akhirnya, dalam pendirian sistem presidensial di mana presiden terpilih memiliki kekuasaan yang besar dalam pengambilan keputusan.

Menariknya, masuknya negara dalam pasar ekonomi global tetap merupakan faktor penting untuk membatasi penggunaan kekuasaan pengambilan keputusan absolut oleh penguasa yang terpilih. Krisis mata uang di Turki baru-baru ini telah menunjukkan bagaimana pelanggaran aturan hukum (*rule of law*) dan pengabaian terhadap otonomi bank sentral berdampak pada erosi kepercayaan investor yang mengakibatkan gangguan serius kepada ekonomi. Karena sekarang menjadi jelas bahwa krisis tidak bisa hanya dikelola semata dengan rujukan berulang pada kekuatan-kekuatan yang berkonspirasi melawan negara, politisi populis otoriter mungkin harus mengakui bahwa kekuasaan mereka dapat berbenturan dengan berfungsinya ekonomi pasar secara mulus. Perubahan seperti apa yang bisa kita harapkan di wilayah politik dan kebijakan ekonomi masih serba tidak pasti. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Ayşe Buğra <bugray@boun.edu.tr>

› Populisme Sayap Kanan di Amerika Latin

Kepentingan Diri di Atas Kesejahteraan Bersama

oleh **Ramiro Carlos Humberto Caggiano Blanco**, Universitas São Paulo, Brasil, dan **Natalia Teresa Berti**, Universitas del Rosario, Kolombia



Protes di Argentina. Foto : Ramiro Carlos Humberto Caggiano Blanco.

Kejayaan komoditas pada masa 2000-an memungkinkan pemerintahan Argentina dan Brasil untuk menerapkan kebijakan reindustrialisasi yang dikombinasikan dengan integrasi sosial. Kedua pemerintah tersebut melaksanakan beberapa kebijakan yang memungkinkan pertumbuhan kelas menengah dan mengentaskan banyak penduduk dari kemiskinan, antara lain nasionalisasi ulang perusahaan-perusahaan strategis, regulasi (ulang) sebagian pasar tenaga kerja, menerapkan upah minimum, menguatkan pendidikan publik, dan mendukung kredit perumahan. Akan tetapi, kebangkitan ekonomi tersebut dan daya tarik aliran investasi secara signifikan mempertahankan karakter ekonomi kedua negara yang sangat terkonsentrasi. Krisis tahun 2008 menunjukkan kerapuhan hak-hak istimewa yang dinikmati kelas-kelas menengah. Pada tahun itu juga muncul klaim-klaim otoriter dan penolakan dari kaum *caceroleros*

di Argentina dan *paneleiros* di Brasil (pendemo yang memukul-mukul panci), yang memainkan peran penting dalam runtuhnya dukungan untuk Cristina Fernández de Kirchner dan Dilma Rousseff, dan kebangkitan pemerintahan populis sayap kanan sesudah itu.

Pada bulan Maret 2008 di Argentina, beberapa kalangan yang terkait dengan eksportir biji-bijian memulai serangkaian protes dan pemblokiran jalan untuk memprotes strategi pajak baru yang dimaksudkan untuk menata ketimpangan antara sektor agraris yang sangat kompetitif dan berbagai jenis industri yang secara teknologi ketinggalan. Lamanya dan besarnya dukungan terhadap demonstrasi tersebut di kawasan-kawasan pertanian mengakibatkan sebagian daerah perkotaan di ambang kekurangan pangan.

Inilah awal mula serangkaian demonstrasi “swa-kelola” oleh kalangan

kelas atas dan menengah di Buenos Aires, yang meluas ke kota-kota lain di tengah keriuhan bunyi panci dan wajan. Mendekati 2012 demonstrasi itu menjadi masif tetapi secara bertahap kehilangan daya. Demonstrasi-demonstrasi tersebut, yang dikenal dengan #13S #8N #18A #8A #13N and #18F¹, menyuarakan bermacam keluhan—korupsi dan kurangnya kebebasan, tunjangan universal untuk anak, dll.—yang kesemuanya diungkapkan lewat seruan-seruan dan poster-poster agresif yang menyerang presiden dan partai berkuasa.

Pada bulan Mei dan Juni 2013 di Brasil, peristiwa-peristiwa protes menuntut angkutan umum gratis (*free collective transport*) bergeser fokusnya, menjadi protes kelas menengah yang menolak Piala Dunia dan kerentanan layanan-layanan publik. Pada tahun 2015 dan 2016, protes meluas ke hampir seluruh kota besar di Brasil, berubah karakter dan nadanya menjadi sangat agresif melawan baik

Presiden Dilma Rousseff maupun Partai Pekerja, dan kebijakan-kebijakan sosial yang diperkenalkan sejak 2002. Tuntutan-tuntutan ini menggabungkan seruan pemakzulan terhadap Rousseff, sikap fasis terhadap regenerasi kediktatoran, dan kebencian publik terhadap kelompok kiri. Berbagai kelompok terang-terangan meminta “intervensi militer segera.”

Kelas-kelas menengah dan atas berdemonstrasi menentang penyempitan jurang sosial yang berusaha dicapai oleh kedua pemerintahan melalui *anti-cyclical policies* [kebijakan untuk mengatasi pergerakan siklus ekonomi] dan regulasi pasar tenaga kerja. Para pengusaha kecil dan menengah menolak pemberdayaan kaum buruh, dan kelas pekerja kantoran menolak kehilangan hak istimewa untuk mempunyai pembantu rumah tangga yang tak terdaftar. Bersamaan dengan itu, mereka menyamakan kebijakan sosial dengan korupsi individu dan negara. Mereka memakai “teori meritokrasi” demi membenarkan kesenjangan sosial dan melegitimasi kemiskinan sebagai kegagalan pribadi karena kemalasan atau kurangnya ketrampilan. Gagasan ini sejalan dengan “teologi kemakmuran” yang dipakai oleh gereja-gereja Pantekosta untuk mengatakan bahwa usaha manusia diganjar secara ekonomis oleh Tuhan, dan dengan narasi-narasi “kewirausahaan.”

Ketidakpuasan terhadap korupsi—yang dilakukan oleh Kirchner di Argentina dan Petista (Partai Pekerja) di Brasil—sebagai suatu gejala “penyimpangan karakter” para pemimpin tersebut, yang dimulai dengan kutukan terus-menerus dan ditandai oleh *Manichaeism* [pandangan teologis yang dualistis mengenai baik dan buruk] dan bersifat selektif, menjadi ladang persemaian beberapa jenis teori fundamentalis. Pada saat bersamaan mereka memakai cara pandang parsial tentang siapa yang sebenarnya pelaku korupsi, tanpa mempertanyakan ciri struktural kedua masyarakat.

Fundamentalisme diartikan sebagai persepsi bahwa ada kebenaran sejati yang menafikan kemungkinan apapun untuk berdebat. Fundamentalisme anti-komunis lahir kembali di

Argentina dan Brasil dengan topeng *antichavismo* [menentang ideologi sayap kiri Presiden Venezuela Hugo Chavez]. Ancamannya sekarang adalah “Venezuelisasi” dan “Bolivanisme” secara umum, yang difahami sebagai usaha untuk menghancurkan fondasi “kapitalisme Barat” dan “ke-luarga tradisional.” Para pendukung fundamentalisme anti-komunis tersebut menolak perbaikan ketimpangan sosial dan gender, yang terwujud dalam kebencian terhadap orang miskin, feminis, gay, dan kulit hitam di Brasil dan para *villeros* (warga pemukiman kumuh) di Argentina. Yang kesemuanya dituduh tidak kompeten, bodoh dan gampang dibeli.

Hal ini telah membuka jalan bagi populernya ideologi ultraliberal, yang merupakan warisan intelektual Sekolah Austria, yang menurut peneliti sosial asal Brasil Carapaná didukung dua landasan: “negara minimal” dan *pacta sunt servanda* [perjanjian bersifat mengikat para pihak] yang menyatakan bahwa semua hak direduksi menjadi apa yang “secara bebas” disepakati oleh pihak-pihak terkait. Dari situ dibangunlah dikotomi *sui generis* [secara spesifik] sederhana yang diartikan sebagai: pemaksaan negara [sayap] kiri versus kebebasan pasar [sayap] kanan. Urutan yang pertama mewakili pendapat bahwa “kesetaraan” dipandang sebagai ancaman, sementara urutan kedua memaknai kembali konsep kebebasan sebagai “absennya negara.” Tren ini berlanjut dengan makin populernya ideologi ultraliberal yang merupakan warisan intelektual Sekolah Austria, yang menurut peneliti sosial asal Brasil Carapaná adalah gabungan antara “negara minimal” dan *pacta sunt servanda* atau kontrak yang mengatur bahwa semua hak direduksi menjadi apa yang “secara bebas” disepakati oleh pihak-pihak terkait. Dari situ dibangunlah dikotomi *sui generis* yang terlalu sederhana dan diartikan sebagai: kiri-negara-pemaksaan versus kanan-pasar-kebebasan. Urutan yang pertama mewakili pendapat bahwa “kesetaraan” dipandang sebagai ancaman, sementara urutan kedua memaknai kembali konsep kebebasan sebagai “absennya negara.”

Momentum kedua dalam kontruksi populisme sayap kanan terjadi dalam perjudohan antara ultraliberalisme dan Kristen fundamentalis dalam segala bentuknya. Serangan terhadap negara merupakan titik temu bersama karena selain “membatasi ruang kebebasan,” negara juga menggerogoti otoritas patriarki melalui intervensi publik, bahkan di pendidikan swasta. Aliansi antara organisasi-organisasi nonpemerintah yang membela ultraliberalisme dan gereja-gereja neo-Pantekosta mewujud di Argentina dan Brasil dalam bentuk gabungan serangan terhadap kebijakan sosial dan campur tangan negara di bidang ekonomi, kutukan terhadap “ideologi gender,” dan tuduhan tentang telah terjadinya “indoktrinasi oleh guru terhadap siswa” di sekolah-sekolah.

Menurut sosiolog Brasil Camila Rocha, keberhasilan munculnya rezim kebencian subjektif, yang menghalangi kemungkinan analisis dan dialog demokratis, bisa diterangkan lewat penggunaan teknologi baru secara efektif, ruang makin luas yang diberikan oleh media hegemonik terhadap gagasan-gagasan semacam itu, dan penyusupan secara perlahan ke dalam organisasi politik tradisional seperti organisasi nonpemerintah dan partai politik. Jadi, tercapailah konsensus menentang perjuangan-perjuangan yang sepertinya sudah tercapai dengan pulihnya demokrasi di kedua negara (Argentina tahun 1983, Brasil tahun 1986): pertarungan demi hak asasi manusia dan melawan ketimpangan sosial. Dan konsensus ini diterima di dalam masyarakat dengan tingkat kesukarelaan yang tinggi, postulata-postulata palsu, penyederhanaan yang keliru, dan “berita bohong” yang tiada habisnya. ■

¹ Berurutan: 13 September dan 8 November 2012; 18 April, 8 Agustus, dan 13 November 2013, dan 8 Februari 2014.

Seluruh korespondensi ditujukan kepada:
Humberto Caggiano Blanco
<ramirocaggiano@gmail.com>
Natalia Teresa Berti
<natalia.beriti@urosario.edu.co>

› Nasionalisme Radikal

sebagai Budaya Tandingan Baru di Polandia?

oleh **Justyna Kajta**, Universitas Wroclaw, Polandia



Pawai Hari Kemerdekaan yang diselenggarakan oleh kekuatan-kekuatan nasionalis di Warsawa, Polandia, pada tahun 2011. Wikipedia, Creative Commons.

Dukungan yang meningkat untuk partai-partai populis sayap-kanan dan nasionalis telah mengkhawatirkan para sosiolog dan para pembuat kebijakan demokratis di banyak negara dalam beberapa tahun terakhir. Di Polandia, keberadaan organisasi-organisasi nasionalis radikal telah terlihat lebih jelas sejak 2015, ketika partai Hukum dan Keadilan (PiS) yang berhaluan konservatif sayap-kanan memenangkan pemilihan parlemen. Peningkatan serupa dalam wacana-wacana nasionalis dapat dilihat di negara-negara di seluruh Eropa dan di tempat lain di mana partai-partai kanan radikal populis memperoleh suaranya melalui mobilisasi seputar topik-topik seperti migrasi dan kedaulatan.

Apa arti nasionalisme radikal di Polandia pada saat ini? Apa artinya berjuang untuk “Kebesaran Polandia”?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saya melakukan penelitian dengan anggota organisasi nasionalis di Polandia. Saya melakukan wawancara naratif biografis untuk melacak jalur biografi mereka ke organisasi maupun motif dan pandangan dunia mereka.

Melihat cara para nasionalis menggambarkan diri mereka sendiri dan aktivitas mereka, kita dapat melihat empat kategori wacana utama. Pertama, mereka melihat diri mereka sebagai pendidik generasi baru para patriot yang mengetahui sejarah Polandia dan mendorong versi politik yang tepat tentang hal tersebut. Kedua, mereka adalah pembela/pencipta (kembali) identitas Polandia yang hanya didasarkan pada tradisi dan nilai-nilai Katolik. Ketiga, nasi-

onalis adalah aktivis anti-sistemik yang menentang “sistem” yang secara luas diartikan sebagai EU [Uni Eropa], keamanan politik, kondisi politik pasca-1989, dan kalangan media liberal. Keempat, mereka menampilkan diri sebagai warga negara yang terlibat secara sosial dan politik—yang berbeda dengan mayoritas masyarakat Polandia—yang peduli dan sadar akan kemungkinan ancaman.

Berdasarkan analisis narasi dan materi yang dipublikasikan pada situs web organisasi mereka, dapat dikatakan bahwa gerakan nasionalis kontemporer di Polandia adalah gerakan sosial kontra-pascamodern (*postmodern*) yang melawan liberalisme dan beralih ke tradisi. Ini dapat dilihat sebagai suatu jenis budaya-tan-

dingan (*counter-culture*): anti-liberal (didasarkan pada dominasi—yang dirasakan—wacana dan politik sayap kiri-liberal), anti kemapanan, anti-UE, anti-heterogen. Sementara budaya tandingan dari tahun 1960-an didasarkan pada slogan-slogan progresif, apa yang sekarang kita amati adalah putaran (yang tidak memungkinkan) ke masa lalu yang sulit dibayangkan mengingat seluruh perubahan yang sudah terjadi sejak saat itu. Apa yang membuat budaya tandingan ini semakin aneh adalah kenyataan bahwa pemerintah (PiS) tampaknya menjadi bagian dari hal tersebut. Masalah lainnya adalah kegagalannya untuk mendefinisikan secara tegas pada tatanan masa lalu/tatanan tradisional [mana] yang ingin dikembalikan: [sebab] masa lalu bekerja lebih sebagai semacam konsep abstrak ketimbang sebagai titik referensi spesifik. Gerakan nasionalis kontemporer juga merupakan gerakan anti-sistemik yang menantang kelas politik dan tidak adanya transformasi mendalam dan nyata setelah tahun 1989 (termasuk kurang [efektifnya] de-komunisasi

dan transisi yang mudah dari elit politik menjadi elit nasional). Orang-orang yang ambil bagian dalam gerakan ini lebih terhubung oleh budaya, identitas, dan politik daripada ekonomi. Mereka memiliki (1) perasaan akan adanya ancaman terhadap nilai-nilai (bangsa, agama, keluarga tradisional, sejarah) yang diyakini sebagai pembentuk fondasi peradaban Eropa dan Polandia; (2) keyakinan bahwa panggung politik penuh dengan kemunafikan; dan (3) keyakinan bahwa negara Polandia memiliki kedaulatan yang terbatas.

Realitas dilihat dalam arti dikotomi yang mencolok: pada tingkat yang paling umum, dunia dibagi menjadi “baik” dan “jahat” (lihat Tabel 1). Yang berada di sisi “baik” adalah nilai-nilai yang paling penting bagi organisasi: peradaban Eropa, agama (Kristen), bangsa, dan keluarga. Nilai-nilai tersebut digambarkan dengan mengacu pada tradisi, komunitas, dan tatanan moral. Hal-hal tersebut dianggap asli (*native*), alamiah, abadi, dan karenanya nyata.

Selain itu, kita dapat mengamati dua pasang kategori yang tidak terpisahkan—(1) bangsa Polandia dan kepercayaan Katolik dan (2) peradaban Eropa dan Kekristenan—yang menggambarkan sentralitas agama dalam nasionalisme Polandia. Apa yang mendominasi pada sisi “kejahatan” adalah liberalisme, yang dipandang bertentangan dengan cara pandang dunia yang tradisional, dan yang diidentikkan dengan (antara lain) Uni Eropa. Bersama dengan materialisme, relativisme, dan egaliterisme, liberalisme menghancurkan tatanan sebelumnya dan mengarah pada disintegrasi komunitas. Bertentangan dengan kategori-kategori yang “baik,” yang “jahat” diciptakan dan “dipaksa” oleh kekuatan/kelompok eksternal. Dalam realitas yang demikian, kelas politik, Uni Eropa, kaum homoseksual, dan pengungsi menjadi musuh utama. Mereka mempersonifikasikan ciri-ciri dan fenomena yang dipandang berbahaya karena mereka mengancam visi bangsa yang homogen, kohesif, dan berdaulat.

Tabel 1. Dikotomi visi mengenai realitas dalam wacana gerakan nasionalis

<p>BAIK tradisi, komunitas, dan ketertiban</p> <p>Peradaban Eropa (tradisi yang nyata, abadi dan berakar)</p> <p>Nilai Kristen abadi (Kepercayaan Katolik, sumber moralitas, kealamiah)</p> <p>Komunitas nasional (keseluruhan organis, hirarki, kemerdekaan, kedaulatan, ketertiban)</p> <p>Keluarga tradisional (kesehatan, komunitas)</p>	<p>JAHAT liberalisme, egoisme, dan degenerasi</p> <p>Demokrasi liberal (UE sebagai suatu rezim, totaliterisme, permusuhan, keasingan, kepalsuan, bahaya)</p> <p>Ideologi pencerahan mengenai hak asasi manusia dan relativisme (kepalsuan, ketiadaan kebenaran obyektif)</p> <p>Kekacauan kosmopolitan dan egaliterisme (materialisme, egaliterisme yang dimitoskan/ diciptakan disintegrasi komunitas dan ketertiban)</p> <p>Model hubungan liberal/sayap kiri (politisi, media, feminis, lobby homoseks; penyakit degenerasi, rentan tercedera)</p>
---	--

Sumber: Analisis 30 wawancara naratif biografis dengan perwakilan Pemuda Polandia, Kelahiran Kembali Polandia Nasional dan Kamp Radikal Nasional pada tahun 2011-15, dan bahan-bahan yang diterbitkan di laman organisasi mereka.





Pawai Hari Kemerdekaan yang diselenggarakan oleh kekuatan-kekuatan nasionalis di Warsawa, Polandia, pada tahun 2011. Wikipedia, Creative Commons.

Nasionalisme radikal didasarkan pada dua emosi yang menonjol: [rasa] ketidakpastian, dan kesombongon. Jika memperhatikan perubahan yang sedang berlangsung dalam konteks politik, ekonomi, dan budaya di tingkat nasional, Eropa, dan global, maka ketidakpastian merupakan perasaan yang umum serta dimiliki bersama dan hal itu saja bukanlah suatu kondisi yang cukup untuk menjadi seorang nasionalis. Namun, wacana nasionalis radikal yang terkait dengan visi dikotomis dunia dapat muncul sebagai jawaban untuk masalah sehari-hari, termasuk yang terkait dengan kesulitan mempertahankan pekerjaan, perumahan, dan standar hidup yang layak. Cerita-cerita tentang pengungsi berbahaya yang memaksakan budaya mereka dan mengambil alih perumahan sosial (*social housing*) dan pekerjaan-pekerjaan; kaum minoritas seksual yang menyalahgunakan anak-anak; perusahaan-perusahaan internasional yang mengeksploitasi pekerja Polandia; dan kaum liberal yang dengan sengaja menyerang tradisi dan nilai-nilai Polandia diserap dengan baik oleh beberapa segmen masyarakat Polandia. Wacana-wacana seperti itu memberikan jawaban-jawaban yang mudah dan titik-titik acuan yang

kukuh yang [dianggap dapat] mengatasi beban ketidakpastian dengan mengubahnya menjadi kebencian terhadap musuh-musuh yang diciptakan. Nasionalisme juga merupakan kebanggaan nasional, yaitu perasaan yang dimanifestasikan sebagai protes terhadap posisi agak terpinggirnaya Polandia di dunia. Demikian pula, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Maciej Gdula tentang para pemilih Partai Hukum dan Keadilan, nasionalisme radikal merupakan cara mencari makna simbolis Polandia dan “bangkit dari rasa ketidakberdayaan.” Ada kebutuhan yang kuat untuk merasa lebih unggul daripada orang lain dan untuk membangun suatu kebangsaan—yang secara historis lebih disadari dan berjangkar—yang lebih baik.

Apakah masyarakat Polandia akan didominasi oleh gelombang budaya tandingan nasionalis? Di satu sisi, dapat dikatakan bahwa nasionalisme radikal tidak akan kehilangan dukungannya segera dan cukup sulit untuk memperkirakan wacana jenis apa yang dapat menggantikannya dan dengan mudah menjelaskan kompleksitas dunia kontemporer. Terlebih lagi, organisasi-organisasi nasionalis bergerak bersama dengan pemerintah Polandia selama perayaan Hari Ke-

merdekaan pada tanggal 11 November 2018, yang menunjukkan bahwa struktur peluang politik menguntungkan perkembangan mereka. Di sisi lain, mereka yang mewakili pandangan dunia oposisi, liberal dan sayap kiri, meskipun konteks politiknya kurang menguntungkan, masih terlihat dan aktif dalam masyarakat Polandia. Salah satu tanda-tanda yang muncul akhir-akhir ini tentang relevansi berkelanjutan mereka adalah hasil pemilihan umum lokal: meskipun PiS umumnya mendapat jumlah kursi tertinggi di pemerintahan-pemerintahan daerah, penduduk kota-kota terbesar di Polandia memilih kandidat yang lebih liberal. Yang dapat kita perkirakan dalam beberapa tahun ke depan adalah meningkatnya ketegangan dan konflik antara wacana-wacana budaya ketimbang pengambilalihan wacana publik oleh kaum nasionalis radikal. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Justyna Kajta <juskajta@gmail.com>

› Menuai Inspirasi

Dari Marie Jahoda

oleh **Johann Bacher**, Universitas Johannes Kepler Linz, Austria, **Julia Hofmann**, Chamber of Labour Vienna, Austria, dan **Georg Hubmann**, Institut Jahoda Bauer, Austria



Marie Jahoda pada tahun 1937. Kredit: AGSÖ (Arsip Sejarah Sosiologi di Austria).

Keterlibatannya dengan gerakan sosial demokratik telah dilarang oleh rezim fasis Austria sejak tahun 1934. Hanya intervensi internasional yang memungkinkannya melarikan diri.

Jahoda semula pindah ke Inggris Raya, di mana ia terlibat dalam beberapa proyek penelitian terapan, termasuk studi tentang skema produksi subsistensi di suatu wilayah pertambangan Wales yang saat itu memiliki angka pengangguran tertinggi. Pada tahun 1945 ia pindah ke Amerika Serikat, memperoleh posisi di departemen penelitian Komite Yahudi Amerika (*American Jewish Committee*), di mana ia menyelesaikan beberapa studi empiris. Pada akhir 1947 ia pindah ke Biro Penelitian Sosial Terapan di Universitas Columbia dan memulai kerjasama yang produktif dengan Robert K. Merton. Pada tahun 1949, ia diangkat sebagai Guru Besar Madya, dan pada tahun 1953 dikukuhkan sebagai Profesor Psikologi Sosial di Universitas New York. Pada tahun 1958 ia kembali ke Inggris Raya karena alasan pribadi dan menjadi guru besar di Universitas Brunel; pada tahun 1965 ia menerima posisi sebagai pendiri, sebagai guru besar Psikologi Sosial di Universitas Sussex. Jahoda wafat di Inggris Raya pada tahun 2001. Di negara asalnya, Austria, penghargaan terhadap capaiannya yang luar biasa justru baru diberikan di akhir-akhir masa kehidupannya, yaitu pada akhir 1980-an. Ia ingin kembali ke Austria setelah Perang Dunia Kedua, namun tidak ada yang menawarinya pekerjaan.

Marie Jahoda adalah penulis lebih dari 250 publikasi, mencakup berbagai bidang: pekerjaan dan pengangguran; sikap dan perubahan sikap, terutama menyangkut anti-Semitisme; konformitas dan otoriterisme; kesehatan masyarakat; metode penelitian dan metodologi; serta psikoanalisis. Banyaknya ulasan beliau dalam jurnal-jurnal terkemuka menunjukkan besarnya minat beliau pada berbagai bidang keilmuan.

Pada tahun 2017 para penulis artikel ini terlibat dalam proses penyuntingan, pembiayaan, serta penyajian tesis doktor—yang hingga masa itu hampir tidak dikenal—dari seorang ilmuwan sosial ternama Austria, Marie Jahoda, yang menjelang akhir tahun 1931 menyelesaikan penelitian disertasi, di bawah bimbingan Karl dan Charlotte Bühler. Pada tahun 1932 Universitas Wina menerima disertasinya. Disertasi ini didasarkan pada 52 wawancara kualitatif dengan penghuni apa yang dinamakan *Versorgungshäuser* di Wina, semacam panti wreda bagi orang-orang yang kurang mampu dan sakit. Penelitian tersebut adalah studi empiris pertama yang menggunakan informasi biografi kaum pekerja. Rangkaian wawancara dan disertasi ini menawarkan pandangan impresif akan kondisi kehidupan kelas pekerja yang tertindas di paruh kedua abad ke-19 dan dua dekade pertama abad ke-20.

Secara bersamaan, Jahoda lebih dikenal karena keterlibatannya dalam “*Marienthal: Sosiografi suatu Komunitas Pengangguran*” (*Marienthal: The Sociography of an Unemployed Community*), suatu studi terkenal yang ditulisnya bersama Paul Lazarsfeld dan Hans Zeisel. Jahoda menulis bagian utama dari laporan tersebut selama musim panas 1932.

Pada tahun 1937, melalui pemberitahuan beberapa hari sebelumnya, rezim fasis Austria memaksanya untuk meninggalkan Austria, dengan didahului penahanan dalam penjara.

› Apa yang dapat kita pelajari dari Marie Jahoda

Sebagai ilmuwan sosial dan warga yang terlibat dalam politik, apa yang dapat kita tuai dari karya ilmiah dan biografinya? Pertama, sebagai penulis, kami ingin menyebutkan ragam latar belakang kami sendiri. Salah seorang di antara kami adalah guru besar sosiologi di sebuah universitas, seorang lain bekerja di sebuah *think tank* [organisasi-organisasi atau kelompok pemikir], serta yang ketiga menjabat suatu posisi

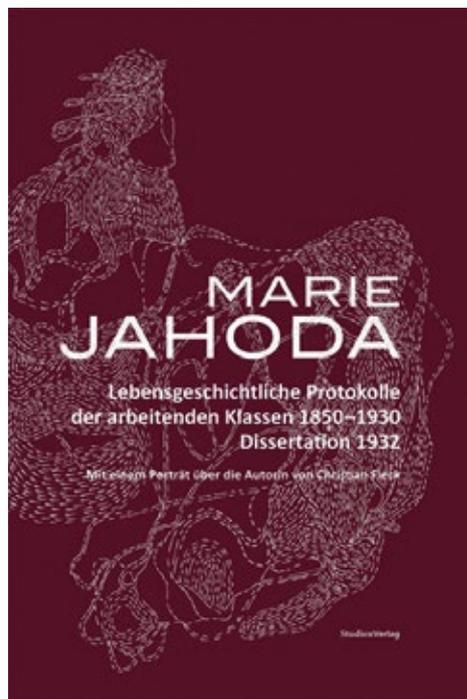


di *Austrian Chamber of Labor* [organisasi nonpemerintah bagi pekerja Austria yang keanggotaannya bersifat wajib]. Usia dan jenis kelamin kami berbeda. Pun ada persamaan dalam latar belakang kami. Kami bertiga mempelajari ilmu sosial (sosiologi dan sosial ekonomi) di universitas yang sama, dan kami semua ingin membantu mengatasi masalah-masalah sosial dan mengurangi ketidaksetaraan sosial.

Kesimpulan pertama yang dapat kita tarik dari karya ilmiah dan biografi Jahoda adalah bahwa karya kita harus difokuskan pada masalah-masalah nyata dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut pun berarti keterlibatan pribadi kita dengan masalah-masalah sosial yang dihadapi. Biografi Jahoda menawarkan banyak contoh yang baik. Keterlibatan demikian menstimulasi karya penelitian, seperti yang ditekankan Jahoda dalam karya metodologisnya, sehingga memicu pemahaman yang lebih baik tentang fenomena sosial dan bahkan memungkinkan penemuan solusi. Jahoda menekankan bahwa pertanyaan-pertanyaan ilmiah yang dikembangkan dalam keadaan abstrak tidak selalu berguna dalam mendefinisikan dan mengatasi berbagai masalah-masalah sosial. Himbauan ini bukanlah suatu hal yang baru ataupun spesifik pada Jahoda. Seperti yang kita ketahui bersama, ini bukan suatu pertanyaan yang mudah dijawab.

Kedua, kita belajar dari Jahoda bahwa analisis masalah-masalah sosial dan ketidaksetaraan sosial menuntut dimilikinya minat pada banyak bidang keilmuan serta kerjasama bersama ilmuwan lintas disiplin. Kompetisi antardisipliner tidak membantu, karena masalah-masalah sosial tidak mungkin dibagi berdasarkan bidang keilmuan. Buah karya Marie Jahoda tidak mengenal batas-batas ilmiah, terutama dengan fokus antardisiplinnya pada sosiologi dan psikologi. Konsepnya mengenai psikologi sosial non-reduksionis bermanfaat untuk menjajaki apa yang dinamakannya realitas sosial, menghubungkan struktur sosial dengan kepribadian (masing-masing, sosiologi dan psikologi). Salah satu tugas psikologi sosial non-reduksionis adalah untuk menganalisis pengalaman apa yang dibentuk oleh institusi sosial, bagaimana interpretasi mereka dapat memengaruhi perilaku orang, dan sebaliknya. Konsep Jahoda mengenai lima fungsi laten pekerjaan masih merupakan suatu contoh yang sangat baik mengenai keterkaitan ini. Konsep ini mengasumsikan bahwa pekerjaan sebagai suatu institusi sosial memberikan jenis pengalaman spesifik yang memenuhi kebutuhan dasar (fundamental) manusia. Pekerjaan (1) menentukan struktur keseharian; (2) mengaktivasi orang, (3) memperluas cakrawala sosial orang di luar keluarga pribadi; (4) berkontribusi pada tujuan kolektif yang lebih tinggi; dan (5) memberikan identitas dan status sosial.

Kelima fungsi laten ini dan hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia masih tetap penting dan berguna dalam menganalisis perubahan sosial, setidaknya di negara-negara Barat. Kita perlu lebih sering bertanya pada diri sendiri sejauh mana dan untuk kelompok manakah perkembangan masyarakat tertentu telah melanggar kebutuhan dasar manusia tersebut. Berdasarkan prinsip metodologis Jahoda, analisis tersebut harus didasarkan pada pengalaman hidup sehari-hari orang dan kebutuhan manusia mereka. Apabila kita memperhatikan hal-hal tersebut, maka analisis dan hasil temuan ilmiah kita akan lebih hidup dan meyakinkan (lihat



Sampul muka disertasi Marie Jahoda, tahun 1932, yang baru-baru ini diterbitkan pada tahun 2017 oleh StudienVerlag : Marie Jahoda *Lebensgeschichtliche Protokolle der arbeitenden Klassen 1850-1930* [laporan Marie Jahoda tentang riwayat hidup kelas pekerja, 1850-1930], diedit oleh Johann Bacher, Waltraud Kannonier-Finster, dan Meinrad Ziegler.

diskusi tentang *Think Tank* dalam [Dialog Global 8.2](#)). Hasil penelitian kita akan menjangkau khalayak yang lebih luas serta merangsang diskusi publik (meskipun tidak semua orang harus setuju!).

Terakhir, analisis kita harus difokuskan pada perkembangan kemanusiaan. Menurut pandangan kami, ilmu-ilmu sosial baru-baru ini terutama dikonsentrasikan pada pertanyaan mengapa masyarakat menghambat perkembangan kemanusiaan kita. Analisis ini, walaupun cukup mendesak dengan mempertimbangkan keparahan dan beragamnya masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat-masyarakat global kita, seringkali mengarah pada suatu diagnosis yang negatif atau pesimis, dan pandangan negatif semacam itu telah menjadi bagian dari identitas kita sebagai ilmuwan sosial. Dengan mengikuti Jahoda, kita perlu lebih mendekatkan kaitan antara masalah-masalah kehidupan nyata dengan penelitian ilmiah kita di satu sisi, dan, di lain sisi, mengembangkan suatu sikap yang lebih optimis. Hal ini akan membantu kita untuk memperkuat peran keahlian akademik dalam wacana ilmiah dan politis, pada zaman berkembangnya pengaruh *think tank* neoliberal. Untuk sebagian, analisis kita harus menjawab pertanyaan berikut: kondisi kemasyarakatan apa yang perlu digenapi agar kita mengembangkan kemanusiaan kita? ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada:
Johann Bacher <johann.bacher@jku.at>
Julia Hofmann <Julia.HOFMANN@akwien.at>
Georg Hubmann <georg.hubmann@jbi.or.at>

› Hubungan Perburuhan dan Dialog Sosial di Portugal

oleh **Elísio Estanque**, Universitas Coimbra, Portugal, dan anggota Komite Penelitian ISA tentang Gerakan Perburuhan (RC44) serta Kelas Sosial dan Gerakan Sosial (RC47), dan **António Casimiro Ferreira**, Universitas Coimbra, Portugal



Mural di jalan-jalan Lisbon menggambarkan Revolusi Anyelir pada tanggal 25 April, 1974. Foto: Kimble Young, Creative Commons.

Portugal adalah negara semi-periferal yang mengalami transisi demokrasi pada tahun 1974, menyusul periode panjang kediktatoran (yang dimulai tahun 1926). “Estado Novo” (Negara Baru) yang otoriter didirikan melalui Konstitusi 1933, yang meletakkan dasar normatif bagi korporatisme fasis yang melegitimasi kontrol negara atas serikat buruh dan dibangun melalui penindasan yang penuh kekerasan terhadap para pekerja.

Perlawanan kelas pekerja masih tersebar dan sporadis selama 48 tahun masa otoriterisme. Hanya pada akhir tahun 1960-an beberapa kelompok perlawanan yang terorganisir di dalam serikat korporat mulai tampak jelas. Ini adalah akibat dari urbanisasi, konsentrasi penduduk di wilayah pesisir, pertumbuhan beberapa layanan publik, serta peningkatan sektor tersier ekonomi, yang membuka ruang bagi dinamika pengorganisasian baru di kalangan buruh (meskipun masih secara sembunyi-sembunyi). Dalam konteks inilah konfederasi serikat buruh yang masih dominan hingga saat ini (Intersindical Nacional, sekarang dikenal sebagai CGTP--Konfederasi Umum Pekerja Portugis) muncul pada tahun 1970. Namun, selama periode tersebut (dari akhir 1960-an hingga revolusi 25 April, 1974), terlepas dari relatif terbukanya ekonomi dan pertumbuhan sektor jasa, Portugal sebagian besar tetap merupakan negara perdesaan. Industri yang baru berkembang bergantung pada tenaga kerja murah yang dibingkai oleh ekonomi yang dikendalikan negara dan berlangsung dalam rezim pengendalian yang represif yang selalu mengawasi para pekerja, serikat-serikat, dan masyarakat pada umumnya.

Adalah Revolusi Anyelir (*Carnation Revolution*) (25 April 1974) yang menciptakan kondisi bagi kemunculan sistem hubungan perburuhan dan hak-hak buruh saat ini. Hanya sejak saat itulah seseorang dapat berbicara tentang dialog sosial dan hukum perburuhan dalam masyarakat Portugis. Lebih lanjut, karena semangat revolusioner yang kuat dari gerakan-gerakan sosial dan rakyat pada periode itulah (1974-5) sehingga Portugal menjadi negara Barat yang langka yang secara terbuka merangkul proyek sosialis, sebagaimana diakui dalam Konstitusi 1976. Namun, masa-masa konflik dan revolusioner ini juga meninggalkan bekas yang mendalam bagi negara ini (yang baik maupun yang buruk),



menciptakan pembelahan struktural di antara model-model sosial yang saling berlawanan. Di dalam ranah politik, keadaan ini diterjemahkan ke dalam pembagian antara: ideologi anti-sistemik-PCP (Partai Komunis) dan ekstrim kiri-dan ideologi-ideologi sosial-demokrat atau liberal-PS (Partai Sosialis) dan PSD (Partai Sosial Demokrat). Konflik ini tercermin dalam ranah serikat buruh antara, di satu sisi, CGTP (serikat buruh “berbasis kelas”, dengan pengaruh komunis) dan, di sisi lain, Serikat Umum Pekerja (UGT-serikat buruh yang reformis dan berorientasi pada dialog) yang didirikan pada 1978.

Undang-undang perburuhan yang dibentuk di bawah konstitusi baru mencerminkan, terutama pada fase awal, pengaruh perjuangan kelas yang intens pada periode revolusioner. Konstitusi melembagakan struktur tripartit pada tingkat makrososial: ini adalah Komite Permanen Dialog Sosial (CPCS) yang didirikan pada tahun 1984, kemudian digantikan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial (CES) pada tahun 1991. Dalam praktiknya, pola dialog sosial dan hubungan perburuhan telah terombang-ambing sesuai dengan konjungtur politik yang berbeda dan dinamika hubungan kekuasaan di antara mitra sosial, maupun evolusi indikator ekonomi dan sosial. Selama 30 tahun terakhir, periode krisis dan dampak ekonomi global telah memicu beberapa perubahan legislatif yang membatasi kebijakan sosial, menyusul kecenderungan umum diberlakukannya deregulasi, fleksibilitas, dan segmentasi tenaga kerja.

Krisis ekonomi-keuangan yang terjadi baru-baru ini pada tahun 2008 berdampak intens pada Portugal, terutama selama pelaksanaan program *bailout* (2011-14). Pada periode itu, kondisi “keadaan pengecualian” muncul di Portugal. Langkah-langkah penghematan yang diberlakukan oleh Troika (Komisi Eropa, Bank Sentral Eropa, dan Dana Moneter Internasional) dan secara intens diterapkan oleh pemerintah sayap kanan (PSD/CDS, yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Passos Coelho) meningkatkan kesenjangan sosial dan eksklusivitas dalam konteks ketegangan sosial yang melibatkan siklus protes dan pemogokan yang didorong oleh gerakan sosial dan gerakan buruh.

Kerangka penghematan ini melibatkan organisasi sosial dan institusionalisme politik dan yuridis yang bertujuan menenangkan dan menstabilkan pasar melalui kepatuhan defisit anggaran dan melalui penghancuran mekanisme dialog sosial. Langkah-langkah penghematan dan agenda “reformis” neoliberalisme menyatu dengan upaya untuk mengurangi biaya tenaga kerja dan kompensasi-kompensasi atas pemutusan hubungan kerja, melenturkan (*flexibilize*) jam kerja, dan membatasi perundingan bersama. Secara khusus, serangkaian perubahan kebijakan legislatif yang bersifat simbolis diperkenalkan untuk mengurangi tunjangan-tunjangan yang diberikan pada kelas buruh. Peran struktur serikat buruh yang diperkirakan akan muncul dalam Konstitusi juga dibatasi, alih-alih memberikan peran istimewa kepada dewan kerja (*work councils*) dan serikat-serikat buruh perusahaan.

Bersamaan dengan itu, bentuk istimewa dari peraturan hubungan perburuhan-perundingan bersama-mendapat kendala serius karena keterbatasan kontrak kerja dan perjanjian kerja bersama. Karena bergantung pada periode negosiasi-dengan atau tanpa perjanjian-keadaan tersebut secara objektif menguntungkan pengusaha. Situasi perundingan bersa-

ma selama periode penghematan tercermin dalam blokade bentuk dialog sosial ini melalui peningkatan asimetris kekuasaan antara para pekerja dan pengusaha. Di sisi lain, pada tingkat makrososial, Dewan Ekonomi dan Sosial (CES) telah memainkan peran penting dalam mengubah kembali kerangka hubungan kerja, di bawah tekanan komitmen yang dibuat dengan Troika. Oleh karena itu, pelemahan-pelemahandi dalam proses yang lebih luas yang disebut dengan “reformasi struktural” hampir tidak dapat menolak keputusan-keputusan seperti itu tanpa hilangnya identitas politik dan yuridis dari undang-undang perburuhan.

Narasi penghematan ditandai oleh fundamentalisme pasar yang mendelegitimasi diagnosis alternatif atas kenyataan, dan menghalangi setiap agenda legislatif yang mencerminkan etos sosial yang melindungi hak-hak perburuhan dan keadilan sosial. Institusi-institusi dan organisasi-organisasi yang benar-benar bergerak dalam bidang dialog sosial dan kewarganegaraan melihat diri mereka terkooptasi dan berubah menjadi instrumen untuk melegitimasi penghematan baru.

Setelah proses demokratisasi (pada tahun 1974), ada empat momen yang dapat diidentifikasi: perluasan dan penanganan penuh dialog sosial makro antara tahun 1970 hingga 1980; kembalinya dialog sosial pada tahun 1990-an yang terkait dengan proses integrasi Eropa dan globalisasi; momen krisis dalam dialog sosial yang ditandai oleh keterlibatan untuk menerapkan langkah-langkah penghematan dan reformasi legislatif selanjutnya; dan pada akhirnya, momen saat ini dimana melalui perjanjian parlementer antara pemerintah Partai Sosialis, Partai Komunis, dan Blok Kiri, poros negosiasi telah masuk ke dalam parlemen dengan mengurangi secara bertahap pentingnya mekanisme negosiasi (baik dalam perundingan bersama maupun mekanisme tripartit).

Sebagai kesimpulan, periode pasca-Troika akhir-akhir ini telah membuka ruang untuk solusi politik baru dengan menawarkan kondisi-kondisi baru untuk kembalinya dialog sosial. Karena alasan ini, saat ini negara tersebut dianggap sebagai sebuah contoh kontra-siklus dalam konteks Eropa, yang juga memperlihatkan suatu kelayakan aliansi yang mengejutkan di antara berbagai kekuatan politik kiri. Dalam konfigurasi politik-perburuhan yang baru ini, bukan hanya para protagonis politik-partisan maupun gerakan-gerakan protes sosial, tetapi juga berbagai bentuk aksi serikat buruh yang berkontribusi pada suasana yang mendukung aliansi dan proses negosiasi. Terlepas dari keraguan dan kebingungan yang muncul dari solusi ini, pengalaman orang Portugis menunjukkan bahwa masa depan dialog sosial melibatkan konfigurasi baru di antara para aktor sosial yang mencakup bidang politik dan tenaga kerja. Ini menunjukkan bahwa, terlepas dari perubahan-perubahannya, pemulihan ekonomi-keuangan dapat dikombinasikan dengan pemulihan kebijakan sosial dan kebangkitan politik aliansi, yang dijalankan dalam demokrasi perwakilan di mana konflik dan negosiasi tidak dapat dipisahkan. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada:
Elísio Estanque <elisio.estanque@gmail.com>
António Casimiro Ferreira <acasimiroferreira@gmail.com>

› Memperkenalkan Tim *Dialog Global* Bengali



| Rokeya Akhter



| Asif Bin Ali



| Md. Eunus Ali



| Abdullah-Hill-Muhaimin
Chowdhury



| Eashrat Jahan Eyemooon



| Kazi Fadia Iqbal



| Habibul Haque Khondker



| Hasan Mahmud



| Mustafizur Rahman



| Khairun Nahar



| Juwel Rana



| Toufica Sultana



| Md. Helal Uddin



Rokeya Akhter seorang konsultan nasional dan profesional dalam proyek-proyek pembangunan di Bangladesh. Ia ahli di bidang rencana aksi gender, gizi bagi orang dewasa, dan ketahanan terhadap perubahan iklim untuk keamanan pangan. Ia adalah seorang kandidat PhD di Universitas Dhaka, Bangladesh. Untuk disertasi doktornya ia meneliti bahasa, budaya dan persekolahan di Dhaka. Ia telah menyelesaikan pendidikan Master dan Honors dalam Sosiologi di Universitas Dhaka.

Asif Bin Ali mengajar Sosiologi di Eastern University, Dhaka dan bekerja sebagai seorang Asisten Editor untuk *Daily Observer*, suatu harian Bangladesh berbahasa Inggris. Ia juga bekerja pada Central Queensland University, Australia sebagai peneliti (*Research Fellow*) sejak 2017. Ia memperoleh gelar MA dalam Sosiologi di South Asian University, New Delhi, India. Pokok bahasan penelitiannya mencakup nasionalisme, terorisme, pembentukan identitas, sosiologi agama, dan sejarah bencana alam.

Md. Eunos Ali adalah seorang mahasiswa jenjang sarjana pada Departemen Sosiologi di Universitas Dhaka. Pokok perhatian penelitiannya adalah gender dan pembangunan, kesehatan masyarakat, dan sosialisasi anak.

Abdullah-Hill-Muhaimin Chowdhury adalah seorang peneliti pemasaran kualitatif, yang sekarang bekerja sebagai rekan di Quantum Consumer Solutions. Ia bergelar master dan bachelor di bidang Sosiologi dari Universitas Dhaka. Pokok perhatian penelitiannya ialah perubahan pola narasi keagamaan dalam kaitan dengan konstruk sosial di Bangladesh.

Eashrat Jahan Eyemoon adalah seorang Lektor di Departemen Sosiologi Universitas Dhaka. Ia menyelesaikan gelar bachelor dan master dalam Sosiologi di Universitas Dhaka. Perhatian penelitiannya mencakup hubungan gender dan tata kelola keamanan pangan.

Kazi Fadia Iqbal memperoleh gelar bachelor dan master dalam Sosiologi dan sedang menyelesaikan MPhil. Ia sekarang bekerja sebagai seorang direktur advokasi dan di divisi jaringan di Institut Transformasi Sosial Asia Selatan (SAIST).

Habibul Haque Khondker, PhD (Universitas Pittsburgh) adalah Profesor Sosiologi di Universitas Zayed, Abu Dhabi, UEA dan ko-presiden Komite Penelitian Asosiasi Sosiologi Internasional mengenai Transformasi Sosial dan Sosiologi Pembangunan (RC09). Pokok perhatian penelitiannya mencakup teori-teori globalisasi, migrasi, negara, masyarakat sipil, demokrasi, politik militer, dan wabah kelaparan. Khondker penulis *Globalization: East/West* (SAGE, 2010) bersama Bryan Turner, dan editor *Asia and Europe in Globalization: Continents, Regions, and Nations* (Brill, 2006) bersama Goran Therborn serta *21st Century Globalization: Perspectives from the Gulf* (Dubai dan Abu Dhabi: Zayed University Press, 2010) bersama Jan Nederveen Pieterse.

Hasan Mahmud adalah Asisten Profesor yang menjabat pada Northwestern University di Qatar. Ia bergelar PhD dalam Sosiologi dari Universitas California-Los Angeles, gelar

MA dalam Kajian Global dari Universitas Sophia di Tokyo, dan gelar bachelor dan master dalam Sosiologi dari Universitas Dhaka di Bangladesh. Ia pernah menjabat sebagai dosen tamu pada Departemen Sosiologi di Universitas Ball State, AS. Perhatian pengajaran dan penelitiannya mencakup teori-teori sosiologi, globalisasi, migrasi internasional dan pembangunan, politik identitas, dan etnografi global. Hasil penelitiannya telah diterbitkan dalam publikasi seperti *Current Sociology*, *Migration and Development*, *Contemporary Justice Review*, dan *Journal of Socioeconomic Research and Development*.

Mustafizur Rahman adalah mahasiswa program master pada Departemen Sosiologi di Universitas Dhaka. Ia telah meraih suatu medali emas pada tahun 2018 untuk prestasinya yang unggul di jenjang pendidikan sarjana. Bidang penelitiannya ialah sosiologi medis dan kesehatan masyarakat.

Khairun Nahar bekerja sebagai terapis wicara dan bahasa di CS Care Limited. Ia memiliki gelar BA (Honours) dan MA dalam bidang Linguistik, dan gelar master ilmu sosial di bidang Wacana dan Terapi Bahasa dari Universitas Dhaka.

Jewel Rana seorang ilmuwan Erasmus yang sedang menempuh pendidikan pascasarjannya di Sekolah Kesehatan Masyarakat di EHESP, Prancis. Pokok bahasan penelitiannya mencakup dampak terpaan lingkungan pada bahan pencemaran, logam beracun, pengganggu endokrin, dan faktor-faktor yang terkait dengan kesehatan fisik dan kognitif kanak-kanak. Ia telah menerbitkan artikel-artikel jurnal dan bab-bab buku mengenai kesehatan lingkungan, perempuan dan kesehatan anak, masalah kardiovaskular, merokok, determinan sosial dari kesehatan, dan ketimpangan kesehatan dalam berbagai jurnal nasional dan internasional. Ia adalah Editor Eksekutif *South Asian Journal of Social Sciences* dan salah seorang pendiri SAIST, Dhaka.

Toufica Sultana mahasiswa program PhD Sosiologi di Universitas Saskatchewan, Kanada. Pokok perhatian penelitiannya mencakup penuaan dan kesehatan mental, sosiologi kesehatan dan penyakit, demografi, kesenjangan sosial, manajemen, dan kajian kerawanan. Ia mengajar Sosiologi di Eastern University, Bangladesh sebelum mengikuti program PhD di Kanada. Ia juga bekerja di Divisi Evaluasi Penelitian (RED) di BRAC, Bangladesh. Ia adalah rekan Editor dari *South Asian Journal of Social Sciences* dan salah seorang pendiri SAIST, Dhaka.

Md. Helal Uddin seorang Lektor (Pengajar) Sosiologi di Eastern University, Bangladesh. Ia menyelesaikan gelar bachelor dan master Sosiologi di Universitas Dhaka. Ia bekerja sebagai Asisten Editor *South Asian Journal of Social Sciences* dan Asisten Direktur (Divisi Penelitian & Inovasi) SAIST. Pokok perhatian penelitiannya mencakup sosiologi lingkungan, sosiologi kesehatan, dan pascamodernisme.